**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah Penataan Ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kota Samarinda diperlukan Rencana Detail Tata Ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46) dan guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Wali Kota wajib menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Samarinda Ulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat yaitu Kecamatan Samarinda Ulu.
4. Kelurahan adalah bagian w ilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yaitu Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Jawa, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Sidodadi, dan Kelurahan Dadi Mulya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata Ruang.
13. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Blok peruntukan, dan/atau persil.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran, irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai atau yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota).
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kelurahan.

24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
31. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
33. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
34. Kabel Bawah Tanah adalah jaringan energi listrik Kabel Bawah Tanah.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
38. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
40. Menara *Base Tranceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
41. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
42. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.

43. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
44. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
45. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
46. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
47. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
48. Sub-Sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
49. Pipa Tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (feses) manusia umumnya berasal dari kloset.
50. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Pemukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
51. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
52. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
54. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
55. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
56. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
57. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
59. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
60. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
61. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

62. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
63. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
64. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
65. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan.
66. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kelurahan.
67. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RT tersebut.
68. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
69. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah adalah Zona yang diperuntukan bagi Sub-Zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal.
70. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
71. Zona Pertanian dengan kode P adalah area yang diperuntukkan dan difungsikan untuk kegiatan pertanian, termasuk bercocok tanam, peternakan, perkebunan, dan kegiatan terkait lainnya.
72. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
73. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.
74. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
75. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
76. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

77. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
78. Zona Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
79. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disingkat Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kota.
80. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
81. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
82. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disingkat Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
83. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha serta tempat hiburan dan rekreasi serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
84. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
85. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
86. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
87. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/usaha, tempat berusaha dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
88. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
89. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara dan laut.

90. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
91. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
92. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah ruang yang diperuntukan untuk fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa instalasi pengolahan air minum.
93. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah ruang yang diperuntukan untuk fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa badan jalan.
94. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana detail tata ruang.
95. Teknik Peraturan Zonasi adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
96. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah Pemanfaatan Ruang ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan kode I, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak pada Zona lindung maupun Zona budidaya dengan kode X.
97. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
98. Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
99. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
100. Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah KTB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan KDH minimal. KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
101. Luas Kaveling Minimum adalah luas kaveling minimum pada Zona Perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan kantor pertanahan.
102. Ketinggian Bangunan (TB) adalah tinggi bangunan yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

103. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
104. Jarak Bebas Samping adalah jarak minimal antara batas persil samping dengan garis samping bangunan yang berhadapan.
105. Jarak Bebas Belakang adalah adalah jarak terpendek antara batas persil belakang dengan garis belakang bangunan.
106. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
107. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
108. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II
## RUANG LINGKUP
### Bagian Kesatu
### Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi:

a. ruang lingkup wilayah; dan
b. ruang lingkup substansi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. delineasi WP; dan
b. batas WP.

#### Pasal 4

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
e. Peraturan Zonasi; dan
f. kelembagaan.

Pasal 5

(1) Delineasi WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu WP Kecamatan Samarinda Ulu ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek administratif dengan luas 5.134,94 (lima ribu seratus tiga puluh empat koma sembilan empat) hektare.

(2) Batas WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu WP Kecamatan Samarinda Ulu meliputi:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baqa, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara; Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang; Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota; dan
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.

(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. seluruh Kelurahan Air Hitam;
   b. seluruh Kelurahan Bukit Pinang;
   c. seluruh Kelurahan Air Putih;
   d. seluruh Kelurahan Jawa;
   e. seluruh Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
   f. seluruh Kelurahan Gunung Kelua;
   g. seluruh Kelurahan Sidodadi; dan
   h. seluruh Kelurahan Dadi Mulya.

(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP dan 18 (delapan belas) Blok terdiri atas:
   a. SWP III.A yang mencakup sebagian Kelurahan Air Hitam, sebagian Kelurahan Bukit Pinang, dan sebagian Kelurahan Air Putih dengan luas 3.381,08 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu koma nol delapan) hektare, terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
   b. SWP III.B mencakup sebagian Kelurahan Air Hitam, sebagian Kelurahan Bukit Pinang, sebagian Kelurahan Air Putih, sebagian Kelurahan Gunung Kelua, dan Sebagian Kelurahan Sidodadi dengan luas 820,90 (delapan ratus dua puluh koma sembilan) hektare, terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   c. SWP III.C mencakup sebagian Kelurahan Air Hitam, sebagian Kelurahan Jawa, sebagian Kelurahan Gunung Kelua, sebagian Kelurahan Sidodadi, dan sebagian Kelurahan Dadi Mulya dengan luas 613,69 (enam ratus tiga belas koma enam sembilan) hektare, terdiri atas Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
   d. SWP III.D mencakup sebagian sebagian Kelurahan Air Hitam, sebagian Kelurahan Air Putih, sebagian Kelurahan Jawa, seluruh Kelurahan Teluk Lerong Ilir, sebagian Kelurahan Sidodadi, dan sebagian Kelurahan Dadi Mulya dengan luas 319,26 (tiga ratus sembilan belas koma dua enam) hektare terdiri atas Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III
## TUJUAN PENATAAN WP

### Pasal 6

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu untuk mewujudkan WP Kecamatan Samarinda Ulu sebagai kawasan permukiman dan perdagangan dan jasa skala kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

## BAB IV
## RENCANA STRUKTUR RUANG
### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi;
   c. rencana jaringan energi;
   d. rencana jaringan telekomunikasi;
   e. rencana jaringan sumber daya air;
   f. rencana jaringan air minum;
   g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   h. rencana jaringan persampahan;
   i. rencana jaringan drainase; dan
   j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kedua
### Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

### Pasal 8

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.4

(3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.3;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.3.

(4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Ketiga
## Rencana Jaringan Transportasi

### Pasal 9

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Jalan Arteri Primer;
   b. Jalan Arteri Sekunder;
   c. Jalan Kolektor Primer;
   d. Jalan Kolektor Sekunder;
   e. Jalan Lokal Sekunder;
   f. Jalan Lingkungan Sekunder;
   g. Jalan Tol;
   h. Jembatan;
   i. Halte; dan
   j. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.

(2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jln. Antasari (Samarinda) melintas di SWP III.D;
   b. Jln. AW. Syahrani (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;
   c. Jln. Gajah Mada (Samarinda) melintas di SWP III.D;
   d. Jln. Juanda (Samarinda) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan
   e. Jln. RE. Martadinata (Samarinda) melintas di SWP III.D.

(3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Jln. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan
   b. Jln. Pahlawan melintas di SWP III.C.

(4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. ruas Sempaja - Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;
b. Jln. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;
c. Jln. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;
d. Jln. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;
e. Jln. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D; dan
f. Jln. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;

(5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Jln. Bhayangkara melintas di SWP III.C;
b. Jln. Gn Cermai melintas di SWP III.D;
c. Jln. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;
d. Jln. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D;
e. Jln. M. Yamin melintas di SWP III.C;
f. Jln. Pasundan melintas di SWP III.D;
g. Jln. Perniagaan melintas di SWP III.C; dan
h. Jln. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D.

(6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.

(7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintas di seluruh SWP.

(8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas di SWP III.A, dan SWP III.B.

(9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada pada:
a. SWP III.B pada Blok III.B.2;
b. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
c. SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

(10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada pada:
a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
b. SWP III.D pada Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(11) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A, dan SWP III.B.

(12) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Keempat
## Rencana Jaringan Energi

### Pasal 10

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
b. Kabel Bawah Tanah;
c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);

d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
e. Gardu listrik.

(2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada pada:
a. SUTT Tengkawang-Embalut melintas di SWP III.A, dan SWP III.B; dan
b. SUTT Samarinda (Ex. GIS)-New Samarinda melintas di SWP III.A.

(3) Kabel Bawah Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, melintas di SWP III.D.

(4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.

(5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, melintas di seluruh SWP.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, berupa Gardu Distribusi, berada pada:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kelima
## Rencana Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 11

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Jaringan Serat Optik; dan
b. Sentral Telepon Otomat (STO).

(3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. jalur SKSO P18 Samarinda - Balikpapan melintas di SWP III.D;
b. jalur SKSO P18 Tenggarong - Samarinda melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D;
c. jalur SKSO P20 Bontang - Samarinda melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan
d. Jaringan Serat Optik Lainnya melintas di SWP diseluruh SWP.

(4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada pada SWP III.D pada Blok III.D.1.

(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lokasi Menara *Base Tranceiver Station* (BTS), berada pada:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;

c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Keenam
## Rencana Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 12

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yaitu sistem pengendalian banjir.
(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Bangunan Pengendalian Banjir, berada pada:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4.
(3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Ketujuh
## Rencana Jaringan Air Minum

### Pasal 13

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, yaitu jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. unit air baku;
b. unit produksi;
c. unit distribusi; dan
d. unit pelayanan.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Bangunan Pengambil Air Baku berada pada SWP III.D pada Blok III.D.3, dan Blok III.D.4; dan
b. Jaringan Transmisi Air Baku, melintas di SWP III.D.
(4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Instalasi Produksi berada pada SWP III.D pada Blok III.D.4; dan
b. Jaringan Transmisi Air Minum, melintas di seluruh SWP.
(5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintas di seluruh SWP.
(6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Hidran Kebakaran berada pada:
a. SWP III.B pada Blok III.B.1;

b. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan
c. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4.

(7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kedelapan
## Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

### Pasal 14

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
c. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sub-Sistem Pengolahan Setempat, berada pada SWP III.B pada Blok III.B.3.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Pipa Tinja melintas di SWP III.B, dan SWP III.D; dan
b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Pemukiman berada pada di SWP III.B pada Blok III.B.3.

(4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada SWP III.C pada Blok III.C.4.

(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kesembilan
## Rencana Jaringan Persampahan

### Pasal 15

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, meliputi:
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;

c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Tempat Pemrosesan Akhir Batu Cermin berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2.

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 16

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, meliputi:
a. Jaringan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainase Sekunder;
c. Jaringan Drainase Tersier; dan
d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a melintas di SWP III.B, dan SWP III.D.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh SWP.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.

(5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4.

(6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. tempat evakuasi;
c. Jalur Sepeda; dan
d. Jaringan Pejalan Kaki.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jln. Antasari (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;
   b. Jln. AW Syahrani (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;
   c. Jln. Gajah Mada (Samarinda) melintas di SWP III.D;
   d. JLN. RE. Martadinata (Samarinda) melintas di SWP III.D;
   e. ruas Sempaja - Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;
   f. Jln. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.C;
   g. Jln. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.B;
   h. Jln. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;
   i. Jln. M.T. Haryono melintas di SWP III.B;
   j. Jln. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D;
   k. Jln. M.Yamin melintas di SWP III.C;
   l. Jln. Gn Cermai melintas di SWP III.D;
   m. Jln. Pasundan melintas di SWP III.D;
   n. Jln. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan
   o. Jalan lingkungan sekunder melintas di SWP B dan SWP C.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. tempat evakuasi sementara berada pada:
      1. kantor Kelurahan Bukit Pinang berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1;
      2. BPM-Pemdes Provinsi Kaltim berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1;
      3. SMK Negeri 17 Samarinda berada pada SWP III.B pada Blok III.B.2
      4. Fastabiqul Khairat *Islamic School* berada pada SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
      5. Masjid Ad-Da'wah berada pada SWP III.D pada Blok III.D.3.
   b. tempat evakuasi akhir berada pada:
      1. Lapangan Universitas Mulawarman berada pada SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
      2. Kantor Gubernur Kalimantan Timur berada pada SWP III.D pada Blok III.D.4.

(4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Jln. Gajah Mada (Samarinda) melintas di SWP III.D;
   b. Jln. RE. Martadinata (Samarinda) melintas di SWP III.D;
   c. Jln. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;
   d. Jln. Pahlawan melintas di SWP III.C;
   e. Jln. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;
   f. Jln. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;
   g. Jln. Kadrie Oening melintas di SWP III.B, dan SWP III.C ;
   h. Jln. M.T. Haryono melintas di SWP III.B;
   i. Jln. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.B;
   j. Jln. Gn. Cermai melintas di SWP III.D;
   k. Jln. M. Yamin melintas di SWP III.C;
   l. Jln. Pasundan melintas di SWP III.D;
   m. Jln. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan

n. Jalan lokal sekunder melintas di SWP III.D.

(5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Jln. Antasari (Samarinda) melintas di SWP III.D;
b. Jln. AW Syahrani (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;
c. Jln. Gajah Mada (Samarinda)melintas di SWP III.D
d. Jln. Juanda (Samarinda) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
e. Jln. RE. Martadinata (Samarinda) melintas di SWP III.D;
f. Jln. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;
g. Jln. Pahlawan melintas di SWP III.C;
h. ruas Sempaja - Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;
i. Jln. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.C;
j. Jln. S Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;
k. Jln. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;
l. Jln. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;
m. Jln. Bhayangkara melintas di SWP III.C;
n. Jln. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;
o. Jln. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D;
p. Jln. M. Yamin melintas di SWP III.C;
q. Jln. Pasundan melintas di SWP III.D; dan
r. Jln. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V
## RENCANA POLA RUANG
### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 18

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 19

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Zona Badan Air dengan kode BA; dan
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 20

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan luas 103,47 (seratus tiga koma empat tujuh) hektare, berada pada:

a. SWP III.A pada Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3;
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan luas 863,65 (delapan ratus enam puluh tiga koma enam lima) hektare, meliputi:
    a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    d. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
    e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
(2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 830,13 (delapan ratus tiga puluh koma satu tiga) hektare, berada pada:
    a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
    b. SWP III.D pada Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
(3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 3,96 (tiga koma sembilan enam) hektare, berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2.
(4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 5,58 (lima koma lima delapan) hektare, berada pada:
    a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
    b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.7.

(5) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 6,47 (enam koma empat tujuh) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.1.

(6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 6,93 (enam koma sembilan tiga) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 10,56 (sepuluh koma lima enam) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

## Bagian Ketiga
## Zona Budi Daya

### Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
b. Zona Pertanian dengan kode P;
c. Zona Pariwisata dengan kode W;
d. Zona Perumahan dengan kode R;
e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
h. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
i. Zona Transportasi dengan kode TR;
j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan luas 128,55 (seratus dua puluh delapan koma lima lima) hektare, berada pada:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas 470,83 (empat ratus tujuh puluh koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 15,43 (lima belas koma empat tiga) hektare berada pada SWP III.B. pada Blok SWP III.B.1.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 26

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf d, dengan luas 2.586,04 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma nol empat) hektare, meliputi:
    a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
    c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 382,26 (tiga ratus delapan puluh dua koma dua enam) hektare, berada pada:
    a. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
    b. SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan
    c. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 585,14 (lima ratus delapan puluh lima koma empat satu) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.

(4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.618,63 (seribu enam ratus delapan belas koma enam tiga) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dengan luas 153,60 (seratus lima puluh tiga koma enam nol) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
   b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
   c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
   d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 129,45 (seratus dua puluh sembilan koma empat lima) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,62 (dua koma enam dua) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

(4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 11,66 (sebelas koma enam enam) hektar, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

(5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dengan luas 748,38 (tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga delapan) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
   b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
   c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 703,06 (tujuh ratus dua koma nol enam) hektare, berada pada:
   a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
   b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
   d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 25,56 (dua puluh lima koma lima enam) hektar, berada pada:
   a. SWP III.C pada Blok III.C.5; dan
   b. SWP III.D pada Blok III.D.4.
(4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 19,76 (sembilan belas koma tujuh enam) hektar, berada pada SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 48,72 (empat puluh delapan koma tujuh dua) hektare, berada pada:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

Paragraf 8

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 30

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dengan luas 13,28 (tiga belas koma dua delapan) hektare, berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2.

Paragraf 9

Zona Transportasi

Pasal 31

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare, berada pada SWP III.D pada Blok III.D.4.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektare, berada pada:

a. SPBT Den Bekang VI di SWP III.B pada Blok III.B.1;
b. Kodim Samarinda Ulu di SWP III.D pada Blok III.D.2;
c. Koramil 01 Samarinda Ulu di SWP III.D pada Blok III.D.2; dan
d. Polsekta Samarinda Ulu di SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 11

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, dengan luas 2,55 (dua koma lima lima) hektare, berupa Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 berada pada SWP III.D pada Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Samarinda Ulu.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
   b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
Pasal 35

(1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap Konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
(3) Pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR, selain didasarkan pada hasil penilaian pelaksanaan KKKPR, juga memperhatikan KKKPR yang telah diterbitkan.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 36

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Indikasi program Pemanfaatan Ruang Prioritas;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP dan/atau Blok.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBD Provinsi);
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota (APBD Kota); dan/atau
   d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. kementerian/lembaga;
   b. Perangkat Daerah;
   c. swasta;
   d. Masyarakat; dan/atau
   e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. tahap pertama periode tahun 2026-2030;
   b. tahap kedua periode tahun 2031-2035;
   c. tahap ketiga periode tahun 2036-2040; dan
   d. tahap keempat periode tahun 2041-2045.

(7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII
## PERATURAN ZONASI
### Bagian Kesatu
### Umum
### Pasal 37

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
a. aturan dasar; dan
b. teknik pengaturan zonasi.

### Bagian Kedua
### Aturan Dasar
### Pasal 38

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

#### Paragraf 1
#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
#### Pasal 39

(1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
   a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I;
   b. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T;
   c. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B; dan
   d. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X.

(2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu pengoperasian, yaitu pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan dalam Zona atau Sub-Zona dengan mengacu pada kebijakan sektor terkait;
b. klasifikasi T2 berupa pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya;
c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
d. klasifikasi T4 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan pada kegiatan usaha kecil dan industri kecil.
e. Klasifikasi T5 berupa pembatasan kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.

(4) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan–persyaratan tertentu sebagai berikut:

a. klasifikasi B1 berupa diperbolehkan bersyarat tidak merusak ekosistem dan mempertimbangkan karakteristik setempat;
b. klasifikasi B2 berupa diperbolehkan bersyarat mewajibkan menyediakan kebutuhan parkir, ruang bongkar muatan dan/atau tempat penampungan muatan di dalam kaveling/persil; dan
c. klasifikasi B3 berupa diperbolehkan bersyarat rekomendasi instansi instansi terkait.

(5) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a. Zona Badan Air dengan kode BA; dan
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
    1. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    4. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
    5. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
   a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
   b. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
   c. Zona Pariwisata dengan kode W;
   d. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
      1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
      2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
      3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
   e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
      1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
      2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
      3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
      4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
   f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
      1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
      2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
      3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
   g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
   h. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
   i. Zona Transportasi dengan kode TR;
   j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
   k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan

(9) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum;
   d. Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum; dan
   e. Luas Kaveling Minimum.

(2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
   a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
   b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum; dan
   c. Jarak Bebas Samping dan Jarak Bebas Belakang minimum.

(2) Ketinggian bangunan (TB) maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, bangunan umum yang dimaksud meliputi:
   a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
   b. bangunan terkait peribadatan;
   c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
   d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
   e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
   f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
   g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
   h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan
   i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodir penyediaan ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 43

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:

a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;

c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
d. ketentuan khusus kawasan resapan air;
e. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
f. ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 44

(1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
   b. ketentuan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

(2) Ketentuan kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2;
   b. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 berada pada:
      1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
      2. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4.
   c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2;
   d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6;
   e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.4, dan Blok III.C.6;
   f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada:
      1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
      2. SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.
   g. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada :
      1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
      2. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4.
   h. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4;
   i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4;
   j. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 berada pada:
      1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
      2. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6.
   k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada:
      1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
      2. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6.
   l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
   m. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada:
      1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
      2. SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.

(3) Ketentuan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.4;

b. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 berada pada SWP III.B pada Blok III.B.3;

c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 berada pada:

1. SWP III.A pada Blok III.A.4;
2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
3. SWP III.C pada Blok III.C.1.

d. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2.

e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada:

1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.4

g. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada:

1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

h. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada SWP III.B pada Blok III.B.3.

i. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 berada pada:

1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada:

1. SWP III.A pada Blok III.A.4;
2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
3. SWP III.C pada Blok III.C.1.

k. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada:

1. SWP III.A pada Blok III.A.4;
2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
3. SWP III.C pada Blok III.C.1.

l. Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2.

(4) Ketentuan kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menetapkan ketentuan antara lain:

a. Batas-batas ketinggian pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ujung landas pacu 04 (= 43,664 mdpl) ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:

1. Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang landas pacu 06 sampai jarak mendatar 2.250 m pada ketinggian 67,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04;
2. Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.750 m pada ketinggian 67,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04;

3. Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah keatas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1.166,67 m pada ketinggian 125,58 mdpl di atas ambang landas pacu 04;
4. Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah keatas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.333,33 m pada ketinggian 172,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 433,33 m pada ketinggian 147,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1000 m pada ketinggian 172,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m pada ketinggian 172,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04;
5. Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian 172,25 mdpl di atas ambang landas pacu 04;

b. Batas-batas ketinggian pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ujung landas pacu 22 (=21,591 M MSL atau 0,177 M AES) ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu Landas pacu sebagai berikut:
   1. Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas pacu 22 sampai jarak mendatar 2.241,15 m pada ketinggian 45 m di atas ambang landas pacu 04;
   2. Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.758,85 m pada ketinggian 45 m di atas ambang landas pacu 04;
   3. Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.272,57 m pada ketinggian 103,63 m di atas ambang landas pacu 04;
   4. Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2318,58 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 04, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 434,51 m pada ketinggian 125,35 m di atas ambang landas pacu 04, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 985,84 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 04 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 898,23 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 04; dan
   5. Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.508,85 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 04.

(5) Ketentuan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas-batas ketinggian ditentukan 172,25 mdpl (seratus tujuh puluh dua koma dua lima meter di atas permukaan laut) di atas ketinggian ambang landas pacu 04.

(6) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
   a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
   b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang; dan
   c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, rawan bencana longsor tingkat sedang.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada pada:
      1. SWP III.B pada Blok III.B.2;
      2. SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
      3. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
   b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada:
      1. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan
      2. SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.
   c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
   d. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada:
      1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
      2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
      3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4; dan
      4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
   e. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada:
      1. SWP III.A pada Blok III.A.3;
      2. SWP III.B pada Blok III.B.1;
      3. SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.4; dan
      4. SWP III.D pada Blok III.D.1, dan Blok III.D.3.
   f. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada:
      1. SWP III.A pada Blok III.A.3;
      2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
      3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4; dan
      4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
   g. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 berada pada:
      1. SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
      2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
      3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan
      4. SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada:
   1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
   2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
   4. SWP III.D. pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

i. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada pada SWP III.D pada Blok III.D.4.

j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.2.

k. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada:
   1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   2. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
   3. SWP III.D pada Blok III.D.2.

l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berada pada SWP III.D pada Blok III.D.2.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Zona Pariwisata dengan kode W berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1.

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1.

c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada:
   1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
   2. SWP III.B pada Blok III.B.1.

d. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.4.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

a. mewajibkan konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis mengenai kawasan rawan banjir;

b. meningkatkan peningkatan kapasitas jaringan drainase dengan pelebaran saluran dan pendalaman saluran;

c. menambahkan 10% (sepuluh persen) dari KDH minimum pada aturan dasar Zona Budi Daya; dan

d. menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan tempat evakuasi.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

a. mewajibkan konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan longsor sesuai aturan teknis mengenai kawasan rawan longsor;

b. membuat tanggul penahan untuk runtuhan batuan;

c. menambahkan 10% (sepuluh persen) dari Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum pada aturan dasar Zona Budi Daya;
d. menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
e. meminimalkan perubahan bentuk lahan; dan
f. melakukan teknik rekayasa penguatan lereng baik secara struktural maupun vegetatif untuk mitigasi gerakan tanah.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
a. mewajibkan konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis mengenai kawasan rawan banjir;
b. mewajibkan konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan longsor sesuai aturan teknis mengenai kawasan rawan longsor;
c. meningkatkan peningkatan kapasitas jaringan drainase dengan pelebaran saluran dan pendalaman saluran;
d. menambahkan 10% dari KDH minimum pada aturan dasar Zona Budi Daya; dan
e. menempatkan peralatan peringatan dini bencana, rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan tempat evakuasi.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 46

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi:
a. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
b. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada:
1. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
b. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 berada pada SWP III.D pada Blok III.D.3.
c. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
2. SWP III.B pada Blok III.B.1.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
b. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada SWP III.D pada Blok III.D.4.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
   a. menyediakan peralatan kesehatan;
   b. menyediakan penerangan;
   c. menyediakan papan informasi;
   d. menyediakan rambu dan jalur evakuasi; dan
   e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, mandi cuci kakus, listrik, pos komunikasi, dapur bersih, pos koordinasi alur komando.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
   a. menyediakan penerangan;
   b. menyediakan papan informasi;
   c. menyediakan rambu dan jalur evakuasi;
   d. menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, mandi cuci kakus, listrik, pos komunikasi, sekolah, dapur bersih, pos koordinasi alur komando; dan
   e. menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas logistik.

(6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 47

(1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, meliputi:
   a. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1;
   b. Zona Pariwisata dengan kode W berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1;
   c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3;
   d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada:
      1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
      2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
   e. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada:
      1. SWP III.A pada Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
      2. SWP III.B pada Blok III.B.3
   f. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan
   g. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1.

(2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
   a. ketentuan KDH pada setiap kaveling / persil ditambah 10% dari aturan dasar intensitas Pemanfaatan Ruang;

b. menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
c. menyediakan saluran air yang terhubung dengan sistem pemanenan air hujan.
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air atau fungsi resapan air dan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari mata air.

(3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, meliputi:
a. ketentuan khusus sempadan sungai;
b. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
c. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada pada SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3;
b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
c. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada SWP III.D pada Blok III.D.3;
d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 berada pada:
1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
2. SWP III.D pada Blok III.D.3.
e. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada:
1. SWP III.A pada Blok III.A.3;
2. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
3. SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

(3) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.4; dan
b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.3, dan Blok III.A.4.

(4) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1;
b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.3
c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan
2. SWP III.B pada Blok III.B.1.

d. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada:
   1. SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3; dan
   2. SWP III.B pada Blok III.B.1.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

a. minimal jarak bebas bangunan pada sempadan sungai sebesar 15 (lima belas) meter dari Zona Badan Air;

b. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada, telah memiliki izin yang sah, dan dinilai tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami sempadan sungai dapat dipertahankan dengan tidak menambah Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan ketinggian bangunan (TB); dan

c. tidak memperbolehkan alih fungsi kawasan sempadan sungai kecuali untuk kepentingan konservasi, rehabilitasi, serta jaringan dan infrastruktur serta kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

a. minimal jarak bebas bangunan pada sempadan sungai sebesar 15 (lima belas) meter dari Zona Badan Air;

b. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada, telah memiliki izin yang sah, dan dinilai tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami sempadan sungai dapat dipertahankan dengan tidak menambah Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan ketinggian bangunan (TB); dan

c. memperbolehkan alih fungsi kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk kecuali untuk kepentingan konservasi, rehabilitasi, serta jaringan dan infrastruktur serta kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

a. menetapkan lebar sempadan sebesar 10 (sepuluh) meter dihitung dari tiang menara;

b. menetapkan jarak bebas minimum vertikal terhadap bangunan sebesar 5 (lima) meter dihitung dari konduktor;

c. pemanfaatan di sekitar sempadan secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam sempadan; dan

d. membatasi penambahan tinggi bangunan.

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

(1) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, meliputi:
   a. Zona Badan Air dengan kode BA berada pada SWP III.A pada Blok III.A.3
   b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2;
   c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2;
   d. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.3;
   e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1;
   f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
   g. Zona Badan Jalan dengan kode BJ berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3
   h. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
   i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.3;
   j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
   k. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.3;
   l. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
   m. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
   n. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
   o. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP berada pada SWP III.A pada Blok III.A.2.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
   a. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi dapat melakukan penambangan sampai dengan izin usaha tersebut berakhir;
   b. melakukan pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*) dan reklamasi pasca tambang meliputi:
      1. penatagunaan lahan;
      2. revegetasi;
      3. pencegahan dan penanggulangan bencana pasca tambang; dan
      4. pemanfaatan lubang bekas tambang (void).
   c. Pelaksanaan reklamasi pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

(1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, meliputi:
   a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
   b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
   c. ketentuan Penggunaan Lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.

(2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam PZ.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, serta yang memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

(6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(7) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pemerintah daerah dan kepada Masyarakat.

(9) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 51

(1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, berupa Zona Ambang dengan kode h berada pada SWP III.A pada Blok III.A.3.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi Zona Ambang dengan kode h sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. mengizinkan perubahan Penggunaan Lahan, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum; dan
   b. mengizinkan perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi Zona Ambang dengan kode h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 52

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

(1) Jangka waktu RDTR WP Kecamatan Samarinda Ulu yaitu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Samarinda Ulu terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Wali Kota ini dapat direkomendasikan oleh FPR.

(5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 54

(1) Dalam rangka peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) dilakukan Penilaian Perwujudan RTR.

(2) Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.

(3) Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. perwujudan rencana Pola Ruang.

(5) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR dilakukan kajian pengendalian implikasi kewilayahan.

(6) Kajian pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menghasilkan penentuan:
   a. zona yang dikendalikan; dan
   b. zona yang didorong.

(7) Hasil pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan menjadi masukan terhadap peninjauan kembali dan revisi RTR.

(8) Penilaian Perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Pemanfaatan Ruang di WP Kecamatan Samarinda Ulu yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, harus ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
c. izin Pemanfaatan Ruang yang akan diperpanjang masa berlakunya, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

507010 mT 510010 513010 516010 519010 mT

117°5'0" 117°6'40" 117°8'20" 117°10'0" BT

9953990 mU 9950990 mU 9947990 mU 9944990 mU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.2

III.A.1

Kelurahan
Air Hitam

III.A.4

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.A.3

III.B.3

III.C.1

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.2

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.B.2

III.B.1

Kelurahan
Air Putih

III.C.4

III.C.6

Kelurahan
Sidodadi

III.C.3

III.C.7

III.D.2

Kelurahan
Dadi Mulya

III.D.1

III.C.5

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

Kelurahan
Jawa

III.D.3

III.D.4

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN I**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

# PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN

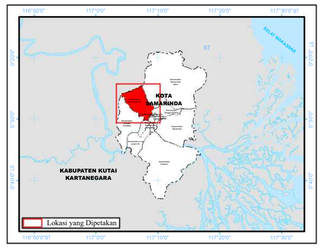
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**SUB WILAYAH PERENCANAAN**
- Sub WIlayah Perencanaan (SWP) A
- Sub WIlayah Perencanaan (SWP) B
- Sub WIlayah Perencanaan (SWP) C
- Sub WIlayah Perencanaan (SWP) D

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN II**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

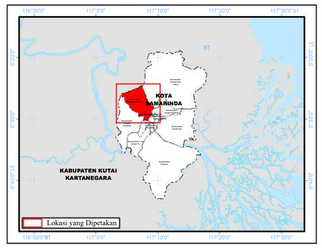
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

KECAMATAN SUNGAI PINANG

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Kelurahan Air Hitam
Kelurahan Bukit Pinang
Kelurahan Air Putih
Kelurahan Sidodadi
Kelurahan Gunung Kelua
Kelurahan Dadi Mulya
Kelurahan Teluk Lerong Ilir
Kelurahan Jawa

III.A.1
III.A.2
III.A.3
III.A.4
III.B.1
III.B.2
III.B.3
III.C.1
III.C.2
III.C.3
III.C.4
III.C.5
III.C.6
III.C.7
III.D.1
III.D.2
III.D.3
III.D.4

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

### RENCANA STRUKTUR RUANG

**Rencana Pelayanan**
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

**Rencana Transportasi Darat**
- Halte
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

**Rencana Energi**
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Kabel Bawah Tanah

**Rencana Telekomunikasi**
- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

**Rencana Sumber Daya Air**
- Bangunan Pengendalian Banjir

**Rencana Air Minum**
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Instalasi Produksi
- Hidran Kebakaran
- Jaringan Distribusi Pembagi
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum

**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Setempat
- Pipa Tinja

**Rencana Persampahan**
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)

**Rencana Drainase**
- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

**Rencana Prasarana Lainnya**
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN II.A**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

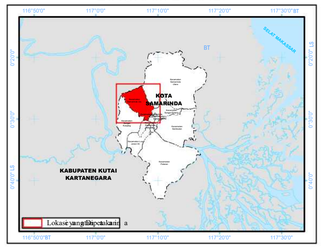
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana Pen e an an P sa Pela anan**
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.1

III.A.2

III.A.3

III.A.4

Kelurahan Air Hitam

Kelurahan Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.B.1

III.B.2

III.B.3

Kelurahan Air Putih

III.C.1

III.C.2

III.C.3

III.C.4

III.C.5

III.C.6

III.C.7

Kelurahan Gunung Kelua

Kelurahan Sidodadi

Kelurahan Dadi Mulya

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.D.1

III.D.2

III.D.3

III.D.4

Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Kelurahan Jawa

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

507010 mT 510010 513010 516010 519010 mT

117°5'0" BT 117°6'40" 117°8'20" 117°10'0" BT

9953990 mU 9950990 9947990 9944990 mU

0°25'40" 0°27'20" 0°29'0" 0°30'40"

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.1

III.A.2

III.A.3

III.A.4

Kelurahan Air Hitam

Kelurahan Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.B.1

III.B.2

III.B.3

Kelurahan Air Putih

III.C.1

Kelurahan Gunung Kelua

III.C.2

III.C.3

III.C.4

III.C.5

III.C.6

III.C.7

Kelurahan Sidodadi

Kelurahan Dadi Mulya

III.D.1

III.D.2

III.D.3

III.D.4

Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Kelurahan Jawa

KECAMATAN SUNGAI PINANG

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN II.B**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
## RENCANA ARINGAN TRANSPORTASI

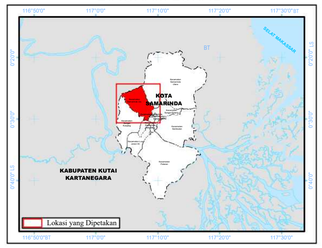
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana a in an T ans o asi**
Transportasi Darat
- Halte
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.2

III.A.1

Kelurahan
Air Hitam

III.A.4

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.A.3

III.B.3

III.C.1

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.2

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.B.2

III.B.1

III.C.4

III.C.6

Kelurahan
Air Putih

Kelurahan
Sidodadi

III.C.3

III.C.7

III.D.2

Kelurahan
Dadi Mulya

III.D.1

III.C.5

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

III.D.3

Kelurahan
Jawa

III.D.4

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN II.C**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

# PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA ARINGAN ENERGI

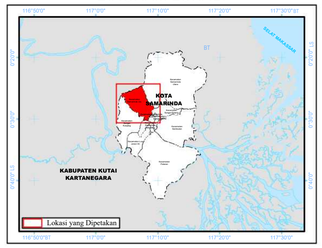
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana a in an Ene i**
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Kabel Bawah Tanah

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.1

III.A.2

III.A.3

III.A.4

Kelurahan
Air Hitam

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.B.1

III.B.2

III.B.3

Kelurahan
Air Putih

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.1

III.C.2

III.C.3

III.C.4

III.C.6

III.C.7

Kelurahan
Sidodadi

Kelurahan
Dadi Mulya

III.C.5

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.D.1

III.D.2

III.D.3

III.D.4

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

Kelurahan
Jawa

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

507010 mT 510010 513010 516010 519010 mT
117°5'0" BT 117°6'40" 117°8'20" 117°10'0" BT
9953990 mU 9950990 mU 9947990 mU 9944990 mU
0°2'40" S 0°3'0" S

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN II.D**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

# PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA ARINGAN TELEKOMUNIKASI

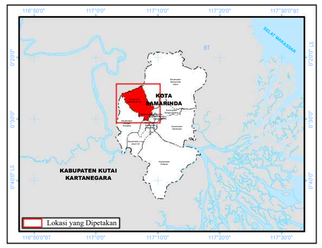
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana a in an Teleko nikasi**
- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

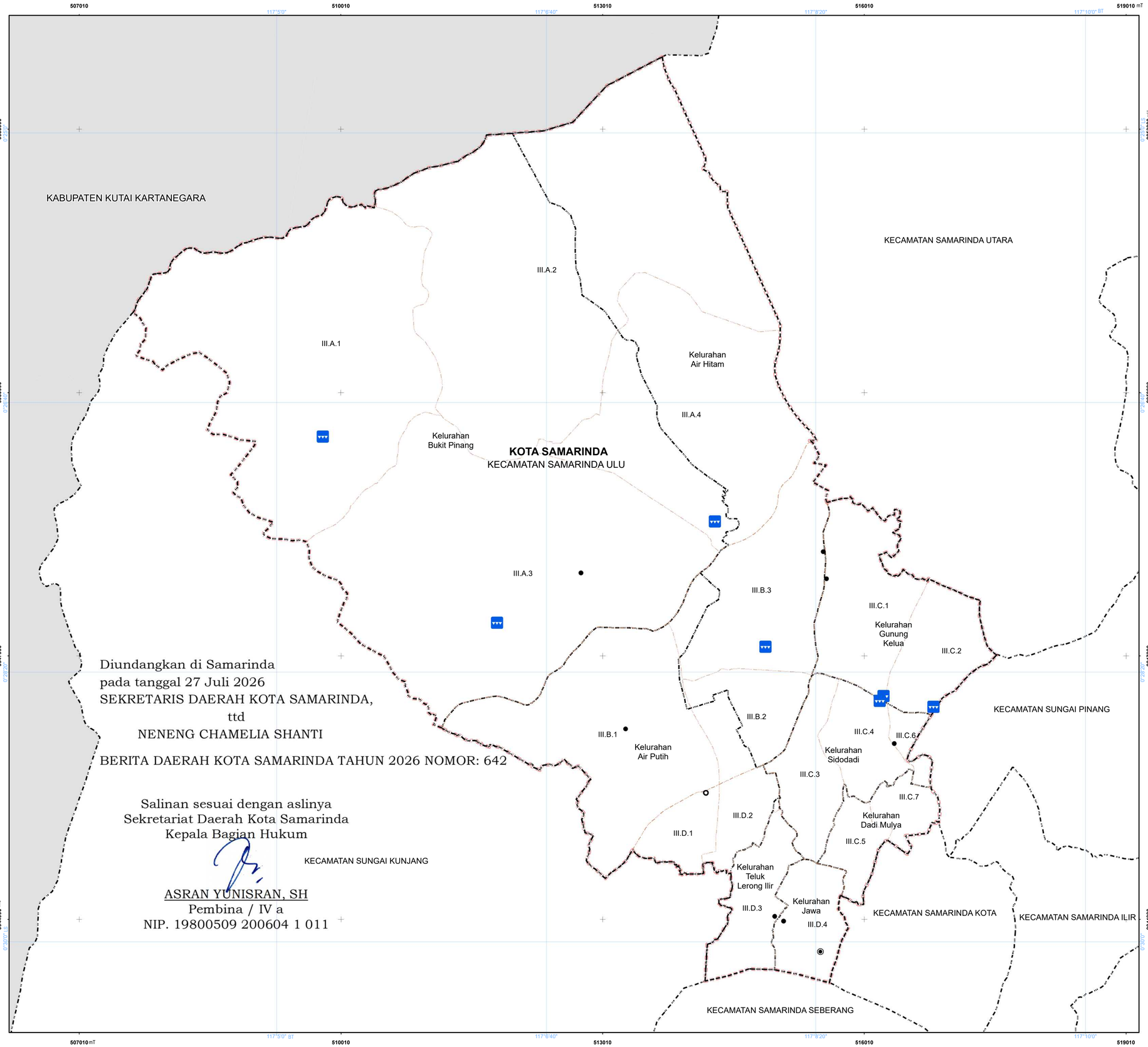
SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun




Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

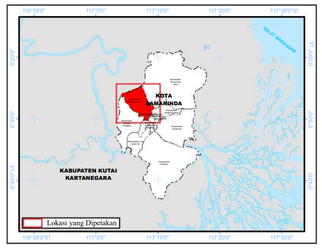
**LAMPIRAN II.E**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

# PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA ARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA : 1:22.000
0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana a in an S e Da a Ai**
- Bangunan Pengendalian Banjir

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

507010 mT 510010 513010 516010 519010 mT

117°5'0" BT 117°6'40" 117°8'20" 117°10'0" BT

9953990 mU 9950990 9947990 9944990 mU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.2

III.A.1

Kelurahan
Air Hitam

III.A.4

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.A.3

III.B.3

III.C.1

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.2

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.B.2

III.B.1

Kelurahan
Air Putih

III.C.4

III.C.6

Kelurahan
Sidodadi

III.C.3

III.C.7

III.D.2

Kelurahan
Dadi Mulya

III.D.1

III.C.5

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

Kelurahan
Jawa

III.D.3

III.D.4

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN II.**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

# PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA ARINGAN AIR MINUM

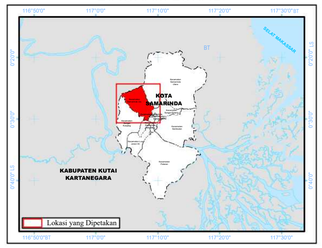
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana a in an Ai Min**
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Instalasi Produksi
- Hidran Kebakaran
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.1

III.A.2

III.A.3

III.A.4

Kelurahan
Air Hitam

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.B.1

III.B.2

III.B.3

Kelurahan
Air Putih

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.1

III.C.2

III.C.3

III.C.4

III.C.6

III.C.7

Kelurahan
Sidodadi

Kelurahan
Dadi Mulya

III.C.5

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.D.1

III.D.2

III.D.3

III.D.4

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

Kelurahan
Jawa

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

507010 mT — 510010 — 513010 — 516010 — 519010 mT

117°5'0" BT — 117°6'40" — 117°8'20" — 117°10'0" BT

9953990 mU — 9950990 — 9947990 — 9944990 mU

0°29'20" LS — 0°30'0" LS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN II.G**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**
**RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN**
**LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3**

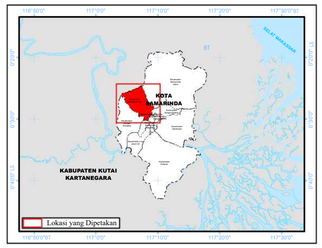
U

SKALA : 1:22.000

0 — 1 — 2 — 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana Pen elolaan Ai Li a dan**
**Pen elolaan Li a Ba an Be a a a dan Be a n B3**

- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Setempat
- Pipa Tinja

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

507010 510010 513010 516010 519010 mT

117°5'0" BT 117°6'40" 117°8'20" 117°10'0" BT

9953990 mU 9950990 9947990 9944990 mU

0°32'40" 0°31'20" 0°30'0"

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.2

III.A.1

Kelurahan
Air Hitam

III.A.4

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.A.3

III.B.3

III.C.1

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.2

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.B.2

III.B.1

Kelurahan
Air Putih

III.C.4

III.C.6

Kelurahan
Sidodadi

III.C.3

III.C.7

III.D.2

Kelurahan
Dadi Mulya

III.D.1

III.C.5

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

Kelurahan
Jawa

III.D.3

III.D.4

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN II.H**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
## RENCANA ARINGAN PERSAMPAHAN

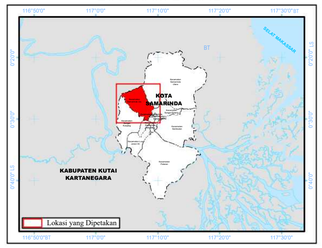
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana a in an Pe sa a an**

- TPA — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- TPS — Tempat Penampungan Sementara (TPS)

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.1

III.A.2

III.A.3

III.A.4

Kelurahan
Air Hitam

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.B.1

III.B.2

III.B.3

Kelurahan
Air Putih

III.C.1

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.2

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.C.3

III.C.4

III.C.6

Kelurahan
Sidodadi

III.C.5

III.C.7

Kelurahan
Dadi Mulya

III.D.1

III.D.2

III.D.3

III.D.4

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

Kelurahan
Jawa

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN II.I**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
## RENCANA ARINGAN DRAINASE

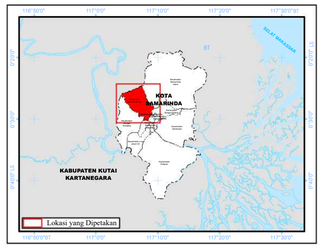
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana a in an D ainase**
- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.1

III.A.2

III.A.3

III.A.4

Kelurahan
Air Hitam

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.B.1

III.B.2

III.B.3

Kelurahan
Air Putih

III.C.1

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.2

III.C.3

III.C.4

III.C.6

Kelurahan
Sidodadi

III.C.7

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.D.1

III.D.2

III.D.3

III.D.4

Kelurahan
Dadi Mulya

III.C.5

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

Kelurahan
Jawa

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN II.**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

# PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA ARINGAN PRASARANA LAINNYA

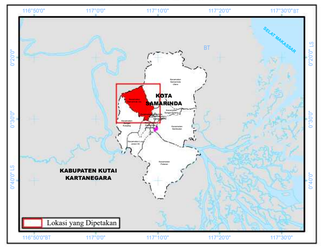
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Ren ana a in an P asa ana Lainn a**
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN III**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA RENCANA POLA RUANG

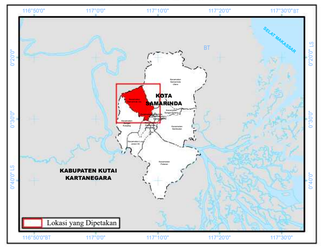
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**ONA LINDUNG**

**ona Badan Ai**
- BA Badan Air

**ona R an To ka Hija**
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-5 Taman Kelurahan
- RTH-8 Taman RT
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-1 Jalur Hijau

**ONA BUDI DAYA**

**ona Badan alan**
- JB Badan Jalan

**ona Pe a an**
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

**ona Pe da an an dan asa**
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

**ona Sa ana Pela anan U**
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 SPU Skala RW

**ona Pe kan o an**
- KT Perkantoran

**ona Pe anian**
- P-2 Hortikultura

**ona Pa i isa a**
- W Pariwisata

**ona Pe a anan dan Kea anan**
- HK Pertahanan dan Keamanan

**ona Pe n kan Lainn a**
- PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

**ona Pen elolaan Pe sa a an**
- PP Pengelolaan Persampahan

**ona T ans o asi**
- TR Transportasi

**Penjelasan Kode Lokasi**

III. A.1 — WP, SWP, Blok

**Penjelasan Teknik Pen a an onasi**

BA. h — Kode Sub Zona; h: TPZ Zona Ambang; Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022
6. Keputusan MenLHK Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan ungsi Kawasan Hutan, Dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU

## TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **I** | **PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG** | | | | | | | | | | |
| **A** | **Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.3 | Penyusunan Rencana dan teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Penataan, Optimalisasi, dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Eksisting | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.1.3 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengembangan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pembangunan dan pengembangan Infrastuktur Permukiman di kawasan Perkotaan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Pemberitahuan rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian ATR/BPN | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.D pada Blok III.D.4 | Perundang-Undangan | | | Dinas Teknis Lainnya | | | | | |
| **4.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b** | **Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Lingkungan** | | | | | | | | | | |
| **b.1** | **Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.3 | Penyusunan Rencana dan teknis Penataan | • SWP III.A pada Blok III.A.1; | APBD Kota dan/atau | - | - | Bapperida, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Bangunan dan Lingkungan | • SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | dan/atau Dinas Teknis Lainnya | dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Penataan, Optimalisasi, dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Eksisting | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.3 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3; | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengembangan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pembangunan dan pengembangan Infrastuktur Permukiman di kawasan Perkotaan | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Pemberitahuan rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 4.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3. | AAPBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **B** | **Rencana Jaringan Transportasi** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Jalan Arteri Primer** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelengaraan Jalan Arteri Primer** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanan Teknis Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer | ruas flyover Jl. Abdul Wahab Syahranie – Jl. Juanda | APBN dan/atau APBD Kota | Kementerian Pekerjaan Umum | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan ruas flyover Jl. Abdul Wahab Syahranie – Jl. Juanda yang merupakan bagian dari JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) | JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C | APBN dan/atau APBD Kota | Kementerian Pekerjaan Umum | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.3 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C; dan | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JLN. JUANDA (SAMARINDA) m elintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) m elintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| 1.1.5 | Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D; | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Survei Kondisi Jalan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| 1.1.7 | Rehabilitasi Jalan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | Rekonstruksi Jalan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.9 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Arteri Primer** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian Perhubungan | - | - | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Arteri Primer | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian Perhubungan | - | - | - | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengelolaan RTH (Pemenuhan RTH melalui pengembangan dan penyedian RTH berupa jalur hijau di | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Jalan Arteri Primer) dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan | melintas di SWP II.B dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D | | | | | | | | | |
| **b** | **Perwujudan Jalan Arteri Sekunder** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelengaraan Jalan Arteri Sekunder** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.2 | Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.3 | Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.4 | Survei Kondisi Jalan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.5 | Rehabilitasi Jalan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.6 | Rekonstruksi Jalan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.7 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Arteri Sekunder** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA dan/atau Dinas Perhubungan | Dinas PUPR dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |
| 2.1.2 | Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA dan/atau Dinas Perhubungan | Dinas PUPR dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 3.1.1 | Pengelolaan RTH (Pemenuhan RTH melalui pengembangan dan penyedian RTH berupa jalur hijau di Jalan Arteri Sekunder) dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C; dan<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| **c** | **Perwujudan Jalan Kolektor Primer** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelengaraan Jalan Kolektor Primer** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C; | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.2 | Peningkatan fungsi dan status ruas jalan eksisting Jalan HM Ardans (Ring Road III Samarinda) dan Jalan Nusyirwan Ismail (Ring Road II Samarinda) sebagai ruas jalan nasional Sempaja–Sungai Siring (Lingkar Samarinda) | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.3 | Peningkatan fungsi dan status dari Jalan Kolektor Primer 3 (tiga) menjadi 2 (dua) | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C; | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.4 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Kolektor Primer | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.5 | Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Primer | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.6 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D; | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Survei Kondisi Jalan Kolektor Primer | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.8 | Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.10 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolektor Primer | ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer | • ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian Perhubungan | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA dan/atau Dinas Perhubungan | Dinas PUPR dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Kolektor Primer | • ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian Perhubungan | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA dan/atau Dinas Perhubungan | Dinas PUPR dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengelolaan RTH (Pemenuhan RTH melalui pengembangan dan penyedian RTH berupa jalur hijau di Jalan Kolektor Primer) dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan | • ruas Sempaja – Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A dan SWP III.B | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| | | • JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| **d** | **Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelengaraan Jalan Kolektor Sekunder** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C; | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.3 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.4 | Survei Kondisi Jalan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Rehabilitasi Jalan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.6 | Rekonstruksi Jalan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C; | A APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | - | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Sekunder** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA, dan/atau Dinas Perhubungan | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |
| 2.1.3 | Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C; | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA, dan/atau Dinas Perhubungan | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | | | | | | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengelolaan RTH (Pemenuhan RTH melalui pengembangan dan penyedian RTH berupa jalur hijau di Jalan Kolektor Sekunder) dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan | • JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Kesuma Bangsa melintas di SWP III.C;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Perniagaan melintas di SWP III.C;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Provinsi dan/atau APBD Kota | - | Dinas PUPR-PERA, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Perhubungan | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |
| **e** | **Perwujudan Jalan Lokal Sekunder** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelenggaran Jalan Lokal Sekunder** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.1 | Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kolektor Sekunder | melintas SWP III.A | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan Jalan Lokal Sekunder | melintas SWP III.A | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.3 | Pelebaran Menuju Standar Jalan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.4 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.5 | Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.6 | Survei Kondisi Jalan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.7 | Rehabilitasi Jalan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.8 | Rekonstruksi Jalan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.9 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lokal Sekunder** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.1.2 | Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Lokal Sekunder | melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |
| **f** | **Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelenggaran Jalan Lingkungan Sekunder** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pelebaran Menuju Standar Jalan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.2 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.3 | Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.4 | Survei Kondisi Jalan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.5 | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.6 | Rekonstruksi Jalan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 1.1.7 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lingkungan Sekunder** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.1.1 | Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Lingkungan Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR dan/atau Dinas Perhubungan | - | | | | |
| **g** | **Perwujudan Jalan Tol** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelenggaran Jalan Tol** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanan Teknis Penyelenggaraan Jalan | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.3 | Pelebaran Menuju Standar Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Pemeliharaan Rutin Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.5 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.6 | Survei Kondisi Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.7 | Rehabilitasi Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.8 | Rekonstruksi Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.9 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Tol** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian Perhubungan | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian Perhubungan | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengelolaan RTH (Pemenuhan RTH melalui pengembangan dan penyedian RTH berupa jalur hijau di Jalan Tol) dengan mempertimbangkan | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | keamanan dan keselamatan pengguna jalan | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **4.** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Pemberitahuan rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol | Jalan Tol Samarinda-Tenggarong melintas SWP III.A, dan SWP III.B | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. Jasa Marga, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **h** | **Perwujudan Jembatan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Penyelenggaraan Jembatan** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pelebaran Standar Jembatan | • SWP III.B pada Blok III.B.2; | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3. | | | | | | | | | |
| | | • SWP III.B pada Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3. | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| 1.1.2 | Rehabilitasi Jembatan | • SWP III.B pada Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| | | • SWP III.B pada Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3. | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| 1.1.3 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | • SWP III.B pada Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| | | • SWP III.B pada Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3. | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| 1.1.4 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | • SWP III.B pada Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3. | | | | | | | | | |
| | | • SWP III.B pada Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3. | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| 1.1.5 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelengaraan Jembatan | • SWP III.B pada Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| | | • SWP III.B pada Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3. | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jembatan** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jembatan | • SWP III.B pada Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3. | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| | | • SWP III.B pada Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3. | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| 2.1.2 | Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan | • SWP III.B pada Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok | APBD Kota | - | - | Dinas PUPR | - | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Perlengkapan Jembatan | III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3. | | | | | | | | | |
| | | • SWP III.B pada Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3. | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | - | | | | |
| **i** | **Perwujudan Halte** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pelaksanaan Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | WP Kecamatan Samarinda Ulu | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perhubungan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **1.2** | **Program Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Penyediaan halte untuk mengintegrasikan moda | • SWP III.B pada Blok III.B.1; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Pembiayaan Lain yang Sah | - | - | Dinas Perhubungan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.2.2 | Penyediaan Sistem ManajemenTransportasi Cerdas | • SWP III.B pada Blok III.B.1; dan SWP III.D pada Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | - | - | Dinas Perhubungan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Halte | • SWP III.B pada Blok III.B.1; dan SWP III.D pada Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perhubungan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Halte | WP Kecamatan Samarinda Ulu | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas Perhubungan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Pemberitahuan rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Halte | WP Kecamatan Samarinda Ulu | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas Perhubungan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.1.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Halte | WP Kecamatan Samarinda Ulu | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas Perhubungan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **j** | **Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Perkeretaapian** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pekeretaapian | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A dan SWP III.B. | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perhubungan | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A dan SWP III.B. | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perhubungan | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2.1** | Penyelenggaraan Jaringan Jalur Kereta Api | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota dan Sarana serta Prasarana Penunjangnya | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian Perhubungan | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | III.A dan SWP III.B. | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Peningkatan Kapasitas Jalur Kereta Api Antarkota dan Sarana serta Prasarana Penunjangnya | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A dan SWP III.B. | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perhubungan | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.3.1 | Pemeliharaan Jalur Kereta Api Antarkota dan Sarana serta Prasarana Penunjangnya | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A dan SWP III.B. | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perhubungan | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengelolaan RTH (Pemenuhan RTH melalui pengembangan dan penyedian RTH berupa jalur hijau di Jalur Kereta Api Antarkota yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A dan SWP III.B. | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perhubungan | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan | Kementerian Perhubungan dan/atau | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Jalur Kereta Api antarkota | Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A dan SWP III.B. | Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | | | Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Pemberitahuan rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalur Kereta Api antarkota | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A dan SWP III.B. | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Kereta Api antarkota | Jalur Kerata Api Antarkota Trans Kalimantan (Kaltim) Balikpapan-Samarinda melintas di SWP III.A dan SWP III.B. | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. KAI, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **C** | **RENCANA JARINGAN ENERGI** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Ketanagalistrikan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyediaan Pengelolaan Tenaga Listrik** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Saluran Udara Tengangan Tinggi | • SUTT Tengkawang-Embalut melintas di SWP III.A, dan SWP III.B; dan<br>• SUTT Samarinda (Ex. | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian ESDM dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | GIS)-New Samarinda melintas di SWP III.A. | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **2** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pengelolaan RTH (Pemenuhan RTH melalui pengembangan dan penyedian RTH berupa jalur hijau di Jaringan Transmisi) | • SUTT Tengkawang-Embalut melintas di SWP III.A, dan SWP III.B; dan<br>• SUTT Samarinda (Ex. GIS)-New Samarinda melintas di SWP III.A. | APBN, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perhubungan | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b** | **Perwujudan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Ketanagalistrikan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyediaan Pengelolaan Tenaga Listrik** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Kabel Bawah Tanah Penyalur Tenaga Listrik | melintas di SWP III.D | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ESDM dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan Sistem Ducting Kabel Bawah Tanah | melintas di SWP III.D | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ESDM dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **2** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Sistem Ducting Kabel Bawah Tanah | melintas di SWP III.D | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Pemberitahuan rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Sistem Ducting Kabel Bawah Tanah | melintas di SWP III.D | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sistem Ducting Kabel Bawah Tanah | melintas di SWP III.D | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **c** | **Perwujudan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Ketanagalistrikan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyediaan Pengelolaan Tenaga Listrik** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.1 | Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan SUTM | Seluruh SWP | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ESDM dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **d** | **Perwujudan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Ketanagalistrikan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyediaan Pengelolaan Tenaga Listrik** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan SUTR | Seluruh SWP | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ESDM dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **e** | **Perwujudan Gardu-Distribusi** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Ketanagalistrikan** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Penyediaan Pengelolaan Tenaga Listrik** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ESDM dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. PLN, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| **D.** | **RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Jaringan Tetap** | | | | | | | | | | |
| **a.1** | **Perwujudan Jaringan Serat Optik** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Serat Optik | • jalur SKSO P18 Samarinda - Balikpapan melintas di SWP III.D;<br>• jalur SKSO P18 Tenggarong - Samarinda melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D; dan<br>• jalur SKSO P20 Bontang - Samarinda melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• jaringan serat optik lainya melintas di seluruh SWP | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Komunikasi dan Digital dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. Telkom, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jaringan Serat Optik | • jalur SKSO P18 Samarinda - Balikpapan melintas di SWP III.D; | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | Kementerian Komunikasi dan Digital dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. Telkom, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • jalur SKSO P18 Tenggarong - Samarinda melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D; dan<br>• jalur SKSO P20 Bontang - Samarinda melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• jaringan serat optik lainya melintas di seluruh SWP | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | kepentingan lainnya | | | | |
| a.2 | Perwujudan sentral telepon otomat (STO) | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO) | SWP III.D pada Blok III.D.1 | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Komunikasi dan Digital, dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. Telkom, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Sentral Telepon Otomat (STO) | SWP III.D pada Blok III.D.1 | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. Telkom, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Pemberitahuan rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Sentral Telepon Otomat (STO) | SWP III.D pada Blok III.D.1 | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. Telkom, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sentral Telepon Otomat (STO) | SWP III.D pada Blok III.D.1 | APBN, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian BUMN dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | - | PT. Telkom, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b** | **Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler** | | | | | | | | | | |
| **b.1** | **Perwujudan Menara Base Transceiver Station** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Pengembangan, Pengoprasian, dan Pemeliharaan menara *base transceiver station* (BTS) | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Komunikasi dan Digital dan/atau Kementerian BUMN | - | - | PT. Telkom, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| **E** | **RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir** | | | | | | | | | | |
| **a.1** | **Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pengelolaan SDA dan Bangunan** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pembangunan Kolam Retensi sebagai Bangunan Pengendali Banjir | SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3 | APBN, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | - | Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengendali Banjir | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4. | APBN, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | - | Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Bangunan Pengendali Banjir | SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3 | APBN, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Pemberitahuan rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir | SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3 | APBN, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir | SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.3 | APBN, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **F.** | **RENCANA JARINGAN AIR MINUM** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Jaringan Perpipaan** | | | | | | | | | | |
| **a.1** | **Perwujudan Unit Air Baku** | | | | | | | | | | |
| **a.1.1** | **Perwujudan Bangunan Pengambil Air Baku** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.1 | Peningkatan SPAM untuk Bangunan Pengambil Air Baku | SWP III.D pada Blok III.D.3 dan Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi, Optimalisasi, dan Pemeliharaan SPAM untuk Bangunan Pengambil Air Baku | SWP III.D pada Blok III.D.3 dan Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **a.1.2** | **Perwujudan Jaringan Transmisi Air Baku** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Peningkatan SPAM untuk untuk Jaringan Transmisi Air Baku | melintas SWP III.D | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan SPAM untuk Jaringan Transmisi Air Baku | melintas SWP III.D | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **a.2** | **Perujudan Unit produksi** | | | | | | | | | | |
| **a.2.1** | **Perwujudan Instalasi Produksi** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Peningkatan SPAM untuk Instalasi Produksi | SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan SPAM untuk Instalasi Produksi | SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **a.2.2** | **Perwujudan Jaringan Transmisi Air Minum** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | melintas di SWP III.A | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan SPAM untuk Jaringan Transmisi Air Minum | melintas di SWP III.A | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.3 | Peningkatan SPAM untuk Jaringan Transmisi Air Minum | melintas di seluruh SWP | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan SPAM untuk Jaringan Transmisi Air Minum | melintas di seluruh SWP | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **a.3** | **Perwujudan Unit Distribusi** | | | | | | | | | | |
| **a.3.1** | **Perwujudan Jaringan Distribusi Pembagi** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Peningkatan SPAM untuk Jaringan Distribusi Pembagi | melintas di seluruh SWP | APBD Kota dan/atau Sumber | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan SPAM untuk Jaringan Distribusi Pembagi | melintas di seluruh SWP | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **a.3** | **Perwujudan Unit Pelayanan** | | | | | | | | | | |
| **a.3.1** | **Perwujudan Hidran Kebakaran** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | • SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR dan/atau Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan SPAM untuk Hidran Kebakaran | • SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | - | - | Dinas PUPR dan/atau Dinas Pemadam Kebakaran | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | dan Blok III.C.6; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4. | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | Dan Penyelamatan | | | | | |
| 1.1.3 | Peningkatan SPAM untuk Hidran Kebakaran | • SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR dan/atau Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan SPAM untuk Hidran Kebakaran | • SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR dan/atau Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **G.** | **RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat** | | | | | | | | | | |
| **a.1** | **Perwujudan Sub-Sistem Pengolahan Setempat** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD)** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Peningkatan SPALD Setempat untuk Sub Sistem Pengolahan Setempat | SWP III.B Blok III.B.3 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | Lingkungan Hidup | kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan SPALD Setempat untuk Sub Sistem Pengolahan Setempat | SWP III.B Blok III.B.3 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b** | **Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat** | | | | | | | | | | |
| **b.1** | **Perwujudan Subsistem Pelayananan** | | | | | | | | | | |
| **b.1.1** | **Perwujudan Pipa Tinja** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD)** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Terpusat | melintas di SWP III. B dan SWP III.D | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan SPALD Terpusat untuk pipa tinja | melintas di SWP III. B dan SWP III. D | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.3 | Peningkatan SPALD Terpusat untuk Sub pipa tinja | melintas di SWP III. B dan SWP III.D | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan SPALD Terpusat untuk pipa tinja | melintas di SWP III. B dan SWP III.D | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b.2** | **Perwujudan Subsistem Pengolahan Terpusat** | | | | | | | | | | |
| **b.2.1** | **Perwujudan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD)** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Peningkatan SPALD Terpusat untuk Sub IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman | SWP III.B pada Blok III.B.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan SPALD Terpusat untuk IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman | SWP III.B pada Blok III.B.3. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | | | | | | | | | |
| **c** | **Perwujudan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limba B3)** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyimpanan Sementara/Pengumpulan Limbah B3** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Peningkatan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | SWP III.C pada Blok III.C.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi, Optimalisasi dan Pemeliharaan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Sarana dan Prasarana Penunjanya | SWP III.C pada Blok III.C.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **H.** | **RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan Sampah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Kajian, Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah | • SWP III.A pada Blok III.A.3<br>• SWP III B pada Blok III.B.1 dan III.B.3 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.2 | Pembangunan TPS | • SWP III.A pada Blok III.A.3<br>• SWP III B pada Blok III.B.1 dan III.B.3 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.3 | Pengoprasian dan Pemeliharaan TPS | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5,; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **a** | **Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan Sampah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Kajian, Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah | SWP III.A pada Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan TPA dan Sarana Penunjangnya | SWP III.A pada Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.3 | Pengoprasian dan Pemeliharaan TPA dan Sarana Penunjanya | SWP III.A pada Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah dari TPS/TPS3R | SWP III.A pada Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.5 | Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah yang dapat dimanfaatkan untuk energi terbarukan atau menjadi produk yang bernilai ekonomi | SWP III.A pada Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **H.** | **RENCANA JARINGAN DRAINASE** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **a** | **Perwujudan Jaringan Drainase Primer** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Primer | melintas di SWP III. B dan SWP III. D | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Primer | melintas di SWP III. B dan SWP III. D | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b** | **Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Sekunder | melintas di SWP III.A | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.2 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan berupa jaringan Drainase Sekunder | melintas di SWP III.A | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.3 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Sekunder | melintas di seluruh SWP | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **c** | **Perwujudan Jaringan Drainase Tersier** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Tersier | melintas di SWP III.A | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan berupa jaringan Drainase Tersier | melintas di SWP III.A | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.3 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Tersier | melintas di seluruh SWP | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Tersier | melintas di seluruh SWP | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **c** | **Perwujudan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan untuk Kolam Retensi | SWP III.A pada Blok III.A.1 | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan** | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Pembangunan bangunan resapan (kolam retensi) | SWP III.A pada Blok III.A.1 | APBN dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | - | - | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.3 | Peningkatan fungsi bangunan resapan (kolam retensi) | • SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4. | APBN, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.4 | Operasi dan Pemeliharaan bangunan resapan (kolam retensi) | • SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3; dan | APBN, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | Kementerian Pekerjaan Umum | - | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4. | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **I.** | **RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang memanfaatkan Jaringan jalan dan Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• ruas Sempaja - Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.C; | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiataan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.B;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;[I41.1]<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D; [I42.1]<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• Jalan lingkungan sekunder melintas di SWP B dan SWP C. | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Pemberian Rambu-rambu Petunjuk Jalur Evakuasi Bencana | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, dan SWP III.D; | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiataan Lain yang Sah Sesuai | - | - | BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• ruas Sempaja - Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. S. Parman (Samarinda) melintas di SWP III.B;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;[I41.1]<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, SWP | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. M.Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D; [I42.1]<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• Jalan lingkungan sekunder melintas di SWP B dan SWP C. | | | | | | | | | |
| **b** | **Perwujudan Tempat Evakuasi** | | | | | | | | | | |
| **b.1** | **Perwujudan Tempat Evakuasi Sementara** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pemanfaatan dan Penguatan Kapasitas Bangunan/Kawasan sebagai Tempat Evakuasi Sementara untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | • kantor Kelurahan Bukit Pinang berada pada SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• BPM-Pemdes Provinsi Kaltim berada pada SWP III.B pada Blok III.B.1;<br>• SMK Negeri 17 Samarinda berada pada | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | SWP III.B pada Blok III.B.2<br>• Fastabiqul Khairat Islamic School berada pada SWP III.C pada Blok III.C.1; dan<br>• Mesjid Ad-Da'wah berada pada SWP III.D pada Blok III.D.3. | | | | | | | | | |
| **b.2** | **Perwujudan Tempat Evakuasi Akhir** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pemanfaatan dan Penguatan Kapasitas Bangunan/Kawasan sebagai Tempat Evakuasi Akhir untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | • Lapangan Universitas Mulawarman berada pada SWP III.C pada Blok III.C.2; dan<br>• Kantor Gubernur Kalimantan Timur berada pada SWP III.D pada Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **c** | **Perwujudan Jalur Sepeda** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Penyelenggaraan, Pembangunan dan Pengembangan Jalur Sepeda** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Penyelenggaraan, Pembangunan dan Pengembangan Jalur Sepeda** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pengembangan Jalur Sepeda melalui Pemanfaatan Jaringan Jalan | • JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D; dan | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | - | - | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D.<br>• JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B, dan SWP III.C ;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.B;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. M. Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Siradj Salman melintas di | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• Jalan lokal sekunder melintas di SWP III.D | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Pengembangan dan Pemeliharaan Jalur Sepeda serta Fasilitas Pendukungnya | • JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D.<br>• JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B, dan SWP III.C ;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.B; | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. M. Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• Jalan lokal sekunder melintas di SWP III.D | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Pengembangan dan Pengintegrasian Jalur Speda dengan Transportasi Umum dan Fasilitas Publik | • JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D; dan<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D.<br>• JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JL. S Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | melintas di SWP III.B, dan SWP III.C ;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.B;<br>• JL. Gn Cermai melintas di SWP III.D;<br>• JL. M. Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D;<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; dan<br>• Jalan lokal sekunder melintas di SWP III.D | | | | | | | | | |
| **d** | **Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Penyelenggaraan, Pembangunan dan Pengembangan Pejalan Kaki** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Penyelenggaraan, Pembangunan dan Pengembangan Jalur Pejalan Kaki** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki melalui Pemanfaatan Ruang Milik Jalan | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C; | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C;<br>• ruas Sempaja - Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. S Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D;<br>• JL. M. Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | III.C, dan SWP III.D;<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C;<br>• ruas Sempaja - Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. S Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D;<br>• JL. M. Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Penyediaan Jalur Penyeberangan Pejalan Kaki yang terintegrasi dengan Jaringan Pejalan Kaki | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D; | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C;<br>• ruas Sempaja - Sungai Siring (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. S Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D; | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • JL. M. Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di SWP III.C, dan SWP III.D. | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Pengembangan dan Pengintegrasian Jalur Pejalan Kaki dengan Transportasi Umum dan Fasilitas Publik | • JLN. ANTASARI (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JLN. AW SYAHRANI (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, dan SWP III.C;<br>• JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D<br>• JLN. JUANDA (SAMARINDA) melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;<br>• JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) melintas di SWP III.D;<br>• JL. Dr.Soetomo melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pahlawan melintas di SWP III.C;<br>• ruas Sempaja - Sungai Siring | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | (Lingkar Samarinda) melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. R. Soeprapto (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. S Parman (Samarinda) melintas di SWP III.C;<br>• JL. Kadrie Oening melintas di SWP III.B;<br>• JL. M.T. Haryono melintas di SWP III.B, dan SWP III.D;<br>• JL. Bhayangkara melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pangeran Suryanata melintas di SWP III.A, dan SWP III.B;<br>• JL. KS Tubun melintas di SWP III.C, dan SWP III.D;<br>• JL. M. Yamin melintas di SWP III.C;<br>• JL. Pasundan melintas di SWP III.D; dan<br>• JL. Siradj Salman melintas di | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | SWP III.C, dan SWP III.D. | | | | | | | | | |
| **II** | **PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG** | | | | | | | | | | |
| **A** | **Perwujudan Zona Lindung** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Sub-Zona Badan Air** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Operasi/Pemeliharaan/Normalisasi/Restorasi/Revitalisasi Badan Air | • SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Badan Air | • SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Air (Pengawasan dan Pengandalian Badan Air) | • SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C Blok III.C.1, Blo<br>• k III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Normalisasi dan Penataan Badan Air pada Area yang Telah Memiliki Hak Atas Tanah untuk Pemulihan Fungsi Hidrologis | • SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C Blok III.C.1, dan Blok III.C.2; dan<br>• SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Badan Air** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Penyesuaian Lokasi Rencana Zona Badan Air berupa Kolam Retensi | SWP III.A Blok III.A.3 | APBN, APBD Kota dan/atau dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang | Kementerian Pekerjaan Umum | - | Dinas PUPR, dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | menjadi Perumahan Kepadatan Sedang sesuai ketentuan dasar yang berlaku dengan mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | | Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **3** | **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pelaksanaan Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Badan Air | • SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pengelolaan RTH melalui Pemanfaatan Badan Air Yang Dapat Berfungsi Ekologis, Resapan Air, Ekonomi, Sosial Budaya, dan/atau Estetika | • SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| **b.** | **Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Rencana pemenuhan dan penyediaan kawasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% pada lahan tidur dan lahan yang tidak terdapat kepemilikan lahan | WP Kecamatan Samarinda Ulu | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b.1** | **Perwujudan Sub-Zona Taman Kota** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Taman Kota** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan RTH Taman Kota serta Sarana Penunjangnya | SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A,3 dan Blok III.A.4 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.2.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan RTH Taman Kota serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A,3 dan Blok III.A.4<br>• SWP III.D pada Blok III.D,3 dan Blok III.D.4 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Taman Kota serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A,3 dan Blok III.A.4<br>• SWP III.D pada Blok III.D,3 dan Blok III.D.4 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan taman Taman Kota sebagai RTH yang dapat difungsikan sebagai ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika | • SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A,3 dan Blok III.A.4<br>• SWP III.D pada Blok III.D,3 dan Blok III.D.4 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Taman Kota melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A,3 dan Blok III.A.4<br>• SWP III.D pada Blok III.D,3 dan Blok III.D.4 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **4** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A,3. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Taman Kota | SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A,3. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kota | SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 5.1.2 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kota | SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **5.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kota | SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b.2** | **Perwujudan Sub-Zona Taman Kecamatan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Taman Kecamatan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan RTH Taman Kecamatan serta Sarana Penunjangnya | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan RTH Taman Kecamatan serta Sarana Penunjangnya | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Taman Kecamatan | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | serta Sarana Penunjangnya | | Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | dan/atau Dinas Terkait Lainnya | kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan taman Kecamatan sebagai RTH yang dapat difungsikan sebagai ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Taman Kecamatan melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Taman Kecamatan | SWP III.A pada Blok III.A.2 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kecamatan | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 5.1.2 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kecamatan | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kecamatan | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **b.3** | **Perwujudan Sub-Zona Taman Kelurahan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Taman Kelurahan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan RTH Taman Kelurahan serta Sarana Penunjangnya | SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.7 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan RTH Taman Kelurahan serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.B pada Blok III.B.3<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Taman Kelurahan serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.B pada Blok III.B.3<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.7 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 3.3.1 | Pengembangan taman Kelurahan sebagai RTH yang dapat difungsikan sebagai ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika | • SWP III.B pada Blok III.B.3<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.7 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.3.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Taman Kelurahan melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.B pada Blok III.B.3<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.7 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kelurahan | SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.7 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kelurahan | SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.7 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 4.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk RTH Taman Kelurahan | SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.7 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | a |
| **b.4** | **Perwujudan Sub-Zona Taman RT** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Taman RT** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan RTH Taman RT serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.3<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan RTH Taman RT serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Taman RT serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota** | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Pengembangan taman RT sebagai RTH yang dapat difungsikan sebagai ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.4.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Taman RT melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1. | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | Dinas Terkait Lainnya | | | | | |
| **4** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | SWP III.A pada Blok III.A.3. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Taman RT | SWP III.A pada Blok III.A.3. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Taman RT | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3; | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 5.1.2 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk RTH Taman RT | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3; | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk RTH Taman RT | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.3; | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b.5** | **Perwujudan Sub-Zona Pemakaman** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Pemakaman** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Pemakaman serta Sarana Penunjangnya | SWP III.D pada Blok III.D.3 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan RTH Pemakaman serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4: dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemakaman serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4: dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Kecamatan** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **3.1** | **Peningkatan Pengembangan Kewilayah untuk Kawasan Pemakaman** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4: dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | SWP III.A pada Blok III.A.1 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Taman RT | SWP III.A pada Blok III.A.1 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 5.1.1 | Pengembangan pemakaman sebagai RTH yang dapat difungsikan sebagai ekologis, resapan air, sosial budaya, dan estetika | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4: dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 5.1.1 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pemakaman sebagai RTH melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.1;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4: dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 6.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pemakaman | • SWP III.D pada Blok III.D.3 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pemakaman | • SWP III.D pada Blok III.D.3 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk Pemakaman | • SWP III.D pada Blok III.D.3 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **b.6** | **Perwujudan Sub-Zona Jalur Hijau** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Jalur Hijau** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Jalur Hijau serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **2** | **Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pengembangan Jalur Hijau Sebagai RTH yang Dapat Difungsikan Sebagai Ekologis, Resapan Air, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Estetika | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Jalur Hijau Jalan melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar yang harus Memenuhi Aspek Keamanan dan Keselamatan Bagi Pengguna Jalan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.3 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Jalur Hijau pada Sempadan Sungai melalui Penanaman Vegetasi serta Penyediaan Fasilitas Rekreasi Terbatas dengan tetap Mempertahankan Fungsi Perlindungan Sempadan Sungai | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok Blok III.C.6, dan Blok III.C.7. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **3** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Jalur Hijau pada Sempadan Sungai melalui Pengendalian Intensitas pemanfaatan ruang:<br>• KDH maksimum 20%<br>• KDH minimum 75%<br>• KLB maksimum 0,2 | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok Blok III.C.6, dan Blok III.C.7. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Jalur Hijau | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 4.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Jalur Hijau | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Jalur Hijau | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah untuk Jalur Hijau | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.2<br>• SWP III.D pada Blok III.D.3 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Terkait Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **B** | **Perwujudan Zona Budi Daya** | | | | | | | | | | |
| **a** | **Perwujudan Zona Badan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.1 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Survei Kondisi Jalan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Rehabilitasi Jalan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.4 | Rekonstruksi Jalan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.6 | Penyelesaian Tumpang Tindih Badan Jalan dengan Hak Atas Tanah melalui Inventarisasi, Verifikasi, dan Penataan Pertanahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **b** | **Perwujudan Zona Pertanian** | | | | | | | | | | |
| **b.1** | **Perwujudan Sub-Zona Hortikultura** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Hortikultura** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Pertanian Hortikultura serta Sarana Penunjangnya | SWP II.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Pengembangan Pertanian Hortikultura** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Pengembangan Pertanian Hortikultura** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pengembangan Jenis Komoditas Hortikultura | SWP II.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan | - | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **3** | **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Hortikultura | SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Pemanfaatan dan Pengendalian Prasarana Hortikultura | SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3.2** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pendukung Hortikultura | SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **4.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi untuk Pertanian Horikultura | SWP III.A pada Blok III.A.1 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Pertanian Horikultura | SWP III.A pada Blok III.A. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Pengelolaan RTH Melalui Pemanfaatan Sub-Zona Hortikultura yang dapat difungsikan untuk fungsi Ekologis, Resapan Air, Ekonomi, Sosial Budaya, dan/atau Estetika | SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **c** | **Perwujudan Zona Pariwisata** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.1 | Perencanaan dan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan | SWP III.B. pada Blok SWP III.B.1. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Zona Pariwisata** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Pariwisata Alam serta Sarana Penunjangnya | SWP III.B. pada Blok SWP III.B.1. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Zona Pariwisata serta Sarana Penunjangnya | SWP III.B. pada Blok SWP III.B.1. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | SWP III.B. pada Blok SWP III.B.1. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang | - | - | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | untuk Pariwisata Alam | | Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Pariwisata Alam | SWP III.B. pada Blok SWP III.B.1. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Zona Pariwisata | SWP III.B pada Blok III.B.1 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 5.1,2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di Pariwisata melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | SWP III.B pada Blok III.B.1 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **d** | **Perwujudan Zona Perumahan** | | | | | | | | | | |
| **d.1** | **Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Perumahan Kepadatan Tinggi serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Pengembangan Rumah Susun Komersial (Apartemen, Kondominium, dll) | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | | dan/atau Dinas PUPR | kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.3 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi berupa Perumahan Vertikal (Rumah Susun, Apartemen, kondominium, dll) | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2.2** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Identifikasi Perumahaan di Lokasi Rawan Bencana Banjir | • SWP III.B pada Blok III.B.2<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.2.2 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan berkepadatan Tinggi pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:<br>• Konstruksi bangunan mengikuti standar tahan banjir;<br>• Peningkatan kapasitas jaringan drainase;<br>• Penambahan 10% dari KDH minumum; dan<br>• Penyediaan peralatan peringatan dini bencana. | • SWP III.B pada Blok III.B.2<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengembangan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Melalui Pemberian Bantuan Untuk Pembangunan Layak Huni** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan Perumahan Kepadatan tinggi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan Tetap Memenuhi Prinisp Layak Huni | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 3.1.2 | Pengembangan akses pembiayaan, kredit, dan bantuan hunian bagi MBR Untuk Mendukung Penyediaan Perumahan Layak Huni | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pentaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang Permahan dan Kawasan Permukiman (PKP) | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.2** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | • SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | | dan/atau Dinas PUPR | kepentingan lainnya | | | | |
| 4.2.2 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.3** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Perencanaan Penyelenggaraan PSU Permukiman/Perumahan | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman/Perumahaan (Penyediaan PSU Rumah Swadaya, Rumah Umum, Komersial serta Perumahan yang dikembangkan Oleh Pengembang) | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman/Perumahan | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.4 | Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman/Perumahaan | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 4.3.5 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman/Perumahaan | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Ketentuan Luas Kavling Minimum 72 $m^2$ | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 5.1.2 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang diperuntukkan Bagi Perumahan Masyarakat MBR dengan Ketentuan Luas Kavling Minimum 72 m² | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Penggunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Pengembangan Perumahan Kepadatan Tinggi | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kota Untuk Pengembangan Perumahan Kepadatan Tinggi | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | | | | | | | |
| 6.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota Untuk Pengembangan Perumahan Kepadatan Tinggi | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blo<br>• k III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **7** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 7.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebagai bagian dari RTH melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **d.2** | **Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Perumahan Kepadatan Sedang serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Umum/Rumah Susun Umum | • SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.3 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang berupa Perumahan Vertikal (Rumah Susun dan lain-lain) | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2.2** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Identifikasi Perumahaan di Lokasi Rawan Bencana Banjir dan Longsor | • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.2.2 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan berkepadatan Sedang | • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota | Kementerian Perumahan dan Kawasan | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan | Swasta, Masyarakat dan/atau | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:<br>• Konstruksi bangunan mengikuti standar tahan banjir;<br>• Peningkatan kapasitas jaringan drainase;<br>• Penambahan 10% dari KDH minumum; dan<br>• Penyediaan peralatan peringatan dini bencana. | Blok III.B.2; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 | dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | | Permukiman, Dinas PUPR, dan/atau BPBD | Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.2.3 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan berkepadatan Sedang pada Kawasan Rawan Bencana Longsor Sedang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:<br>• Konstruksi bangunan mengikuti standar tahan longsor;<br>• Peningkatan tanggul penahan runtuhan batuan;<br>• Penambahan 10% dari KDH minumum; dan<br>• Meminimalkan perubahan lahan | SWP III.B pada Blok III.B.1 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | • Melakukan rekayasa penguatan lerek. | | | | | | | | | | |
| **3** | **Program Pengembangan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Melalui Pemberian Bantuan Untuk Pembangunan Layak Huni** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan Perumahan Kepadatan Sedang untuk Masyarakat MBR dengan Tetap Memenuhi Prinisp Layak Huni | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Pengembangan akses pembiayaan, kredit, dan bantuan hunian bagi MBR Untuk Mendukung Penyediaan Perumahan Layak Huni | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pentaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang Permahan dan Kawasan Permukiman (PKP) | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **4.2** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.2.2 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.3** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Perencanaan Penyelenggaraan PSU Permukiman/Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Menunjang Fungsi Permukiman/Perumahaan (Penyediaan PSU Rumah Swadaya, Rumah Umum, Komersial serta Perumahan yang dikembangkan Oleh Pengembang) | dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | | Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman/Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.4 | Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman/Perumahaan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.5 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman/Perumahaan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **5** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Ketentuan Luas Kavling Minimum 80 m² | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 5.1.2 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang diperuntukkan Bagi Perumahan MBR dengan Ketentuan Luas Kavling Minimum 72 m² | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Penggunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah untuk Perumahan Kepadatan Sedang | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kota | • SWP III.A pada Blok III.A.3; | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota | Kementerian Perumahan dan Kawasan | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan | Swasta, Masyarakat dan/atau | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | untuk Perumahan Kepadatan Sedang | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | | Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota untuk Perumahan Kepadatan Sedang | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6.2** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | • SWP III.A pada Blok III.A.3; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Reklamasi, Revegetasi Dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Perumahan Kepadatan Sedang | • SWP III.A pada Blok III.A.3; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **7** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **7.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 7.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebagai bagian dari RTH melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **d.3** | **Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Perumahan Kepadatan Rendah serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.3 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah berupa Perumahan Horizontal | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2.2** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Identifikasi Perumahaan di Lokasi Rawan Bencana Banjir dan Longsor | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | | | | | | | |
| 2.2.2 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan berkepadatan Rendah pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:<br>• Konstruksi bangunan mengikuti standar tahan banjir;<br>• Peningkatan kapasitas jaringan drainase;<br>• Penambahan 10% dari KDH minumum; dan<br>• Penyediaan peralatan peringatan dini bencana. | SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.2.3 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan berkepadatan Rendah pada Kawasan Rawan Bencana Longsor Sedang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:<br>• Konstruksi bangunan mengikuti standar tahan longsor;<br>• Peningkatan tanggul penahan runtuhan batuan; | • SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | • Penambahan 10% dari KDH minumum; dan<br>• Meminimalkan perubahan lahan<br>• Melakukan rekayasa penguatan lerek. | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan berkepadatan Rendah pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Tinggi dan Longsor Tingkat Tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:<br>• Konstruksi bangunan mengikuti standar tahan banjir dan longsor;<br>• Peningkatan kapasitas jaringan drainase;<br>• Penambahan 10% dari KDH minumum; dan<br>• Penyediaan peralatan peringatan dini bencana. | SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.4 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau BPBD | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengembangan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Melalui Pemberian Bantuan Untuk Pembangunan Layak Huni** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan Perumahan Kepadatan Rendah untuk Masyarakat MBR dengan Tetap | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Memenuhi Prinisp Layak Huni | • SWP III.B pada Blok III.B.1. | Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | dan/atau Kementerian ATR/BPN | | | | | | | |
| 3.1.2 | Pengembangan akses pembiayaan, kredit, dan bantuan hunian bagi MBR Untuk Mendukung Penyediaan Perumahan Layak Huni | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pentaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang Permahan dan Kawasan Permukiman (PKP) | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.2** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4.3** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Perencanaan Penyelenggaraan PSU Permukiman/Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman/Perumahaan (Penyediaan PSU Rumah Swadaya, Rumah Umum, Komersial serta Perumahan yang dikembangkan Oleh Pengembang) | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | dan Utilitas Umum Permukiman/Perumahan | dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | | Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.4 | Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman/Perumahaan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.3.5 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman/Perumahaan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Ketentuan Luas Kavling Minimum 90 $m^2$ | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 5.1.2 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang diperuntukkan Bagi Perumahan MBR dengan Ketentuan Luas Kavling Minimum 72 m² | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Penggunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah untuk Perumahan Kepadatan Rendah | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kota untuk Perumahan Kepadatan Rendah | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi | • SWP III.A pada Blok III.A.3; | APBN, APBD Provinsi, | Kementerian Perumahan dan | Dinas PUPR-PERA | Dinas Perumahan | Swasta, Masyarakat | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota untuk Perumahan Kepadatan Rendah | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian ATR/BPN | | dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6.2** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.2.2 | Reklamasi, Revegetasi Dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Perumahan Kepadatan Rendah | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **7** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 7.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sub-Zona Perumahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | - | - | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Kepadatan Rendah sebagai bagian dari RTH melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2. | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | dan/atau Dinas PUPR | kepentingan lainnya | | | | |
| **e** | **Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum** | | | | | | | | | | |
| **e.1** | **Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kota** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan SPU Skala Kota serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.B pada Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.4 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.2 | Pengembangan SPU Skala Kota melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah oleh pihak ketiga sesuai peruntukan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | SWP III.C pada Blok III.C.4 | APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | dan Pemeliharaan SPU Pendidikan, Kesehatan, Peribatan dan SPU lainnya Skala Kota serta Sarana Penunjangnya | Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kota | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan | • SWP III.A pada Blok III.A.3; | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas | Swasta, Masyarakat dan/atau | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona SPU Skala Kota | • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di SPU Skala Kota melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana | • SWP III.B pada Blok III.B.3; dan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk SPU Skala Kota | • SWP III.C pada Blok III.C.4 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian ATR//BPN dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk SPU Skala Kota | • SWP III.B pada Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.4 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama Kementerian ATR//BPN dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Pemanfaatan SPU Skala Kota sebagai bagian dari Tempat Evakuasi Sementara | • SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.3; dan<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida,, Dinas PUPR, BPBD dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 5.1.2 | Pemanfaatan SPU Skala Kota sebagai bagian dari Tempat Evakuasi Akhir | SWP III.C pada Blok III.C.2. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan | - | - | Bapperida,, Dinas PUPR, BPBD dan/atau | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | Dinas Teknis Lainnya | kepentingan lainnya | | | | |
| **e.2** | **Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada SPU Skala Kecamatan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kecamatan** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan SPU Pendidikan, Kesehatan, Peribatan dan SPU lainnya Skala Kecamatan serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | • SWP III.A pada Blok III.A.3 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Reklamasi, Revegetasi Dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Fungsi SPU Skala Kecamatan | • SWP III.A pada Blok III.A.3 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida,, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **4. 1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 4.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona SPU Skala Kecamatan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Keshetan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | | |
| 4.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di SPU Skala Kecamatan melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | | |
| **e.3** | **Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahaan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada SPU Skala Kelurahaan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kelurahaan** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan SPU Pendidikan, Kesehatan, Peribatan dan SPU lainnya Skala Kelurahaan serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4 | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kelurahaan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4 | | | | | | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.`1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona SPU Skala Kelurahan | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di SPU Skala Kelurahan melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.D.3, dan | | | | | | | | | |
| **e.4** | **Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada SPU Skala RW** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah RW** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan SPU Pendidikan, Kesehatan, Peribatan dan SPU lainnya Skala RW serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala RW | • SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Terkait Lainnya | Bapperida, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **3** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Reklamasi, Revegetasi Dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Fungsi SPU Skala RW | SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **4.`1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH | • SWP III.A pada Blok III.A.2, | Sumber Pembiayaan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, | Swasta, Masyarakat | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona SPU Skala RW | dan Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di SPU Skala RW melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **5** | **Program Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | |
| **5.`1** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Pemanfaatan SPU Skala RW sebagai bagian dari Tempat Evakuasi Sementara | SWP III.D pada Blok III.D.3 | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, BPBD dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **f** | **Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa** | | | | | | | | | | |
| **f.1** | **Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahanaan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penerbitan Surat Izin Usaha** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Investasi/BKPM | Dinas PMPTSP | Dinas PMPTSP | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengembangan UMKM** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usah** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan | Kementerian Ekonomi Kreatif dan/atau Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Dinas Perindustria, Perdagangan, Koperasi dan UKM | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Peraturan Perundang-Undangan | | | Dinas Teknis Lainnya | | | | | |
| **4** | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| **6** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Reklamasi, Revegetasi Dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Perdagangan dan Jasa Skala Kota | SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **7** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH | • SWP III.A pada Blok III.A.1, | Sumber Pembiayaan | - | - | Dinas Lingkungan | Swasta, Masyarakat | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 7.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| **f.2** | **Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahanaan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penerbitan Surat Izin Usaha** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | • SWP III.C pada Blok III.C.5; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Investasi/BKPM | Dinas PMPTSP | Dinas PMPTSP | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP | • SWP III.C pada Blok III.C.5; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengembangan UMKM** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usah** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha | • SWP III.C pada Blok III.C.5; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan | Kementerian Ekonomi Kreatif dan/atau Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Dinas Perindustria, Perdagangan, Koperasi dan UKM | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **4** | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | • SWP III.C pada Blok III.C.5; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | • SWP III.C pada Blok III.C.5; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.C pada Blok III.C.5; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **6. 1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 6.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP | • SWP III.C pada Blok III.C.5; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.C pada Blok III.C.5; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.4. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **f.3** | **Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahanaan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Penerbitan Surat Izin Usaha** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Investasi/BKPM | Dinas PMPTSP | Dinas PMPTSP | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Pengembangan UMKM** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usah** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Ekonomi Kreatif dan/atau Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 4.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Peraturan Perundang-Undangan | | | dan/atau Dinas Teknis Lainnya | | | | | |
| **5** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP serta Sarana Penunjangnya | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7. | APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **g** | **Perwujudan Zona Perkantoran** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Zona Perkantoran** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Perkantoran serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Bapperida, dan/atau Dinas PU-PERA | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Perkantoran serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian Pekerjaan Umum | Bapperida, dan/atau Dinas PU-PERA | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| **3** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi Perkantoran | • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Zona Perkantoran | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di Zona Perkantoran melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;<br>• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4. | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **5** | **Program Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 5.1.1 | Pemanfaatan Perkantoran sebagai bagian dari Tempat Evakuasi Sementara | • SWP III.A pada Blok III.A.1; dan<br>• SWP III.B pada Blok III.B.1 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, BPBD dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 5.1.2 | Pemanfaatan Perkantoran sebagai bagian dari Tempat Evakuasi Akhir | SWP III.D pada Blok III.D.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Bapperida, Dinas PUPR, BPBD dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **h** | **Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan TPA serta Sarana Penunjangnya | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 2.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan TPA serta Sarana Penunjangnya | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **3** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui penyediaan area peyangga TPA berupa Sabuk Hijau | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **4** | **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Pelaksanaan Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| **5** | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi | SWP III.A pada Blok III.A.2 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 5.1.2 | Reklamasi, Revegetasi dan Restorasi Ekosistem Lahan Pasca Tambang Menjadi TPA | SWP III.A pada Blok III.A.2 | Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **6** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona Pengelolaan Persampahan | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 6.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di Sub-Zona Pengelolaan Persampahan melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | | | | | | | | | | |
| **7** | **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum** | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk TPA | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 7.1.2 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk TPA | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **7.2** | **Koordinasi Pengadaan Tanah** | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah | SWP III.A pada Blok III.A.2 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Kementerian ATR/BPN | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **i** | **Perwujudan Zona Transportasi** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Zona Transportasi** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Dermaga Penunjang Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan TImur serta Sarana Penunjangnya | SWP III.D pada Blok III.D.4. | APBD Provinsi | - | Dinas Perhubungan dan/atau Dinas PUPR-PERA | - | - | | | | |
| **2** | **Program Pengelolaan Pelayaraan** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pengoprasian dan Pemeliharaan Dermaga Penunjang Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan TImur | SWP III.D pada Blok III.D.4. | APBD Provinsi | - | Dinas Perhubungan dan/atau Dinas PUPR-PERA | - | - | | | | |
| **j** | **Perwujudan Zona Pertanahan dan Keamanan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Pertahanan dan Keamanan serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.B pada Blok III.B.1; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 | APBN | Kementerian Pertahanan | - | - | - | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Pertahanan dan Keamanan serta Sarana Penunjangnya | • SWP III.B pada Blok III.B.1; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 | APBN | Kementerian Pertahanan | - | - | - | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| 3.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Zona Pertahanan dan Keamanan | • SWP III.B pada Blok III.B.1; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 | APBN | Kementerian Pertahanan | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| 3.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di Zona Pertahanan dan Keamanan melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | • SWP III.B pada Blok III.B.1; dan<br>• SWP III.D pada Blok III.D.2 | APBN | Kementerian Pertahanan | - | Dinas PUPR | - | | | | |
| **k** | **Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya** | | | | | | | | | | |
| **k.1** | **Perwujudan Sub-Zona Instaslasi Air Minum (IPAM)** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Instalasi Air Minum** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Instalasi Air Minum serta Sarana Penunjangnya | SWP III.D pada Blok III.3 dan Blok III.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| **2** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Instalasi Air Minum serta Sarana Penunjangnya | SWP III.D pada Blok III.3 dan Blok III.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai | - | - | Dinas PUPR, Dinas, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Pelaksana | | | | Waktu Pelaksanaan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi | Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP-I (2026-2030) | TP-2 (2031-2035) | TP-3 (2036-2040) | TP-4 (2041-2045) |
| | | | dengan Peraturan Perundang-Undangan | | | Dinas Teknis Lainnya | | | | | |
| **3** | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pemenuhan dan Penyediaan RTH melalui pemanfaatan objek ruang pada ketentuan KDH di Sub-Zona Instalasi Air Minum | SWP III.D pada Blok III.3 dan Blok III.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |
| 3.1.2 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH pada ketentuan KDH di Sub-Zona Instalasi Air Minum melalui Penanaman Rumput/Semak/Tanaman Rambat/Pohon Kecil/Pohon Sedang/Pohon Besar | SWP III.D pada Blok III.3 dan Blok III.4 | APBD Kota dan/atau Sumber Pembiayaan Lain yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Dinas PUPR, Dinas, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Dinas Teknis Lainnya | Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan lainnya | | | | |

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

ANDI HARUN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU

## TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| **A** | **PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERTANIAN JAGUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 2 | PERTANIAN SEREALIA SELAIN PADI DAN JAGUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 3 | PERTANIAN KEDELAI | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 4 | PERTANIAN KACANG TANAH | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 5 | PERTANIAN KACANG HIJAU | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 6 | PERTANIAN ANEKA KACANG SELAIN KEDELAI, KACANG TANAH, DAN KACANG HIJAU | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 7 | PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 8 | PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK SELAIN MINYAK MAKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 9 | PERTANIAN PADI HIBRIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 10 | PERTANIAN PADI INBRIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 11 | PERTANIAN SAYURAN DAUN | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 12 | PERTANIAN BUAH SEMUSIM | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 13 | PERTANIAN SAYURAN BUAH | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 14 | PERTANIAN SAYURAN UMBI | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 15 | PERTANIAN UBI KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 16 | PERTANIAN JAMUR | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 17 | PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS SELAIN TEBU | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 18 | PERTANIAN CABAI | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 19 | PERTANIAN UMBI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 20 | PERTANIAN TEBU | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | PERTANIAN TEMBAKAU | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | PERTANIAN TANAMAN BERSERAT | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 24 | PEMBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBENIHAN BIT (BUKAN BIT GULA) | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 25 | PERTANIAN TANAMAN BUNGA | X | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 26 | PERTANIAN PEMBENIHAN TANAMAN BUNGA | X | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 27 | PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL | X | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 28 | PERTANIAN BUAH ANGGUR | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 29 | PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 30 | PERTANIAN BUAH JERUK | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 31 | PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (*POME AND STONE FRUITS*) | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 32 | PERTANIAN BUAH BERI | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 33 | PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 34 | PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 35 | PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 36 | PERTANIAN KELAPA | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 37 | PERTANIAN KELAPA SAWIT | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 38 | PERTANIAN BUAH OLEAGIN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 39 | PERTANIAN KOPI | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 40 | PERTANIAN TANAMAN TEH | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 41 | PERTANIAN KAKAO | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 42 | PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 43 | PERTANIAN LADA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 44 | PERTANIAN CENGKIH | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 45 | PERTANIAN PALA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X |
| 46 | PERTANIAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 47 | PERTANIAN TANAMAN OBAT RIMPANG | X | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 48 | PERTANIAN TANAMAN OBAT NONRIMPANG | X | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 49 | PERTANIAN TANAMAN NARKOTIKA DAN TANAMAN OBAT TERLARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH DAN AROMATIK/PENYEGAR LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, T4, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T4, B3 | X | X | X | X |
| 51 | PERTANIAN POHON KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 53 | PERTANIAN TANAMAN HIAS | X | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | T2, B1, B3 | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | PENANGKARAN TUMBUHAN LIAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 55 | PEMBIAKAN TANAMAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 56 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN SAPI POTONG | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 57 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN SAPI PERAH | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 58 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN KERBAU POTONG | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 59 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN KERBAU PERAH | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 60 | PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 61 | PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 62 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN DOMBA POTONG | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 63 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN KAMBING POTONG | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 64 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN KAMBING PERAH | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 65 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN DOMBA PERAH | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 66 | PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 67 | PETERNAKAN BABI | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 68 | BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 69 | BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 70 | PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 71 | BUDI DAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 72 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN ITIK DAN BEBEK | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 73 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN BURUNG PUYUH | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 74 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN BURUNG MERPATI | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 75 | PEMBIBITAN AYAM RAS | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 76 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN UNGGAS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 77 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN BURUNG UNTA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 78 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN ULAT SUTRA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 79 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN LEBAH | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 80 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN RUSA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 81 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN KELINCI | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 82 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN CACING | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN BURUNG WALET | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 84 | PENANGKARAN SATWA LIAR | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X | X |
| 85 | BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN HEWAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 86 | JASA PENGOLAHAN LAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 87 | JASA PEMUPUKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 88 | JASA PEMANENAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 89 | JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 90 | JASA PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 91 | JASA PENANAMAN BENIH | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 92 | JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 93 | JASA PERKAWINAN TERNAK | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 94 | JASA PENETASAN TELUR | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 95 | JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 96 | JASA PASCAPANEN | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 97 | PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PEMBIAKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 98 | PERBURUAN, PENANGKAPAN, DAN KEGIATAN JASA TERKAIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 99 | PENGELOLAAN HUTAN | X | B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 100 | PEMANFAATAN KAYU HUTAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 101 | PEMBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 102 | PEMANENAN KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 103 | PEMUNGUTAN KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 104 | PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 105 | JASA LINGKUNGAN HUTAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 106 | JASA PENGGUNAAN KAWASAN KEHUTANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 107 | JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 108 | PENANGKAPAN IKAN DAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 109 | PENANGKAPAN IKAN DAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN AIR TAWAR | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 110 | PEMBUDIDAYAAN IKAN BERSIRIP (SELAIN IKAN HIAS) DAN BIOTA AIR LAUT LAINNYA YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 111 | PEMBUDIDAYAAN IKAN HIAS AIR LAUT YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | B1 | B1 | B1 | X | X | X | X | X |
| 112 | PEMBUDIDAYAAN TUMBUHAN AIR LAUT YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 113 | PENGEMBANGBIAKAN IKAN DAN BIOTA AIR LAUT YANG DILINDUNGI | B3 | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 114 | PEMBUDIDAYAAN IKAN BERSIRIP (SELAIN IKAN HIAS) DAN BIOTA AIR TAWAR LAINNYA YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 115 | PEMBUDIDAYAAN IKAN HIAS AIR TAWAR YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 116 | PEMBUDIDAYAAN TUMBUHAN AIR TAWAR YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T4 | T4 | T4 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 117 | PENGEMBANGBIAKAN BIOTA AIR TAWAR YANG DILINDUNGI | I | B3 | X | X | X | X | X | X | B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 118 | PEMBUDIDAYAAN IKAN BERSIRIP (SELAIN IKAN HIAS) DAN BIOTA AIR PAYAU LAINNYA YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 119 | PEMBUDIDAYAAN IKAN HIAS AIR PAYAU YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | B1 | B1 | B1 | X | X | X | X | X |
| 120 | PEMBUDIDAYAAN TUMBUHAN AIR PAYAU YANG TIDAK DILINDUNGI | I | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | B1 | B1 | B1 | X | X | X | X | X |
| 121 | PENGEMBANGBIAKAN BIOTA AIR PAYAU YANG DILINDUNGI | B3 | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 122 | JASA PENUNJANG KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | T4, B2, B3 | T4, B2, B3 | T4, B2, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| **B** | **PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | PERTAMBANGAN BATU BARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 124 | BENEFISIASI ATAU PENINGKATAN KUALITAS BATU BARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 125 | PERTAMBANGAN LIGNIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 126 | PERTAMBANGAN MINYAK BUMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 127 | PERTAMBANGAN GAS ALAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 128 | PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 129 | PERTAMBANGAN PASIR BESI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 130 | PERTAMBANGAN BIJIH BESI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 131 | PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN TORIUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 132 | PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 133 | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 134 | PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 135 | PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 136 | PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 137 | PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 138 | PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 139 | PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 140 | PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 141 | PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 142 | PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 143 | PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 144 | PENGGALIAN PASIR | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 145 | PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 146 | PENGGALIAN GIPS | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 147 | PENGGALIAN TRAS | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 148 | PENGGALIAN BATU APUNG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 149 | PENGGALIAN BATU, PASIR, DAN TANAH LIAT LAINNYA | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 150 | PERTAMBANGAN BELERANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 151 | PERTAMBANGAN FOSFAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 152 | PERTAMBANGAN NITRAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 153 | PERTAMBANGAN YODIUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 154 | PERTAMBANGAN POTASH (KALIUM KARBONAT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 155 | PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA, DAN BAHAN PUPUK LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 156 | EKSTRAKSI TANAH GAMBUT (PEAT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 157 | EKSTRAKSI GARAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 158 | PERTAMBANGAN BATU MULIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 159 | PENGGALIAN FELDSPAR DAN KALSIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 160 | PERTAMBANGAN ASPAL ALAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 161 | PENGGALIAN ASBES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 162 | PENGGALIAN KUARSA/PASIR KUARSA | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X |
| 163 | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM TANAH JARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 164 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 165 | AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 166 | AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C | INDUSTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | KEGIATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B2 | X | X | X | T1, T4, B1 | X | X | X | X | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | X | X | X | X | X |
| 168 | KEGIATAN RUMAH POTONG BABI | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B2 | X | X | X | T1, T4, B1 | X | X | X | X | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | X | X | X | X | X |
| 169 | KEGIATAN RUMAH POTONG UNGGAS | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B2 | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | X | X | X | X | X |
| 170 | KEGIATAN RUMAH POTONG HEWAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B2 | X | X | X | T1, T4, B1 | X | X | X | X | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | X | X | X | X | X |
| 171 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING DAN PRODUK DAGING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 172 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PENGGARAMAN ATAU PENGERINGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 173 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PENGASAPAN ATAU PEMANGGANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 174 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PEMBEKUAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 175 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PEMINDANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 176 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN FERMENTASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 177 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PELUMATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 178 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PENGALENGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 179 | PENGOLAHANDAN PENGAWETAN IKAN MENJADI PRODUK OLAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 180 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN METODE LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 181 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN PENGGARAMAN ATAU PENGERINGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 182 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN PENGASAPAN ATAU PEMANGGANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 183 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN PEMBEKUAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 184 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN PEMINDANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 185 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN FERMENTASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 186 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN PELUMATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 187 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN PENGALENGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 188 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN RUMPUT LAUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 189 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN METODE LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 190 | PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 191 | PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 192 | PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B3 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 193 | PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 194 | PENGALENGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 195 | PENGOLAHAN SARI BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 196 | PEMBUATAN TEMPE KEDELAI | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B3 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 197 | PEMBUATAN TAHU KEDELAI | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B3 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 198 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B3 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 199 | INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI BUKAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 200 | INDUSTRI MARGARIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 201 | INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK DARI HEWAN SELAIN IKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 202 | INDUSTRI MINYAK IKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 203 | INDUSTRI MINYAK GORENG DAN MINYAK MAKAN BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 204 | INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI BUKAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 205 | INDUSTRI KOPRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 206 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 207 | INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 208 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (*CRUDE PALM OIL*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 209 | INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (*CRUDE PALM KERNEL OIL*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 210 | INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 211 | INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 212 | INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 213 | INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 214 | INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 215 | INDUSTRI SUSU SEGAR DAN KRIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 216 | INDUSTRI SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 217 | INDUSTRI ES KRIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 218 | INDUSTRI ES YANG DAPAT DIMAKAN DAN ES PENCUCI MULUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 219 | INDUSTRI PRODUK SUSU LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 220 | INDUSTRI PRODUK GILINGAN GANDUM (SELAIN TEPUNG TERIGU) DAN SERELIA SELAIN BERAS DAN JAGUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 221 | INDUSTRI PRODUK GILINGAN ANEKA KACANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 222 | INDUSTRI PRODUK GILINGAN ANEKA UMBI, TANAMAN RIMPANG, DAN SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B3 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 223 | INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 224 | INDUSTRI MAKANAN SEREAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 225 | INDUSTRI TEPUNG TERIGU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 226 | INDUSTRI PATI UBI KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 227 | INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 228 | INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 229 | INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 230 | INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 231 | INDUSTRI PEMIPILAN JAGUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 232 | INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 233 | INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 234 | INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 235 | INDUSTRI MINYAK DARI BERAS DAN JAGUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 236 | INDUSTRI PRODUK BAKERI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 237 | INDUSTRI GULA PASIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 238 | INDUSTRI GULA MERAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 239 | INDUSTRI SIROP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 240 | INDUSTRI GULA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 241 | INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 242 | INDUSTRI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKELAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 243 | INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 244 | INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 245 | INDUSTRI MAKARONI, MI, *COUSCOUS*, DAN PRODUK SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 246 | INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 247 | PENGOLAHAN KOPI | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 248 | PENGOLAHAN TEH | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 249 | INDUSTRI KECAP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 250 | INDUSTRI GARAM KONSUMSI BERYODIUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 251 | INDUSTRI GARAM INDUSTRI ANEKA PANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 252 | INDUSTRI BUMBU MASAKAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 253 | INDUSTRI MAKANAN BAYI DAN MAKANAN KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 254 | INDUSTRI KUE BASAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 255 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN DARI KELAPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 256 | INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK, DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 257 | INDUSTRI SARI NABATI DAN KRIMER NABATI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 258 | INDUSTRI DODOL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 259 | INDUSTRI INFUSI HERBAL/HERB INFUSION | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 260 | INDUSTRI BAHAN MAKANAN DARI RUMPUT LAUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 261 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 262 | INDUSTRI RANSUM PAKAN HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 263 | INDUSTRI KONSENTRAT PAKAN HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 264 | INDUSTRI PENYULINGAN, PEMURNIAN, DAN PENCAMPURAN MINUMAN BERALKOHOL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 265 | INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 266 | INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 267 | INDUSTRI MALT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 268 | INDUSTRI AIR KEMASAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | X | X | X | X | X | X | B3 | |
| 269 | INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 270 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | X |
| 271 | INDUSTRI MINUMAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 272 | INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | X |
| 273 | INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 274 | INDUSTRI ROKOK PUTIH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 275 | INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 276 | INDUSTRI BUMBU ROKOK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 277 | INDUSTRI PRODUK TEMBAKAU LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 278 | PERSIAPAN SERAT TEKSTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 279 | PEMINTALAN BENANG SELAIN BENANG JAHIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 280 | PEMINTALAN BENANG JAHIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 281 | PERTENUNAN TEKSTIL DENGAN MESIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 282 | PERTENUNAN TEKSTIL BUKAN DENGAN MESIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 283 | PENYEMPURNAAN BENANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 284 | PENYEMPURNAAN BASAH KAIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 285 | INDUSTRI KAIN BATIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 286 | PENYEMPURNAAN TEKSTIL LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 287 | INDUSTRI KAIN RAJUTAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 288 | INDUSTRI KAIN CROCHETED | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 289 | INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 290 | INDUSTRI BARANG TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 291 | INDUSTRI BARANG TEKSTIL DENGAN BAHAN PENGISI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 292 | INDUSTRI KARUNG GONI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 293 | INDUSTRI KARUNG SELAIN KARUNG GONI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 294 | INDUSTRI BARANG TEKSTIL BUKAN PAKAIAN JADI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 295 | INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 296 | INDUSTRI TALI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 297 | INDUSTRI BARANG DARI TALI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 298 | INDUSTRI KAIN NARROW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 299 | INDUSTRI KAIN YANG DILAPISI DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 300 | INDUSTRI KAIN NIRTENUN/NONWOVEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 301 | INDUSTRI KAIN BAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 302 | INDUSTRI KAPUK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 303 | INDUSTRI KAIN TULE, KAIN JARING, DAN KAIN BORDIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 304 | INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 305 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONFEKSI) DARI TEKSTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 306 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONFEKSI) DARI KULIT DAN TIRUAN KULIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 307 | INDUSTRI PENJAHITAN DAN PEMBUATAN (BUKAN KONFEKSI) PAKAIAN SESUAI PESANAN/KUSTOMISASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 308 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 309 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT DAN TIRUAN KULIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 310 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT BERBULU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 311 | INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA DARI RAJUTAN DAN *CROCHETED* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 312 | INDUSTRI *HOSIERY* RAJUTAN DAN *CROCHETED* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 313 | PENGAWETAN KULIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 314 | PENYAMAKAN KULIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 315 | PEWARNAAN KULIT BERBULU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 316 | INDUSTRI KULIT KOMPOSISI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 317 | INDUSTRI KOPER, TAS TANGAN, DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 318 | INDUSTRI PELANA, ALAT PENGEKANG/HARNESS, DAN BARANG LAINNYA UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 319 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 320 | INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 321 | INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 322 | INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 323 | INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 324 | PENGGERGAJIAN DAN PENGHALUSAN KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 325 | PENGAWETAN KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 326 | PENGAWETAN ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 327 | PENGOLAHAN ROTAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 328 | INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 329 | INDUSTRI KAYU LAPIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 330 | INDUSTRI VENIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 331 | INDUSTRI KAYU LAMINASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 332 | INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 333 | INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 334 | INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 335 | INDUSTRI WADAH DARI KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 336 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 337 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN SELAIN ROTAN DAN BAMBU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 338 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN FURNITUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 339 | INDUSTRI ALAT DAPUR DAN ALAT MAKAN DARI KAYU, ROTAN, DAN BAMBU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 340 | INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET DARI KAYU DAN BIOMASSA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 341 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS, JERAMI, ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 342 | INDUSTRI BUBUR KERTAS (*PULP*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 343 | INDUSTRI KERTAS BUDAYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 344 | INDUSTRI KERTAS BERHARGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 345 | INDUSTRI KERTAS KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 346 | INDUSTRI KERTAS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 347 | INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 348 | INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 349 | INDUSTRI KERTAS TISU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 350 | INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 351 | PENCETAKAN UMUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 352 | PENCETAKAN KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 353 | PENCETAKAN TIGA DIMENSI (3D) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 354 | KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 355 | REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PERANGKAT LUNAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 356 | REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 357 | INDUSTRI PRODUK TANUR KOKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 358 | INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 359 | INDUSTRI MINYAK PELUMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 360 | INDUSTRI PRODUK DARI BAHAN LIMBAH MINYAK PELUMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 361 | INDUSTRI MINYAK PELUMAS DASAR (BAHAN BAKU PELUMAS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 362 | INDUSTRI BRIKET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 363 | INDUSTRI PRODUK DARI PENCAMPURAN HASIL KILANG MINYAK BUMI DENGAN BIOFUEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 364 | INDUSTRI PRODUK LAINNYA DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 365 | INDUSTRI ASAM, BASA, DAN GARAM ANORGANIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 366 | INDUSTRI GAS INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 367 | INDUSTRI KIMIA DASAR ZAT WARNA DAN PIGMEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 368 | INDUSTRI KIMIA DASAR RADIOAKTIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 369 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK DARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 370 | INDUSTRI KIMIA DASAR DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM, DAN BATU BARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 371 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 372 | INDUSTRI PUPUK DAN SENYAWA NITROGEN PUPUK NITROGEN, FOSFAT, DAN KALIUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 373 | INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO PRIMER LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 374 | INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 375 | INDUSTRI PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN MEDIA TANAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 376 | INDUSTRI BIOSTIMULAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 377 | INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 378 | INDUSTRI KARET BUATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 379 | INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 380 | INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 381 | INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 382 | INDUSTRI CAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 383 | INDUSTRI PERNIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 384 | INDUSTRI DEMPUL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 385 | INDUSTRI SEDIAAN PEWARNA DAN PELAPIS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 386 | INDUSTRI BAHAN DAN PRODUK PEMBERSIH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 387 | INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, CAIRAN LENSA KONTAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 388 | INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 389 | INDUSTRI PEREKAT GIGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 390 | INDUSTRI PARFUM SESUAI PESANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 391 | INDUSTRI PEREKAT/LEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 392 | INDUSTRI BAHAN PELEDAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 393 | INDUSTRI TINTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 394 | INDUSTRI MINYAK ASIRI HULU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 395 | INDUSTRI KOREK API | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 396 | INDUSTRI MINYAK ASIRI RANTAI TENGAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 397 | INDUSTRI BIOFUEL CAIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 398 | INDUSTRI CAIRAN ROKOK ELEKTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 399 | INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 400 | INDUSTRI SERAT FILAMEN DAN STRIP BUATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 401 | INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 402 | INDUSTRI BAHAN BAKU FARMASI UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 403 | INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 404 | INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 405 | INDUSTRI BAHAN BAKU FARMASI UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 406 | INDUSTRI ALAT DIAGNOSIS MEDIS, PERBAN, KASA, DAN PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 407 | INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT BAHAN ALAM UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 408 | INDUSTRI PRODUK OBAT BAHAN ALAM UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 409 | INDUSTRI PRODUK OBAT BAHAN ALAM UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 410 | INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT BAHAN ALAM UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 411 | INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 412 | INDUSTRI PEMBENTUKAN KEMBALI BAN DAN VULKANISASI BAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 413 | INDUSTRI KARET ASAP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 414 | INDUSTRI KARET LEMBARAN DAN *CREPE RUBBER* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 415 | INDUSTRI KARET REMAH (*CRUMB RUBBER*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 416 | INDUSTRI KARET SETENGAH JADI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 417 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 418 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 419 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 420 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 421 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KARET YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 422 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 423 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK DAN BIOPLASTIK UNTUK PENGEMASAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 424 | INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 425 | INDUSTRI PLASTIK LEMBARAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 426 | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI PLASTIK (TIDAK TERMASUK FURNITUR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 427 | INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 428 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI PLASTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 429 | INDUSTRI KACA LEMBARAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 430 | INDUSTRI KACA PENGAMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 431 | INDUSTRI KACA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 432 | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 433 | INDUSTRI PERALATAN LABORATORIUM DAN KESEHATAN DARI KACA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 434 | INDUSTRI PRODUK LAINNYA DARI KACA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 435 | INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 436 | INDUSTRI PRODUK REFRAKTORI (TAHAN API) LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 437 | INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 438 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 439 | INDUSTRI BAHAN BANGUNAN LAINNYA DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 440 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 441 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 442 | INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK ATAU TEKNIK DARI PORSELEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 443 | INDUSTRI PERALATAN SANITASI DARI PORSELEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 444 | INDUSTRI PERALATAN SANITASI DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 445 | INDUSTRI PRODUK BUKAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK DAN PORSELEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 446 | INDUSTRI SEMEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 447 | INDUSTRI KAPUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 448 | INDUSTRI GIPS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 449 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 450 | INDUSTRI BARANG DARI KAPUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 451 | INDUSTRI BARANG DARI GIPS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 452 | INDUSTRI BARANG DARI ASBES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 453 | INDUSTRI MORTAR, ACIAN, DAN BETON SIAP PAKAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 454 | INDUSTRI BARANG DARI BATU MARMER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 455 | INDUSTRI BARANG DARI BATU GRANIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 456 | INDUSTRI BARANG DARI BATU LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 457 | INDUSTRI PRODUK ABRASIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 458 | INDUSTRIBATUANASPALDANBARANGDARI ASPALATAU MATERIAL SEJENIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 459 | INDUSTRI PRODUK HASIL PEMURNIAN MINERAL NONLOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 460 | INDUSTRI PRODUK MINERAL NONLOGAM LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 461 | INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 462 | PENGGILINGAN BAJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 463 | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BESI DAN BAJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 464 | INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 465 | INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 466 | PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 467 | EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 468 | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 469 | INDUSTRI BAHAN BAKAR NUKLIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 470 | PENGECORAN BESI DAN BAJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 471 | PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 472 | INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL BUKAN ALUMINIUM UNTUK KONSTRUKSI RINGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 473 | INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL ALUMINIUM UNTUK KONSTRUKSI RINGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 474 | INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL BAJA UNTUK KONSTRUKSI BERAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 475 | INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 476 | INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR, DAN WADAH SEJENISNYA DARI LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 477 | INDUSTRI GENERATOR UAP BUKAN KETEL PEMANAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 478 | INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 479 | PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN, DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 480 | PENGERJAAN DAN PELAPISAN LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 481 | INDUSTRI PERKAKAS TANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 482 | INDUSTRI ALAT POTONG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 483 | INDUSTRI ALAT MAKAN DARI LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 484 | INDUSTRI PERALATAN UMUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 485 | INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENISNYA DARI LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 486 | INDUSTRI BARANG DARI KAWAT LOGAM BUKAN KABEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 487 | INDUSTRI PAKU, MUR, DAN BAUT LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 488 | INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR, DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 489 | INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 490 | INDUSTRI PRODUK RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 491 | INDUSTRI PROFIL LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 492 | INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 493 | INDUSTRI PRODUK LOGAM LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 494 | INDUSTRI SEL SURYA, PANEL SURYA, DAN INVERTER FOTOVOLTAIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 495 | INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 496 | INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 497 | INDUSTRI KOMPUTER DAN PERAKITAN KOMPUTER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 498 | INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 499 | INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 500 | INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (*WIRELESS*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 501 | INDUSTRI KARTU CERDAS (*SMART CARD*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 502 | INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 503 | INDUSTRI TELEVISI, MONITOR TELEVISI, DAN DISPLAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 504 | INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA, DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN TELEVISI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 505 | INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 506 | INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 507 | INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 508 | INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 509 | INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, DAN PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 510 | INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 511 | INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, PERLENGKAPAN, DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 512 | INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIK DAN ELEKTROTERAPI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 513 | INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 514 | INDUSTRI PERALATAN SINEMATOGRAFI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 515 | INDUSTRI LENSA BUKAN KACAMATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 516 | INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACAMATA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 517 | INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 518 | INDUSTRI MOTOR LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 519 | INDUSTRI GENERATOR PEMBANGKIT LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 520 | INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN/TRANSFORMATOR DAN PENGUBAH ARUS/RECTIFIER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 521 | INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 522 | INDUSTRI BATU BATERAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 523 | INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 524 | INDUSTRI BATERAI KENDARAAN LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 525 | INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 526 | INDUSTRI KABEL DAN KAWAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 527 | INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 528 | INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU SOROT, DAN LAMPU ULTRAVIOLET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 529 | INDUSTRI LAMPU GAS DAN *DISCHARGE* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 530 | INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK KENDARAAN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 531 | INDUSTRI LAMPU LED | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 532 | INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 533 | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 534 | INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 535 | INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA BUKAN LISTRIK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 536 | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 537 | INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN, DAN KINCIR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 538 | INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 539 | INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 540 | INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 541 | INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KERAN, DAN KLEP/KATUP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 542 | INDUSTRI BEARING, RODA GIGI, DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 543 | INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 544 | INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 545 | INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 546 | INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 547 | INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 548 | INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 549 | INDUSTRI PERALATAN KANTOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 550 | INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 551 | INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN, DAN PENGALENGAN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 552 | INDUSTRI MESIN TIMBANGAN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 553 | INDUSTRI MESIN PENDINGIN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 554 | INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 555 | INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 556 | INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM DAN BAHAN LAINNYA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 557 | INDUSTRI MESIN METALURGI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 558 | INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 559 | INDUSTRIMESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 560 | INDUSTRI MESIN JAHIT, MESIN CUCI, DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 561 | INDUSTRI MESIN TEKSTIL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 562 | INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 563 | INDUSTRI MESIN PERCETAKAN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 564 | INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 565 | INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 566 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 567 | INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH; INDUSTRI TRAILER DAN SEMITRAILER | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 568 | INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 569 | INDUSTRI KENDARAAN AIR DAN BAWAH AIR BERAWAK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 570 | INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 571 | INDUSTRI KENDARAAN AIR DAN BAWAH AIR TANPA AWAK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 572 | INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 573 | INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 574 | INDUSTRI PESAWAT UDARA BERAWAK DAN MESIN TERKAIT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |
| 575 | INDUSTRI PESAWAT UDARA TANPA AWAK DAN MESIN TERKAIT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | x | x | x | x | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | x | x | x | x | x |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 576 | INDUSTRI WAHANA ANTARIKSA DAN MESIN TERKAIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 577 | INDUSTRI KENDARAAN TEMPUR MILITER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 578 | INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 579 | INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 580 | INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 581 | INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 582 | INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 583 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 584 | INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN BAMBU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 585 | INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 586 | INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 587 | INDUSTRI FURNITUR DARI BAHAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 588 | INDUSTRI PERMATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 589 | INDUSTRI PERHIASAN DARI LOGAM MULIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 590 | INDUSTRIBARANG BERHARGA DARI LOGAM MULIA BUKAN PERHIASAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 591 | INDUSTRI PERHIASAN DARI MUTIARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 592 | INDUSTRI BARANG BERHARGA LAINNYA DARI LOGAM MULIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 593 | INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 594 | INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 595 | INDUSTRI ALAT MUSIK NONTRADISIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 596 | INDUSTRI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 597 | INDUSTRI ALAT PERMAINAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 598 | INDUSTRI MAINAN TERMASUK DRONE REKREASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 599 | INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN, DAN KEDOKTERAN GIGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 600 | INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, SERTA PERLENGKAPAN ORTOPEDI DAN PROSTETIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 601 | INDUSTRI KACAMATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 602 | INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 603 | INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 604 | INDUSTRI PITA MESIN TULIS ATAU GAMBAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 605 | INDUSTRI KERAJINAN YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 606 | INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 607 | INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 608 | INDUSTRI RAMBUT, JANGGUT, DAN BULU MATA PALSU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 609 | INDUSTRI KANCING DAN RITSLETING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 610 | INDUSTRI PEMANTIK API/LIGHTER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 611 | INDUSTRI PRODUK LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 612 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PRODUK LOGAM STRUKTURAL, TANGKI, TANDON AIR, DAN GENERATOR UAP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 613 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PRODUK SENJATA DAN AMUNISI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 614 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 615 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 616 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 617 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN ALAT UKUR, ALAT UJI, SERTA PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 618 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIK, DAN ELEKTROTERAPI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 619 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 620 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 621 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 622 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PERALATAN LISTRIK LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 623 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN KAPAL, PERAHU, DAN BANGUNAN TERAPUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 624 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 625 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 626 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | X |
| 627 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PERALATAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B3 |
| 628 | INSTALASI/PEMASANGAN DAN PERANGKAIAN/INTEGRASI MESIN, PERALATAN, DAN SISTEM INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | T2 | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | T2 |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 629 | PEMBONGKARAN MESIN, PERALATAN, DAN SISTEM INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | T2 | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | T2 |
| 630 | PEMASANGAN PERLENGKAPAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA | X | X | X | X | X | X | X | T2 | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | I |
| D | **PENYEDIAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS, DAN UDARA DINGIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DARI SUMBER ENERGI TIDAK TERBARUKAN YANG MENGHASILKAN EMISI | X | X | X | X | X | X | X | T2 | X | X | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | T2 |
| 632 | PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DARI SUMBER ENERGI TIDAK TERBARUKAN YANG TIDAK MENGHASILKAN EMISI | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
| 633 | PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DARI SUMBER ENERGI TERBARUKAN | X | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
| 634 | AKTIVITAS PENYALURAN TENAGA LISTRIK | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
| 635 | AKTIVITAS PENYIMPANAN TENAGA LISTRIK | X | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
| 636 | PENGOPERASIAN FASILITAS ATAU STASIUN PENGISIAN DAYA UNTUK KENDARAAN DAN PERALATAN LISTRIK | X | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
| 637 | PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | X | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | T2 |
| 638 | PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | X | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | T2 |
| 639 | PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | X | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | T2 |
| 640 | AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | X | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | T2 |
| 641 | PRODUKSI GAS ALAM DAN BUATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | T2 | X | X | X | X | T2 | T2 | T2 | X | T2 | X | X | X |
| 642 | DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN MELALUI JARINGAN | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
| 643 | PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN | X | X | X | X | X | X | X | T2 | X | X | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | X | X | X | X | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | X | X | X | I |
| 644 | PRODUKSI ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | X | X | X | X | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | X | X | X | X |
| 645 | AKTIVITAS BROKER DAN AGEN PENJUALAN TENAGA LISTRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | X | X | X | X | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | T2 | X | X | X |
| 646 | AKTIVITAS BROKER DAN AGEN PENJUALAN GAS ALAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | X | X | X | X | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | T1, T4 | T2 | X | X | X |
| E | **PENYEDIAAN AIR; PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENANGANAN LIMBAH, DAN REMEDIASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN AIR MINUM | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | T2 | T2 | I |
| 648 | PENAMPUNGAN DAN PENYEDIAAN AIR BAKU | T2 | T2 | T2 | T2 | X | X | X | X | T2 | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | I |
| 649 | AKTIVITAS PENUNJANG PENYEDIAAN AIR | T2 | T2 | T2 | T2 | X | X | X | X | T2 | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | X | I |
| 650 | PENGUMPULAN AIR LIMBAH | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | X | I | T3 | X | I |
| 651 | PENGOLAHAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | X | I | X | X | I |
| 652 | PENGUMPULAN LIMBAH ATAU SAMPAH TIDAK BERBAHAYA | X | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | X | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | I | T3 | T3 | I |
| 653 | PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA SELAIN LIMBAH RADIOKATIF | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B1 | T3 | X | X | X | T3 | T3 | T3 | X | T3 | T3 | T3 | X | I | X | X | X |
| 654 | PENGUMPULAN LIMBAH RADIOAKTIF | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B1 | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | I | X | X | X |
| 655 | PENGOLAHAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA UNTUK MENGHASILKAN ENERGI | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B1 | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | I | X | X | I |
| 656 | PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B1 | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | I | X | X | X |
| 657 | PENGOLAHAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH ATAU SAMPAH TIDAK BERBAHAYA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | T3 |
| 658 | PENGOLAHAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH ATAU SAMPAH BERBAHAYA SELAIN LIMBAH RADIOAKTIF | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B1 | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | I | X | X | X |
| 659 | PENGOLAHAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH RADIOAKTIF | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B1 | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | I | X | X | X |
| 660 | PEMULIHAN MATERIAL BARANG LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | X | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | X | I | X | X | X |
| 661 | PEMULIHAN MATERIAL BARANG PLASTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | X | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | X | I | X | X | X |
| 662 | PEMULIHAN MATERIAL LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | X | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | X | I | X | X | X |
| 663 | AKTIVITAS PENANGKAPAN KARBON | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | X | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | I | T3 | T3 | T2 |
| 664 | AKTIVITAS PENYIMPANAN KARBON | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | X | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | I | T3 | T3 | T2 |
| 665 | AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH ATAU SAMPAH LAINNYA | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | X | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | I | T3 | T3 | T2 |
| F | **KONSTRUKSI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HUNIAN | T5 | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | T2, B1 | I | I | I | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X |
| 667 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PERKANTORAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | B2 | B2 | B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X |
| 668 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | T3, B2 | X | X | X |
| 669 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PERBELANJAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | T3 | T3 | X | X | X |
| 670 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG KESEHATAN | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | X | X | T3, B2 |
| 671 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PENDIDIKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | X | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | T3 | T3 | T3 | X | X | X | X | X |
| 672 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PENGINAPAN | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T3 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | I | I | I | T3 | T3 | X | X | I |
| 673 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HIBURAN DAN OLAHRAGA | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | T2, B1 | I | X | T2, B1, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | X | X | X | X | I |
| 674 | KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG LAINNYA | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | I | T2, B1 | T2, B1, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I |
| 675 | KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T1, B2 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | I | I | I | X | X | X | X | I |
| 676 | KONSTRUKSI JALAN PADA PERMUKAAN TANAH | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 677 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, *FLY OVER*, DAN *UNDERPASS* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 678 | KONSTRUKSI JALAN REL | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 679 | KONSTRUKSI TEROWONGAN | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 680 | KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 681 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 682 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I |
| 683 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 684 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 685 | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 |
| 686 | KONSTRUKSI PENGEBORAN/PENGGALIAN AIR TANAH | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | T3, B1 | I |
| 687 | KONSTRUKSI PROYEK UTILITAS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I |
| 688 | KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR | I | I | I | I | I | X | I | X | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 689 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | T1 | T1 | T1 | X | T2 | X | X | X |
| 690 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X |
| 691 | KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR | B3 | X | X | X | X | X | X | B1 | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | T2 | X | X | B1 |
| 692 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PELINDUNG PANTAI | B1 | B1 | X | B1 | X | X | B1 | X | X | X | B1 | X | X | X | X | X | X | B1 | X | X | X | X | B1 | X | B1 |
| 693 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA PERAIRAN DAN SEJENIS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | T1 | T1 | T1 | T1 | T3 | T3 | T3 | T3 | T2 | X | X | B1 |
| 694 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I |
| 695 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I |
| 696 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X |
| 697 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAHRAGA | X | T3 | T3 | T3 | T3 | X | T3 | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 698 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN | X | T3 | T3 | T3 | T3 | X | T3 | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 699 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN BANDAR ANTARIKSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B2 | B1, B3 | X | X | B1, B3 | X | X | X | X | X | B1, B3 | X |
| 700 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | B1 | X | X | B1 | B1 | X | B1 | X | X | X | B1 | X | X | X | I |
| 701 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL REAKTOR NUKLIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | B1 | X | X | B1 | B1 | X | B1 | X | X | X | B1 | X | X | X | I |
| 702 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | T3 | T1 | T1 | T1 | T1 | T3 | T3 | T3 | T3 | T2 | X | X | B1 |
| 703 | PEMBONGKARAN | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 |
| 704 | PENYIAPAN LAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 705 | PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 706 | PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 707 | PEMASANGAN SISTEM ELEKTRONIKA | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 708 | PEMASANGAN SISTEM NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA | B3 | X | X | X | X | X | X | I | X | X | I | X | I | X | X | X | I | I | I | I | X | T2 | X | I | I |
| 709 | PEMASANGAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 710 | PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN BERBASIS LISTRIK | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 711 | PEMASANGAN SALURAN AIR (PLUMBING) | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 712 | PEMASANGAN SISTEM PEMANAS DAN GEOTERMAL | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 713 | PEMASANGAN JARINGAN PENYALURAN GAS | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X |
| 714 | PEMASANGAN PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 715 | PEMASANGAN PERLENGKAPAN MEKANIKAL BANGUNAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 716 | PEMASANGAN KONSTRUKSI LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 717 | PEMASANGAN KACA, PINTU, KUSEN, JENDELA, DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 718 | PENGERJAAN LANTAI, DINDING, DAN PLAFON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 719 | PENGECATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 720 | PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA | X | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 721 | JASA INTERMEDIASI KONSTRUKSI KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X |
| 722 | PEMASANGAN DAN REKAYASA STRUKTUR BANGUNAN | X | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 723 | PEMASANGAN PERANCAH (*STEGER*) | X | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 724 | PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/*ROOF COVERING* | X | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X |
| 725 | PEMASANGAN KERANGKA BAJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X |
| 726 | PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X |
| 727 | KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| G | **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | PERDAGANGAN BESAR KONTRAK ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 729 | PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 730 | PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 731 | PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 732 | PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 733 | PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 734 | PERDAGANGAN BESAR IKAN DAN BIOTA AIR HIDUP LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 735 | PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 736 | PERDAGANGAN BESAR KULIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 737 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 738 | PERDAGANGAN BESAR BERAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 739 | PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 740 | PERDAGANGAN BESAR SAYURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 741 | PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH, DAN KAKAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 742 | PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 743 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 744 | PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 745 | PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 746 | PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 747 | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN DAN OLAHAN TERKAIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 748 | PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 749 | PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 750 | PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 751 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 752 | PERDAGANGAN BESAR GULA, COKELAT, DAN KEMBANG GULA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 753 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK BAKERI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 754 | PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 755 | PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NONALKOHOL BUKAN SUSU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 756 | PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 757 | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 758 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 759 | PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 760 | PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 761 | PERDAGANGAN BESAR BARANG JADI TEKSTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 762 | PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN JAHIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 763 | PERDAGANGAN BESAR FURNITUR, KARPET, PERLENGKAPAN PENCAHAYAAN UNTUK RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, DAN PERTOKOAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 764 | PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 765 | PERDAGANGAN BESAR SEDIAAN FARMASI UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 766 | PERDAGANGAN BESAR SEDIAAN FARMASI UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 767 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 768 | PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 769 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN MASAK, PERALATAN DAPUR, DAN ELEKTRONIK RUMAH TANGGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 770 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 771 | PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 772 | PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 773 | PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 774 | PERDAGANGAN BESAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL, DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 775 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 776 | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 777 | PERDAGANGAN BESAR PERANGKAT LUNAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 778 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 779 | PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, SERTA CD DAN DVD KOSONG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 780 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 781 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 782 | PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 783 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 784 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 785 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 786 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 787 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 788 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 789 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 790 | PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 791 | PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 792 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 793 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS BESERTA PRODUK TERKAIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 794 | PERDAGANGAN BESAR BIJIH DAN KONSENTRAT LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 795 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK LOGAM SETENGAH JADI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 796 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 797 | PERDAGANGAN BESAR KACA LEMBARAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 798 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN, ATAU KACA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 799 | PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR, DAN BATU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 800 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 801 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 802 | PERDAGANGAN BESAR CAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 803 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 804 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI, PERKAKAS, PERLENGKAPAN PERPIPAAN, DAN PERALATAN PEMANAS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 805 | PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 806 | PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 807 | PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 808 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 809 | PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 810 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA (B2) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | B3 | X |
| 811 | PERDAGANGAN BESAR ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 812 | PERDAGANGAN BESAR ALAT KESEHATAN UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 813 | PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 814 | PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 815 | PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 816 | PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SKRAP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 817 | PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 818 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG DI GROSIR/PERKULAKAN SWALAYAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 819 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG SELAIN DI GROSIR/PERKULAKAN SWALAYAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | T2, T4, B2 | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 820 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DENGAN SISTEM SWALAYAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 821 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU SELAIN DENGAN SISTEM SWALAYAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 822 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DENGAN SISTEM SWALAYAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 823 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU SELAIN DENGAN SISTEM SWALAYAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 824 | PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | T3, B2 | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 825 | PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 826 | PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 827 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 828 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 829 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 830 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 831 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 832 | PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL | X | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 833 | PERDAGANGAN ECERAN ROKOK DAN TEMBAKAU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 834 | PERDAGANGAN ECERAN BERAS | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 835 | PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 836 | PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH, DAN SEJENISNYA | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 837 | PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO, DAN ONCOM | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 838 | PERDAGANGAN ECERAN DAGING OLAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 839 | PERDAGANGAN ECERAN IKAN OLAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 840 | PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 841 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 842 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 843 | PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 844 | PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 845 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PRODUK GIM VIDEO SERTA SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 846 | PERDAGANGAN ECERAN PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 847 | PERDAGANGAN ECERAN TELEPON BESERTA AKSESORISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 848 | PERDAGANGAN ECERAN MESIN DAN PERALATAN KANTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 849 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN AUDIO DAN VIDEO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 850 | PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 851 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 852 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 853 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN MATERIAL KONSTRUKSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 854 | PERDAGANGAN ECERAN KACA LEMBARAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 855 | PERDAGANGAN ECERAN PERKAKAS DAN PERALATAN PERTUKANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 856 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN KESELAMATAN DAN GAWAT DARURAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 857 | PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAKERI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 858 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN-BAHAN ENERGI TERBARUKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 859 | PERDAGANGAN ECERAN KARPET, PERMADANI, SERTA PENUTUP DINDING DAN LANTAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 860 | PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 861 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN, DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 862 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH; PERLENGKAPAN DAPUR DAN MAKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 863 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 864 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 865 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 866 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 867 | PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON, DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 868 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 869 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT PERMAINAN DAN MAINAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 870 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG KESENIAN DAN REKREASI YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 871 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 872 | PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL, DAN ALAS KAKI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 873 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PAKAIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 874 | PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL, DAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 875 | PERDAGANGAN ECERAN SEDIAAN FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 876 | PERDAGANGAN ECERAN SEDIAAN FARMASI UNTUK MANUSIA SELAIN DI APOTEK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 877 | PERDAGANGAN ECERAN OBAT BAHAN ALAM UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 878 | PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 879 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 880 | PERDAGANGAN ECERAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 881 | PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 882 | PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 883 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKUFARMASI DAN ALAT KESEHATAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 884 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 885 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 886 | PERDAGANGAN ECERAN KACAMATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 887 | PERDAGANGAN ECERAN JAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 888 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 889 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 890 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI, DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 891 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 892 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 893 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITER BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 894 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 895 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 896 | PERDAGANGAN ECERAN HEWAN KESAYANGAN (*PET ANIMALS*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 897 | PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK DAN BIBIT HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 898 | PERDAGANGAN ECERAN IKAN DAN BIOTA AIR HIDUP LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 899 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN KESAYANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 900 | PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 901 | PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN SELAIN TANAMAN KEHUTANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 902 | PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 903 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 904 | PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN KEHUTANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 905 | PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 906 | PERDAGANGAN ECERAN GAS TABUNG LPG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 907 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 908 | PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ASIRI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 909 | PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ASIRI), DAN BAHAN BAKAR SELAIN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 910 | PERDAGANGAN ECERAN CENDERA MATA, KERAJINAN, DAN BARANG-BARANG KEAGAMAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 911 | PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 912 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MESIN DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 913 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 914 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 915 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 916 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 917 | PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 918 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BARU LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 919 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 920 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 921 | PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 922 | PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 923 | PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 924 | PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 925 | PLATFORM DIGITAL INTERMEDIASI PERDAGANGAN ECERAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 926 | JASA INTERMEDIASI PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| H | TRANSPORTASI DAN PENYIMPANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 | ANGKUTAN KERETA WISATA ANTARKOTA | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | B3 | X | X |
| 928 | TRANSPORTASI KERETA API ANTARKOTA LAINNYA UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | B3 | X | X |
| 929 | TRANSPORTASI KERETA API UNTUK BARANG | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 930 | ANGKUTAN KERETA WISATA DALAM KOTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 931 | ANGKUTAN KERETA API PERKOTAAN | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 |
| 932 | ANGKUTAN PERKOTAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 933 | ANGKUTAN PERDESAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 934 | TRANSPORTASI DARAT DALAM KOTA LAINNYA UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 935 | ANGKUTAN ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 936 | ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 937 | ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 938 | TRANSPORTASI ANTARKOTA LAINNYA UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 939 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 940 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | I |
| 941 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 942 | ANGKUTAN KERETA API LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 943 | ANGKUTAN PARIWISATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 944 | ANGKUTAN TAKSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 945 | ANGKUTAN KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 946 | ANGKUTAN SEWA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 947 | ANGKUTAN OJEK MOTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 948 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 949 | TRANSPORTASI DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X |
| 950 | TRANSPORTASI MELALUI SALURAN PIPA | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 |
| 951 | ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 952 | ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 953 | ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 954 | ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 955 | ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 956 | ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 957 | ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 958 | ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 959 | ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT UNTUK BARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 960 | ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 961 | ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 962 | ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT UNTUK BARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 963 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 964 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 965 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 966 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 967 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 968 | TRANSPORTASI PESISIR LAINNYA UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 969 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 970 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 971 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 972 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 973 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 974 | TRANSPORTASI PESISIR LAINNYA UNTUK BARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 975 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 976 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 977 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 978 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 979 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 980 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 981 | ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 982 | ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL UNTUK PENUMPANG | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X |
| 983 | TRANSPORTASI ANTARIKSA UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 984 | ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL KHUSUS KARGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 985 | ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL KHUSUS KARGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 986 | TRANSPORTASI ANTARIKSA UNTUK BARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 987 | PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 988 | AKTIVITAS GUDANG DINGIN | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 989 | AKTIVITAS GUDANG BERIKAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 990 | PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 991 | AKTIVITAS PENYIMPANAN BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | X |
| 992 | FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 993 | PENYIMPANAN MINERAL IKUTAN RADIOAKTIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X |
| 994 | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 995 | AKTIVITAS TERMINAL DARAT | X | X | X | X | X | X | B1, B2 | X | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | B1, B2 | X | X | B1, B2 | X |
| 996 | AKTIVITAS PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B2 | X | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | X | X | B1, B2 | X |
| 997 | AKTIVITAS JALAN TOL | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 | B1, B3 |
| 998 | AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING) | X | X | X | X | X | X | X | T1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 999 | AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING) | X | T1, B3 | T1, B3 | X | X | X | X | X | X | B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | T1, B3 | X | X | X | X |
| 1000 | AKTIVITAS JASA TERKAIT TRANSPORTASI DARAT LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | B2 | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | B2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1001 | AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1002 | AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1003 | AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1004 | AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1005 | AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1006 | AKTIVITAS AKTIVITAS PENYELAMATAN KAPAL DAN MUATANNYA | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1007 | ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1008 | AKTIVITAS JASA TERKAIT TRANSPORTASI PERAIRAN LAINNYA | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1009 | AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1010 | JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1011 | PELAYANAN PENUMPANG, BAGASI, KARGO, POS, DAN TEKNIS PENANGANAN UDARA DI DARAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1012 | AKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN MUATAN PENERBANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1013 | AKTIVITAS JASA TERKAIT ANGKUTAN UDARA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1014 | PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1015 | ANGKUTAN MULTIMODA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4, B2 | T4, B2 | T4, B2 | T4, B2 | X | X | X | I | I | I | T4, B2 | X | X | X | X |
| 1016 | AKTIVITAS TALLY MANDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1017 | AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL | B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1018 | JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) | B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1019 | JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1020 | AKTIVITAS PERWAKILAN OPERASIONAL TRANSPORTASI UDARA KHUSUS KARGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1021 | JASA INTERMEDIASI TRANSPORTASI LAINNYA UNTUK BARANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1022 | AGEN PENJUALAN TIKET TRANSPORTASI | B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1023 | AGEN PENGURUS PERSETUJUAN TERBANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1024 | AKTIVITAS PERWAKILAN OPERASIONAL TRANSPORTASI UDARA UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1025 | JASA INTERMEDIASI TRANSPORTASI LAINNYA UNTUK PENUMPANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1026 | AKTIVITAS POS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1027 | AKTIVITAS KURIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1028 | AKTIVITAS JASA PORTAL INTERMEDIASI POS DAN KURIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1029 | JASA INTERMEDIASI POS DAN KURIR LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| I | **AKTIVITAS PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | AKTIVITAS HOTEL BINTANG LIMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1031 | AKTIVITAS HOTEL BINTANG EMPAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1032 | AKTIVITAS HOTEL BINTANG TIGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1033 | AKTIVITAS HOTEL BINTANG DUA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1034 | AKTIVITAS HOTEL BINTANG SATU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1035 | AKTIVITAS HOTEL NONBINTANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1036 | AKTIVITAS RUMAH TINGGAL SEWA (HOMESTAY) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1037 | AKTIVITAS HOSTEL REMAJA (YOUTH HOSTEL) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1038 | AKTIVITAS VILA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1039 | AKTIVITAS APARTEMEN HOTEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B1, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1040 | AKTIVITAS PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1041 | AKTIVITAS PENYEDIAAN BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN, DAN TAMAN KARAVAN | X | T3, B1, B3 | X | X | X | X | X | X | T3, B1, B3 | I | X | X | T3, B1, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1042 | AKTIVITAS JASA INTERMEDIASI AKOMODASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1043 | AKTIVITAS JASA MANAJEMEN AKOMODASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1044 | PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1045 | AKTIVITAS PENYEDIAAN MAKANAN DI BANGUNAN TETAP | X | T4, B3 | X | X | X | T2 | X | X | X | T1, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1046 | AKTIVITAS PENYEDIAAN MAKANAN DI BANGUNAN TIDAK TETAP | X | T2, T3, B3 | T2, T3, B3 | T2, T3, B3 | T2, T3, B3 | T2, T3, B3 | X | X | X | T1, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1047 | AKTIVITAS JASA BOGA UNTUK ACARA TERTENTU (*EVENT CATERING*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1048 | AKTIVITAS PENYEDIAAN JASA BOGA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1049 | AKTIVITAS BAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1050 | AKTIVITAS KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1051 | AKTIVITAS RUMAH MINUM/KAFE | X | T4, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | T2 | X | X | X | X |
| 1052 | AKTIVITAS KEDAI MINUMAN | X | T4, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | I | I | I | T1 | X | X | X | X |
| 1053 | AKTIVITAS RUMAH/KEDAI OBAT BAHAN ALAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | T2 | X | X | X | X |
| 1054 | AKTIVITAS PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPATTIDAK TETAP | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | I | I | I | T1 | X | X | X | X |
| 1055 | AKTIVITAS JASA INTERMEDIASI PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | X | X | X | X |
| J | **AKTIVITAS PENERBITAN, PENYIARAN, SERTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | PENERBITAN BUKU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1057 | PENERBITAN SURAT KABAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1058 | PENERBITAN JURNAL DAN TERBITAN BERKALA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1059 | AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1060 | PENERBITAN PERANGKAT LUNAK VIDEO GIM DALAM JARINGAN (*GAME ONLINE*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1061 | PENERBITAN PERANGKAT LUNAK VIDEO GIM LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1062 | PENERBITAN PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE*) LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1063 | AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1064 | AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1065 | AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1066 | AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1067 | AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1068 | AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO. DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1069 | AKTIVITAS PEMUTARAN FILM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1070 | AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1071 | AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1072 | AKTIVITAS PENYIARAN RADIO ANALOG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1073 | AKTIVITAS PENYIARAN RADIO DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1074 | AKTIVITAS DISTRIBUSI DAN STREAMING AUDIO ATAS PERMINTAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1075 | AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI ANALOG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1076 | AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1077 | AKTIVITAS DISTRIBUSI DAN STREAMING VIDEO ATAS PERMINTAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1078 | AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1079 | AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1080 | AKTIVITAS SITUS JEJARING SOSIAL DAN DISTRIBUSI KONTEN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| K | **AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI, PEMROGRAMAN KOMPUTER, KONSULTANSI, INFRASTRUKTUR KOMPUTASI, DAN JASA INFORMASI LAINNYA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 |
| 1082 | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN NIRKABEL | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 |
| 1083 | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN SATELIT | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 |
| 1084 | AKTIVITAS JASA AKSES INTERNET (*INTERNET SERVICE PROVIDER*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | T3, B1 | X |
| 1085 | AKTIVITAS JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | T3, B1 | X |
| 1086 | AKTIVITIAS JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | T3, B1 | X |
| 1087 | AKTIVITAS JASA GERBANG AKSES INTERNET *(NETWORK ACCESS POINT*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | T3, B1 | X |
| 1088 | AKTIVITAS JASA TELEPONI DASAR | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 |
| 1089 | AKTIVITAS PENJUALAN KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X |
| 1090 | AKTIVITAS PENJUALAN KEMBALI DAN JASA INTERMEDIASI UNTUK TELEKOMUNIKASI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1091 | AKTIVITAS JASA PANGGILAN PREMIUM (*PREMIUM CALL*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1092 | AKTIVITAS JASA KONTEN SMS PREMIUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1093 | AKTIVITAS JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1094 | AKTIVITAS JASA PANGGILAN TERKELOA (CALLING CARD) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1095 | AKTIVITAS JASA TELEKOMUNIKASI KHUSUS BERBASIS SATELIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1096 | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1097 | PENGEMBANGAN VIDEO GIM, PERANGKAT LUNAK VIDEO GIM, DAN PERANGKAT LUNAK PENDUKUNGNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1098 | AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1099 | AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PRODUKSI KONTEN BERBASIS MEDIA IMERSIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1100 | AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI BLOCKCHAIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1101 | AKTIVITAS PENGEMBANGAN KOMPONEN DASAR KECERDASAN BUATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1102 | AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1103 | AKTIVITAS KONSULTANSI DAN MANAJEMEN KEAMANAN SIBER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1104 | AKTIVITAS PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN IDENTITAS DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1105 | AKTIVITAS PENYEDIAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN JASA TERKAIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1106 | AKTIVITAS KONSULTANSI DAN PERANCANGAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1107 | AKTIVITAS KONSULTANSI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1108 | AKTIVITAS JASA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1109 | AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1110 | AKTIVITAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KOMPUTASI, HOSTING, DAN AKTIVITAS TERKAIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| 1111 | AKTIVITAS JASA PORTAL PENCARIAN WEB DAN INFORMASI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | T1, T3, B1 | X | X | X | X | T3, B1 | T3, B1 | T3, B1 | X | X | X | X | X |
| **L** | **AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | AKTIVITAS BANK SENTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1113 | PERBANKAN UMUM KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1114 | PERBANKAN UMUM SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1115 | PERBANKAN KONVENSIONAL LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1116 | PERBANKAN SYARIAH LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1117 | AKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT OLEH KOPERASI KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1118 | AKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT OLEH KOPERASI SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1119 | PEMBIAYAAN MIKRO KONVENSIONAL NONPERBANKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1120 | PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH NONPERBANKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1121 | PERANTARA MONETER LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1122 | AKTIVITAS PERUSAHAAN INDUK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1123 | AKTIVITAS PEMBIAYAAN CONDUIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1124 | AKTIVITAS DANA PASAR UANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1125 | AKTIVITAS DANA INVESTASI BUKAN PASAR UANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1126 | AKTIVITAS TRUST, WARISAN, DAN KEAGENAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1127 | AKTIVITAS SEWA GUNA USAHA FINANSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1128 | AKTIVITAS PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1129 | AKTIVITAS ANJAK PIUTANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1130 | AKTIVITAS SEKURITISASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1131 | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1132 | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1133 | AKTIVITAS GADAI KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1134 | AKTIVITAS GADAI SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1135 | PENGELOLAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1136 | AKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1137 | AKTIVITAS MODAL VENTURA KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1138 | AKTIVITAS MODAL VENTURA SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1139 | AKTIVITAS *COUNTERPARTY* UNTUK KLIRING DAN SETELMEN TRANSAKSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1140 | PERDAGANGAN DI PASAR KEUANGAN ATAS NAMA SENDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1141 | PERDAGANGAN UNIT KARBON ATAS NAMA SENDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1142 | AKTIVITAS PERBANKAN BULION KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1143 | AKTIVITAS PERBANKAN BULION SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkuntoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1144 | AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1145 | ASURANSI JIWA KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1146 | ASURANSI JIWA SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1147 | ASURANSI UMUM KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1148 | ASURANSI UMUM SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1149 | AKTIVITAS PENJAMINAN SIMPANAN DAN ASURANSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1150 | PENJAMINAN KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1151 | PENJAMINAN SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1152 | REASURANSI KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1153 | REASURANSI SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1154 | PENJAMINAN ULANG KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1155 | PENJAMINAN ULANG SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1156 | AKTIVITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1157 | AKTIVITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1158 | AKTIVITAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1159 | AKTIVITAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1160 | PENYELENGGARAAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1161 | BURSA BERJANGKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1162 | PENYELENGGARAAN BURSA ASET KEUANGAN DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1163 | PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KONTRAK DERIVATIF DI PASAR ALTERNATIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1164 | PENYELENGGARAAN SARANA TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1165 | AKTIVITAS PENGAWASAN JASA KEUANGAN SELAIN ASURANSI DAN DANA PENSIUN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1166 | AKTIVITAS REGULATOR MANDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1167 | ADMINISTRASI PASAR KEUANGAN, PASAR BERJANGKA KOMODITAS, DAN PASAR SEJENISNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1168 | KEPIALANGAN EFEK SELAIN UNIT KARBON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1169 | KEPIALANGAN PERDAGANGAN KOMODITAS BERJANGKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1170 | KEPIALANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1171 | KEPIALANGAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1172 | AKTIVITAS PENUKARAN VALUTA ASING (*MONEY CHANGER*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1173 | PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*SECURITIES CROWDFUNDING*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1174 | KEPIALANGAN UNIT KARBON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1175 | KEPIALANGAN EFEK DAN KONTRAK KOMODITAS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1176 | KLIRING DAN SETELMEN TRANSAKSI DI PASAR KEUANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1177 | AKTIVITAS PENYIMPANAN ASET KEUANGAN DAN KONTRAK KOMODITAS BERJANGKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1178 | AKTIVITAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN EFEK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1179 | PENYEDIAAN JASA PEMBAYARAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1180 | PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1181 | PENYELENGGARAAN PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1182 | AKTIVITAS JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1183 | PENYELENGGARAAN TRANSAKSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH LAINNYA SELAIN PASAR KEUANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1184 | AKTIVITAS ADVISORI INVESTASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1185 | AKTIVITAS ADVISORI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1186 | AKTIVITAS ADVISORI SYARIAH PASAR MODAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1187 | AKTIVITAS ADVISORI PASAR KEUANGAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1188 | JASA INTERMEDIASI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KONVENSIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1189 | JASA INTERMEDIASI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SYARIAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1190 | AKTIVITAS PENDANAAN UNTUK TRANSAKSI EFEK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1191 | PENITIPAN DAN PENGELOLAAN BERDASARKAN PERJANJIAN TRUST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1192 | PEMERINGKATAN EFEK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1193 | PENILAIAN HARGA EFEK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1194 | PENYELENGGARAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1195 | PENJAMINAN EMISI EFEK (*UNDERWRITER*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1196 | AKTIVITAS PENDUKUNG DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1197 | PEMERINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1198 | AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1199 | AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1200 | AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1201 | AKTIVITAS AGEN ASURANSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1202 | AKTIVITAS PIALANG ASURANSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1203 | AKTIVITAS PIALANG REASURANSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1204 | AKTIVITAS AGEN PENJAMINAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1205 | AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1206 | AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1207 | AKTIVITAS ADVISORI AKTUARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1208 | AKTIVITAS PENGAWASAN JASA KEUANGAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1209 | AKTIVITAS PENUNJANG LAINNYA UNTUK ASURANSI, PENJAMIAN, DAN DANA PENSIUN YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1210 | MANAJEMEN INVESTASI KONVENSIONAL DI PASAR KEUANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1211 | MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH DI PASAR KEUANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1212 | MANAJEMEN INVESTASI DI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1213 | AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| M | **AKTIVITAS REAL ESTAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | AKTIVITAS PENGEMBANGAN BANGUNAN DAN LAHAN HUNIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | T2 | T2 | T2 | T2 | I | I | I | T2 | X | X | X | X |
| 1215 | AKTIVITAS PENYEWAAN BANGUNAN DAN LAHAN HUNIAN MILIK SENDIRI ATAU SEWA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | T2 | T2 | T2 | T2 | I | I | I | T2 | X | X | X | X |
| 1216 | PENGELOLAAN KAWASAN PARIWISATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T2 | T2 | T2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1217 | PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1218 | PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1219 | PENYEWAAN TEMPAT PENYELENGGARAAN AKTIVITAS PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN, SERTA ACARA KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2, B3 | X | X | X | I | I | I | T3, B2, B3 | X | X | X | X |
| 1220 | PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1221 | PENYEWAAN GUDANG DAN FASILITAS PENYIMPANAN MANDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2, B3 | T3, B2, B3 | T3, B2, B3 | X | X | X | X | X |
| 1222 | PENGELOLAAN GEDUNG PERKANTORAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1223 | AKTIVITAS REAL ESTAT (BANGUNAN DAN LAHAN) NONHUNIAN LAINNYA MILIK SENDIRI ATAU SEWA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | X | X | I | I | I | T3, B2 | X | X | X | X |
| 1224 | AKTIVITAS JASA INTERMEDIASI REAL ESTAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1225 | JASA PENAKSIR REAL ESTAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1226 | PENGELOLAAN REAL ESTAT HUNIAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1227 | AKTIVITAS REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| N | **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | AKTIVITAS PENGACARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1229 | AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1230 | AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1231 | AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1232 | AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN, DAN PEMERIKSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1233 | AKTIVITAS KONSULTANSI PAJAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1234 | AKTIVITAS KANTOR PUSAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1235 | AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN DAN BISNIS PARIWISATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1236 | AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN DAN BISNIS INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1237 | AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN DAN BISNIS PERDAGANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1238 | AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN DAN BISNIS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1239 | AKTIVITAS ARSITEKTURAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1240 | AKTIVITAS PERANCANGAN DAN KONSULTANSI TEKNIS PABRIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | B1 |
| 1241 | AKTIVITAS ENJINERING DAN KONSULTANSI TEKNIS TERKAIT LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1242 | JASA SERTIFIKASI TEKNIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1243 | JASA INSPEKSI TEKNIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | I |
| 1244 | JASA VERIFIKASI DAN VALIDASI TEKNIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | I |
| 1245 | JASA PENGUJIAN TEKNIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | I |
| 1246 | PENGUJIAN DAN ANALISIS TEKNIS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | X | I | X | I | I | I | X | X | X | X | I |
| 1247 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU ALAM | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | X | X | B1 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | X | I | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1248 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENJINERING DAN TEKNOLOGI | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | X | X | B1 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkuntoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1249 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | X | I | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1250 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | X | X | B1 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1251 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN DAN KEDOKTERAN HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | X | I | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1252 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN | B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | X | I | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1253 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKSPERIMENTAL ILMU ALAM DAN ENJINERING LAINNYA | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | X | X | B1 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | X | I | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1254 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | X | I | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1255 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | X | I | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1256 | AKTIVITAS PERIKLANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 | X | T3, B3 | T3, B3 | T3, B3 |
| 1257 | PENELITIAN PASAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1258 | JAJAK PENDAPAT OPINI PUBLIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1259 | AKTIVITAS KEHUMASAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1260 | AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1261 | AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1262 | AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, MODE/FESYEN, DAN GARMEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1263 | AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1264 | AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1265 | AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1266 | AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK, DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1267 | AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1268 | AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1269 | AKTIVITAS DESAIN INTERIOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1270 | AKTIVITAS DESAIN GRAFIS/KOMUNIKASI VISUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1271 | AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TELEVISI, ANIMASI DAN KOMIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1272 | AKTIVITAS DESAIN KONTEN GIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1273 | AKTIVITAS DESAIN KHUSUS LAINYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1274 | AKTIVITAS FOTOGRAFI UDARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1275 | AKTIVITAS FOTOGRAFI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1276 | AKTIVITAS PENERJEMAH DAN INTERPRETER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1277 | AKTIVITAS BROKER DAN LAYANAN PEMASARAN PATEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1278 | JASA METEOROLOGI DAN PRAKIRAAN CUACA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1279 | SEMUA AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS YTDL LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1280 | AKTIVITAS PERSONEL KESEHATAN HEWAN MANDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1281 | AKTIVITAS PENGELOLAAN SARANA KESEHATAN HEWAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1282 | AKTIVITAS PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| O | **AKTIVITAS ADMINISTRATIF DAN PENUNJANG USAHA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA KENDARAAN BERMOTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1284 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA | X | B2, B3 | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1285 | PENYEWAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ACARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1286 | PENYEWAAN ALAT MUSIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1287 | PENYEWAAN BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1288 | PENYEWAAN BUNGA DAN TANAMAN HIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1289 | PENYEWAAN BARANG PRIBADI DAN BARANG RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1290 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1291 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA ALAT TRANSPORTASI AIR | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1292 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA ALAT TRANSPORTASI UDARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1293 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1294 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA MESIN DAN ALAT PERTANIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1295 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1296 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA MESIN DAN PERALATAN KANTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1297 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA MESIN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1298 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA MESIN DAN PERALATAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1299 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA MESIN DAN PERALATAN RADIASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1300 | PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1301 | SEWA GUNA USAHA KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PRODUK SEJENIS, BUKAN KARYA BERHAK CIPTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1302 | AKTIVITAS JASA INTERMEDIASI UNTUK PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA MOBIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1303 | AKTIVITAS JASA INTERMEDIASI UNTUK PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA BARANG BERWUJUD DAN ASET TAK BERWUJUD NONFINANSIAL LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1304 | AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA UNTUK USAHA DI DALAM NEGERI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1305 | AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1306 | AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA UNTUK RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DI DALAM NEGERI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1307 | AKTIVITAS PENEMPATAN AWAK KAPAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1308 | AKTIVITAS PENYEDIAAN INFORMASI LOWONGAN KERJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1309 | AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1310 | AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA SEMENTARA DAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1311 | AKTIVITAS AGEN PERJALANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1312 | AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1313 | AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN HAJI KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1314 | AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1315 | JASA INFORMASI PARIWISATA | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1316 | JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1317 | JASA PRAMUWISATA | X | B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1318 | AKTIVITAS TERKAIT PERJALANAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1319 | AKTIVITAS INVESTIGASI DAN KEAMANAN SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1320 | AKTIVITAS KEAMANAN YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1321 | AKTIVITAS PENYEDIAAN GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1322 | AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | B2, B3 | B2, B3 |
| 1323 | AKTIVITAS KEBERSIHAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 |
| 1324 | AKTIVITAS JASA LANSKAP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1325 | AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | B2 | B2 | B2 | B2, B3 | X | X | B2, B3 | B2, B3 |
| 1326 | AKTIVITAS PUSAT PANGGILAN (CALL CENTER) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1327 | PENYELENGGARAAN KONVENSI DAN PAMERAN BISNIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1328 | JASA INTERMEDIASI UNTUK AKTIVITAS PENUNJANG USAHA YTDL SELAIN INTERMEDIASI FINANSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1329 | AKTIVITAS AGEN PENAGIHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1330 | AKTIVITAS BIRO KREDIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1331 | AKTIVITAS PENGEPAKAN BAHAN DAN PRODUK HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1332 | AKTIVITAS PENGEPAKAN BAHAN DAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1333 | AKTIVITAS PENGEPAKAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1334 | AKTIVITAS PENGEPAKAN BAHAN DAN PRODUK KIMIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1335 | AKTIVITAS PENGEPAKAN BAHAN DAN PRODUK FARMASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1336 | AKTIVITAS PENGEPAKAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1337 | AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| P | **ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN, SERTA JAMINAN SOSIAL WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | LEMBAGA LEGISLATIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1339 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1340 | LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN, DAN BEA CUKAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1341 | LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1342 | LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN DENGAN TUGAS KHUSUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1343 | KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1344 | ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1345 | ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1346 | ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1347 | ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1348 | ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1349 | ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/OLAHRAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkuntoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1350 | ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN KEBUDAYAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1351 | ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | T2, B2 | X | X | X |
| 1352 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1353 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR, DAN GAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | I |
| 1354 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1355 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1356 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1357 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1358 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1359 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1360 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1361 | HUBUNGAN LUAR NEGERI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | T2, B2 | X |
| 1362 | LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | X |
| 1363 | ANGKATAN DARAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | X |
| 1364 | ANGKATAN UDARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | X |
| 1365 | ANGKATAN LAUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | X |
| 1366 | KEPOLISIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | X |
| 1367 | PERTAHANAN SIPIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | X |
| 1368 | AKTIVITAS LEMBAGA PERADILAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | X |
| 1369 | KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN | X | T2, B2 | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | T2, B2 | X | I | X |
| 1370 | AKTIVITAS JAMINAN SOSIAL WAJIB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| Q | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK UMUM PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1372 | PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK UMUM SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1373 | PENDIDIKAN PRASEKOLAH KEAGAMAAN ISLAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1374 | PENDIDIKAN PRASEKOLAH KEAGAMAAN PROTESTAN, KATOLIK, HINDU, BUDDHA, ATAU KONGHUCU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1375 | PENDIDIKAN DASAR UMUM PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1376 | PENDIDIKAN DASAR UMUM SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1377 | PENDIDIKAN DASAR KEAGAMAAN ISLAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1378 | PENDIDIKAN DASAR KEAGAMAAN PROTESTAN, KATOLIK, HINDU, BUDDHA, ATAU KONGHUCU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1379 | PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA UMUM PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1380 | PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA UMUM SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1381 | PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA KEAGAMAAN ISLAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1382 | PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA KEAGAMAAN PROTESTAN, KATOLIK, HINDU, BUDDHA, ATAU KONGHUCU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1383 | PENDIDIKAN MENENGAH ATAS UMUM PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1384 | PENDIDIKAN MENENGAH ATAS UMUM SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1385 | PENDIDIKAN MENENGAH ATAS KEAGAMAAN ISLAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1386 | PENDIDIKAN MENENGAH ATAS KEAGAMAAN PROTESTAN, KATOLIK, HINDU, BUDDHA, ATAU KONGHUCU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1387 | PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN UMUM PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1388 | PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN UMUM SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1389 | PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEAGAMAAN ISLAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1390 | PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEAGAMAAN PROTESTAN, KATOLIK, HINDU, BUDDHA, ATAU KONGHUCU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1391 | PENDIDIKAN PASCAMENENGAH NONTERSIER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1392 | PENDIDIKAN TINGGI UMUM PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1393 | PENDIDIKAN TINGGI UMUM SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1394 | PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1395 | PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1396 | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1397 | PENDIDIKAN KEBUDAYAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1398 | KEGIATAN SEKOLAH MENGEMUDI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1399 | PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1400 | PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NONFORMAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1401 | PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1402 | PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1403 | PELATIHAN KERJA PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1404 | PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1405 | PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1406 | PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1407 | PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1408 | PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1409 | PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1410 | PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1411 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENERBANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1412 | PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1413 | PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1414 | PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1415 | PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUSAHAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1416 | PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1417 | PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1418 | PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1419 | PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1420 | PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1421 | PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1422 | PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1423 | PENDIDIKAN BAHASA SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1424 | PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1425 | PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1426 | PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1427 | PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1428 | PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1429 | JASA PERANTARA KURSUS DAN TUTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1430 | AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI HASIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SENDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1431 | AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI HASIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MITRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1432 | AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI OLEH ASOSIASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1433 | AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI INDEPENDEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| 1434 | KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | T3, B2 | I | I | X | X | X | X | X |
| **R** | **AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1436 | AKTIVITAS PUSKESMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1437 | AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1438 | AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | X | B3 | X |
| 1439 | AKTIVITAS KLINIK SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | X | B3 | X |
| 1440 | AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1441 | AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1442 | AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1443 | AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1444 | AKTIVITAS JASA INTERMEDIASI UNTUK KESEHATAN MEDIS, KEDOKTERAN GIGI, DAN PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1445 | AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1446 | AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1447 | AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1448 | AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1449 | AKTIVITAS RUMAH PIJAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1450 | AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN BERBASIS RESIDENSIAL OLEH PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1451 | AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN BERBASIS RESIDENSIAL OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1452 | AKTIVITAS PERAWATANUNTUK ORANG YANG HIDUP DENGAN ATAU MEMILIKI DIAGNOSIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ATAU PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG BERBASIS RESIDENSIAL OLEH PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1453 | AKTIVITAS PERAWATAN UNTUK ORANG YANG HIDUP DENGAN ATAU MEMILIKI DIAGNOSIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ATAU PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG BERBASIS RESIDENSIAL OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1454 | AKTIVITAS PERAWATAN UNTUK LANJUT USIA ATAU PENYANDANG DISABILITAS FISIK BERBASIS RESIDENSIAL OLEH PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1455 | AKTIVITAS SOSIAL UNTUK LANJUT USIA ATAU PENYANDANG DISABILITAS FISIK OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1456 | AKTIVITAS PENGELOLAAN AKOMODASI WARGA LANJUT USIA (SENIOR LIVING) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1457 | JASA INTERMEDIASI UNTUK AKTIVITAS PERAWATAN BERBASIS RESIDENSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1458 | AKTIVITAS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK BERBASIS RESIDENSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1459 | AKTIVITAS PERAWATANUNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS RESIDENSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1460 | AKTIVITAS TUNASOSIAL BERBASIS RESIDENSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1461 | AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI UNTUK ORANG LANJUT USIA ATAU PENYANDANG DISABILITAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1462 | AKTIVITAS SOSIAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK ORANG LANJUT USIA ATAU PENYANDANG DISABILITAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1463 | AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1464 | AKTIVITAS SOSIAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1465 | AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA KEISLAMAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | B3 | X | X | X | X |
| 1466 | AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA NONISLAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | B3 | X | X | X | X |
| 1467 | AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | B3 | X | X | X | X |
| 1468 | PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | T3, B2 | X | X | X | X |
| 1469 | PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3, B2 | T3, B2 | T3, B2 | I | I | I | I | B2 | B2 | B2 | T3, B2 | X | X | X | X |
| S | **KESENIAN, OLAHRAGA, DAN REKREASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | AKTIVITAS PENCIPTAAN KARYA SASTRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1471 | AKTIVITAS PENCIPTAAN KOMPOSISI MUSIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1472 | AKTIVITAS JURNALIS BERITA INDEPENDEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1473 | AKTIVITAS PENCIPTAAN KARYA SENI RUPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1474 | AKTIVITAS PENCIPTAAN KARYA SENI LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | T1 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1475 | AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN | X | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1476 | AKTIVITAS OPERASIONAL TEMPAT DAN FASILITAS KESENIAN | X | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1477 | PENYELENGGARAAN KEGIATAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN | X | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1478 | AKTIVITAS PENUNJANG PENCIPTAAN KARYA SENI DAN SENI PERTUNJUKAN LAINNYA | X | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1479 | AKTIVITAS PERPUSTAKAAN PEMERINTAH | X | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1480 | AKTIVITAS PERPUSTAKAAN SWASTA | X | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1481 | AKTIVITAS KEARSIPAN PEMERINTAH | X | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1482 | AKTIVITAS KEARSIPAN SWASTA | X | B1, B3 | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1483 | MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1484 | MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1485 | AKTIVITAS SITUS BERSEJARAH DAN MONUMEN YANG DIKELOLA PEMERINTAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1486 | AKTIVITAS SITUS BERSEJARAH DAN MONUMEN YANG DIKELOLA SWASTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1487 | KONSERVASI, RESTORASI, DAN AKTIVITAS PENUNJANG LAINNYA UNTUK WARISAN BUDAYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | T1, B2 | X | X | X | X |
| 1488 | AKTIVITAS TAMAN BOTANI DAN KEBUN BINATANG | X | B1, B2, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1489 | SUAKA MARGASATWA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1490 | TAMAN NASIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1491 | HUTAN LINDUNG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1492 | TAMAN WISATA ALAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1493 | TAMAN HUTAN RAYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1494 | TAMAN LAUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1495 | AKTIVITAS CAGAR ALAM LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1496 | AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1497 | FASILITAS STADION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | I | I | I | I | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | X |
| 1498 | FASILITAS SIRKUIT | X | B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1, B3 | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | X |
| 1499 | FASILITAS GELANGGANG/ARENA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2, B2 | B1, B3 | X | X | X | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | X |
| 1500 | FASILITAS LAPANGAN | X | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | X |
| 1501 | FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | X |
| 1502 | FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | X |
| 1503 | PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | T2, B2 | T2, B2 | T2, B2 | X | X | X | X | X |
| 1504 | KLUB SEPAK BOLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1505 | KLUB GOLF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1506 | KLUB RENANG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1507 | KLUB TENIS LAPANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1508 | KLUB TINJU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1509 | KLUB BELA DIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1510 | KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BINARAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1511 | KLUB BOLING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1512 | KLUB OLAHRAGA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | B3 | X |
| 1513 | PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| 1514 | AKTIVITAS JURI DAN WASIT PROFESIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1515 | AKTIVITAS PERBURUAN DI KAWASAN BURU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1516 | BADAN REGULASI DAN LIGA OLAHRAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1517 | AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1518 | PENGELOLAAN FASILITAS PEMANCINGAN | T2, B1 | X | X | X | X | X | X | X | T2, B1 | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1519 | AKTIVITAS OLAHARAGAWAN/ATLET INDEPENDEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1520 | AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B3 | B3 | B3 | I | I | I | I | I | I | I | B3 | X | X | X | X |
| 1521 | AKTIVITAS TAMAN BERTEMA DAN TAMAN HIBURAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B2 | X | X | X | X | B2 | B2 | B2 | X | X | X | X | X |
| 1522 | AKTIVITAS LANTAI DANSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | X |
| 1523 | PENGELOLAAN FASILITAS KARAOKE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | X |
| 1524 | PENGELOLAAN ARENA PERMAINAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | X |
| 1525 | WISATA GUA, PEMANDIAN, DAN PETUALANGAN ALAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1526 | WISATA PANTAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1527 | WISATA AGRO | X | X | X | X | X | X | X | X | I | B1 | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | X |
| 1528 | WISATA TIRTA | B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | X |
| 1529 | AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B2, B3 | X | X | T1, T4, B2 | X | X | X | X | T1, B2 | T1, B2 | T1, B2 | X | X | X | X | X |
| T | **AKTIVITAS JASA LAINNYA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530 | AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1531 | AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1532 | AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1533 | AKTIVITAS ORGANISASI BURUH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1534 | AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1535 | AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1536 | AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | B2, B3 | X | X | X | X |
| 1537 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1538 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KOMUNIKASI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1539 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1540 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1541 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1542 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1543 | AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1544 | REPARASI DAN PEMELIHARAAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1545 | REPARASI MOBIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1546 | PENCUCIAN DAN SALON MOBIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B2 | T1, B1, B2 | T1, B1, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1547 | REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1548 | JASA INTERMEDIASI REPARASI DAN PERAWATAN KOMPUTER, BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA, MOBIL, SERTA SEPEDA MOTOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1549 | AKTIVITAS PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN PRODUK TEKSTIL DAN BULU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B2 | T1, T4, B2 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1550 | AKTIVITAS PENATAAN DAN PANGKAS RAMBUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B2 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1551 | AKTIVITAS PERAWATAN KECANTIKAN DAN PERAWATAN KECANTIKAN LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B2 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1552 | AKTIVITAS SANTE PAR AQUA (SPA) HARIAN, SAUNA, DAN PEMANDIAN UAP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1553 | AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN TERKAIT | X | T2 | T2 | T2 | T2 | I | X | X | X | X | T2, B3 | T2, B3 | T2, B3 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1554 | AKTIVITAS JASA INTERMEDIASI UNTUK JASA PERORANGAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| 1555 | AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T4 | T4 | T4 | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | X |
| U | **AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DAN AKTIVITAS PRODUKSI BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN SENDIRI YANG TIDAK TERDIFERENSIASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1556 | AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1557 | AKTIVITAS PRODUKSI BARANG OLEH RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN SENDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |
| 1558 | AKTIVITAS PRODUKSI BERAGAM JASA OLEH RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN SENDIRI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | T1, T4, B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | X | X |

| No. | KEGIATAN | Zona Lindung | | | | | | | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Peruntukan Lainnya |
| | | Badan Air | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Taman RT | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Holtikultura | Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan JasaSkala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Perkantoran | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan Keamanan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | | BA | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-2 | W | R-2 | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PP | TR | HK | PL-3 |
| V | **AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1559 | AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B2, B3 | X | X | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | B2, B3 | I | I | I | I | X | X | B3 | X |
| | **NON BERUSAHA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1560 | RUMAH TINGGAL | T5 | X | X | X | X | X | X | X | T5 | T2, T5 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | T2 | X | X | T2 | X |
| 1561 | MASJID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1562 | LANGGAR | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T2 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 1563 | MUSHOLA | X | T3 | T3 | T3 | X | T3 | X | X | T3 | T2 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | T3 | X | T3 | T3 |
| 1564 | GEREJA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1565 | VIHARA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1566 | PURA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1567 | KELENTENG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1568 | YAYASAN KEAGAMAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1569 | YAYASAN PENDIDIKAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1570 | YAYASAN SOSIAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1571 | YAYASAN KEMANUSIAAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | T3 | X | X | X | X |
| 1572 | RUANG TERBUKA NON HIJAU | X | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |

| KETERANGAN | |
|---|---|
| I | Pemanfaatan yang diizinkan dengan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang |
| T1 | Pembatasan waktu pengoperasian, yaitu pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan dalam Zona atau Sub-Zona dengan mengacu pada kebijakan sektor terkait |
| T2 | Pembatasan luas, yaitu pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Zona atau Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk mempertahankan pemanfaatan Ruang di sekitarnya |
| T3 | Pembatasan jumlah pemanfaatan, yaitu jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan telah mampu melayani kebutuhan, tanpa memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus |
| T4 | Pembatasan jumlah pemanfaaatan pada kegiatan usaha kecil dan industri kecil |
| T5 | Pembatasan kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan |
| B1 | Diperbolehkan bersyarat tidak merusak ekosistem dan mempertimbangkan karakteristik setempat |
| B2 | Mewajibkan menyediakan kebutuhan parkir, ruang bongkar muatan dan/atau tempat penampungan muatan di dalam kaveling/persil |
| B3 | Rekomendasi instansi terkait |
| X | Kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya |

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU

## TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

| ZONA | KODE | KDB Maksimum (%) | KLB Maksimum | KDH Minimum (%) | KTB Maksimum (%) | Luas Kaveling Minimum ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZONA LINDUNG** | | | | | | |
| Badan Air | BA | - | - | - | - | - |
| Taman Kota | RTH-2 | 15 | 0,15 | 85 | - | - |
| Taman Kecamatan | RTH-3 | 15 | 0,15 | 80 | - | - |
| Taman Kelurahan | RTH-4 | 15 | 0,15 | 70 | - | - |
| Taman RT | RTH-6 | 15 | 0,15 | 50 | - | - |
| Pemakaman | RTH-7 | 30 | 0,3 | 70 | - | - |
| Jalur Hijau | RTH-8 | 15 | 0,15 | 70 | - | - |
| **ZONA BUDI DAYA** | | | | | | |
| Badan Jalan | BJ | - | - | - | - | - |
| Hortikultura | P-2 | 20 | 0,2 | 75 | - | - |
| Pariwisata | W | 35 | 1,4 | 50 | - | - |
| Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | 75 | 3 | 10 | 75 | 72 |
| Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | 75 | 2,25 | 10 | 75 | 80 |
| Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | 75 | 1,5 | 10 | 75 | 90 |
| SPU Skala Kota | SPU-1 | 75 | 6 | 10 | 75 | - |
| SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | 75 | 3 | 10 | - | - |
| SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | 75 | 2,25 | 10 | - | - |
| SPU Skala RW | SPU-4 | 75 | 1,5 | 10 | - | - |
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | 70 | 8,4 | 10 | 70 | - |

| ZONA | KODE | KDB Maksimum (%) | KLB Maksimum | KDH Minimum (%) | KTB Maksimum (%) | Luas Kaveling Minimum ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | 70 | 4,2 | 10 | 70 | - |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | 70 | 3,5 | 10 | - | - |
| Perkantoran | KT | 75 | 3 | 10 | 75 | - |
| Pengelolaan Persampahan | PP | 75 | 2,5 | 10 | - | - |
| Transportasi | TR | 65 | 1,95 | 10 | - | - |
| Pertahanan dan Keamanan | HK | - | - | - | - | - |
| Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | PL-3 | 75 | 3 | 10 | - | - |

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

ANDI HARUN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU

## TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

| ZONA | KODE | GSB Minimum (m) | JBB Minimum (m) | JBS Minimum (m) | Tinggi Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZONA LINDUNG** | | | | | |
| Badan Air | BA | - | - | - | - |
| Taman Kota | RTH-2 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 10 meter |
| Taman Kecamatan | RTH-3 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 5 meter |
| Taman Kelurahan | RTH-4 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 5 meter |
| Taman RT | RTH-6 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 5 meter |
| Pemakaman | RTH-7 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter | - | - | 5 meter |

| ZONA | KODE | GSB Minimum (m) | JBB Minimum (m) | JBS Minimum (m) | Tinggi Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| | | jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | | | |
| Jalur Hijau | RTH-8 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter | - | - | 5 meter |
| | | jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | | | |
| **ZONA BUDI DAYA** | | | | | |
| Badan Jalan | BJ | - | - | - | - |
| Hortikultura | P-2 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter | - | - | 5 meter |
| | | jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | | | |
| Pariwisata | W | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter | - | - | 20 meter |
| | | jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | | | |
| Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter | - | - | 30 meter |
| | | jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | | | |
| Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter | - | - | 20 meter |
| | | jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | | | |
| Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter | - | - | 15 meter |
| | | jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x | | | |

| ZONA | KODE | GSB Minimum (m) | JBB Minimum (m) | JBS Minimum (m) | Tinggi Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rumija | | | |
| SPU Skala Kota | SPU-1 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 60 meter |
| SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 30 meter |
| SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 15 meter |
| SPU Skala RW | SPU-4 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 10 meter |
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 100 meter |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 40 meter |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter | - | - | 35 meter |

| ZONA | KODE | GSB Minimum (m) | JBB Minimum (m) | JBS Minimum (m) | Tinggi Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| | | jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | | | |
| Perkantoran | KT | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 30 meter |
| Pengelolaan Persampahan | PP | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 25 meter |
| Transportasi | TR | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 12 meter |
| Pertahanan dan Keamanan | HK | - | - | - | - |
| Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | PL-3 | jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB= (0,5 x Rumija)+1 meter<br>jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB= 0,5 x Rumija | - | - | 20 meter |

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

ANDI HARUN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU

**TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| **ZONA LINDUNG** | | |
| Badan Air | BA | a. Fasilitas Pendukung, berupa papan informasi<br>b. Prasarana minimal, meliputi:<br>1) Jalan inspeksi<br>2) Bangunan Pengendali Banjir: Bangun tanggul, bendungan dan kolam retensi untuk mengatur aliran air<br>3) *Check dam* untuk mengontrol debit air di hulu sungai<br>4) Konstruksi di Atas Badan Air<br>● Pondasi Khusus: Gunakan teknologi pondasi tiang pancang atau pelampung *(floating construction)* untuk menghindari kerusakan struktur akibat pergerakan air<br>● Material Ramah Lingkungan: Gunakan material konstruksi yang tahan air dan ramah lingkungan, seperti beton berpori |
| Taman Kota | RTH-2 | a. Jalur Pejalan Kaki<br>1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe *green pathway* dengan lebar perkerasan 3 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, marka, perambuan dan papan informasi (*Signage*)<br>2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk*<br>● untuk jalan arteri 3 m<br>● untuk jalan kolektor 2 m<br>● untuk jalan lokal 1,5 m<br>Dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan dan papan informasi (*Signage*) |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | b. Jenis Vegetasi, berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Lapangan olahraga<br>3) Tempat bermain/rekreasi<br>d. Utilitas perkotaan<br>1) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>2) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan<br>2) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>3) Disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat<br>4) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Pos jaga<br>2) Papan informasi<br>3) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>4) Lokasi dan informasi titik kumpul |
| Taman Kecamatan | RTH-3 | a. Jalur Pejalan Kaki<br>1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe *green pathway* dengan lebar perkerasan 3 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk*<br>● untuk jalan arteri 3 m<br>● untuk jalan kolektor 2 m<br>● untuk jalan lokal 1,5 m<br>Dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*) |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | b. Jenis Vegetasi, berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau<br>1) Lapangan olahraga<br>2) Tempat bermain/rekreasi<br>d. Utilitas perkotaan<br>1) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>2) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan<br>2) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>3) Disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat<br>4) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Kios<br>2) Papan informasi<br>3) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>4) Lokasi dan informasi titik kumpul |
| Taman Kelurahan | RTH-4 | a. Jalur Pejalan Kaki<br>1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe *green pathway* dengan lebar perkerasan 3 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk*<br>● untuk jalan arteri 3 m<br>● untuk jalan kolektor 2 m<br>● untuk jalan lokal 1,5 m<br>Dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Jenis Vegetasi, berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | c. Ruang Terbuka Non Hijau<br>1) Lapangan olahraga<br>2) Tempat bermain/rekreasi<br>d. Utilitas perkotaan<br>1) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>2) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan<br>2) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>3) Disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat<br>4) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Kios<br>2) Papan informasi<br>3) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>4) Lokasi dan informasi titik kumpul |
| Taman RT | RTH-6 | a. Jalur Pejalan Kaki<br>1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe *green pathway* dengan lebar perkerasan 3 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk*<br>● untuk jalan arteri 3 m<br>● untuk jalan kolektor 2 m<br>● untuk jalan lokal 1,5 m<br>Dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Jenis Vegetasi, berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau<br>1) Lapangan olahraga |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 2) Tempat bermain/rekreasi<br>d. Utilitas perkotaan<br>1) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>2) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan<br>2) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>3) Disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat<br>4) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Kios<br>2) Papan informasi<br>3) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>4) Lokasi dan informasi titik kumpul |
| Pemakaman | RTH-7 | a. Jalur Pejalan Kaki<br>1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe *green pathway* dengan lebar perkerasan 3 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk*<br>● untuk jalan arteri 3 m<br>● untuk jalan kolektor 2 m<br>● untuk jalan lokal 1,5 m<br>Dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Jenis Vegetasi, berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, berupa jalur sirkulasi pengunjung<br>d. Utilitas perkotaan<br>1) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>2) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | e. Prasarana Lingkungan<br>1) Saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan<br>2) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>3) Disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat<br>4) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Papan informasi<br>2) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>3) Lokasi dan informasi titik kumpul |
| Jalur Hijau | RTH-8 | a. Jalur Pejalan Kaki<br>1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe *green pathway* dengan lebar perkerasan 3 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk*<br>● untuk jalan arteri 3 m<br>● untuk jalan kolektor 2 m<br>● untuk jalan lokal 1,5 m<br>Dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Jenis Vegetasi, berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau<br>1) Lapangan olahraga<br>2) Tempat bermain/rekreasi<br>d. Utilitas perkotaan<br>1) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>2) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan<br>2) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 3) Disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat<br>4) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Kios<br>2) Papan informasi<br>3) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>4) Lokasi dan informasi titik kumpul |
| **ZONA BUDI DAYA** | | |
| Badan Jalan | BJ | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1 - 1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau<br>1) Berupa jalur hijau di sekitar badan jalan<br>2) Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa berupa buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan, hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>e. Prasarana Lingkungan<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Rambu dan marka jalan<br>2) Penerangan jalan umum<br>3) Median jalan<br>4) Lampu lalu lintas<br>5) Pulau jalan<br>6) Informasi lokasi titik kumpul |
| Hortikultura | P-2 | a. Jalur Pejalan Kaki, dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m lampu penerangan, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>c. Prasarana Lingkungan, berupa saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>d. Fasilitas Pendukung<br>1) Papan informasi<br>2) Kantor pengelola<br>3) Lapangan parkir sesuai standar teknis |
| Pariwisata | W | a. Jalur Pejalan Kaki, Pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* dengan lebar 2 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau,<br>tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Tempat bermain/rekreasi<br>3) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>2) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>3) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>4) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat<br>5) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan<br>2) Kantor pengelola |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 3) Pos keamanan<br>4) Pos kesehatan<br>5) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>6) Informasi lokasi titik kumpul |
| Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:<br>1) Tempat bermain/rekreasi<br>2) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>3) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>4) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>5) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>6) Disediakan tempat sampah komunal terpilih |
| Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Tempat bermain/rekreasi<br>2) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>3) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>4) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>5) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>6) Disediakan tempat sampah komunal terpilih |
| Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:<br>1) Tempat bermain/rekreasi<br>2) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 2) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>3) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>4) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>5) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>6) Disediakan tempat sampah komunal terpilih |
| SPU Skala Kota | SPU-1 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Tempat bermain/rekreasi<br>3) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 2) Pos jaga<br>3) Pos pemadam kebakaran<br>4) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>5) Informasi lokasi titik kumpul |
| SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Tempat bermain/rekreasi<br>3) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan<br>2) Pos jaga<br>3) Pos pemadam kebakaran |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 4) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>5) Informasi lokasi titik kumpul |
| SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Tempat bermain/rekreasi<br>3) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan<br>2) Pos jaga<br>3) Pos pemadam kebakaran<br>4) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>5) Informasi lokasi titik kumpul |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| SPU Skala RW | SPU-4 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Tempat bermain/rekreasi<br>3) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan<br>2) Pos jaga<br>3) Pos pemadam kebakaran<br>4) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>5) Informasi lokasi titik kumpul |
| Perdagangan dan Jasa | K-1 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| Skala Kota | | umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Koridor pendukung jalur pejalan kaki<br>3) Tempat bermain/rekreasi<br>4) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan<br>2) Tempat perhentian kendaraan<br>3) Pos keamanan<br>4) Pos kesehatan<br>5) Pos pemadam kebakaran<br>6) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>7) Informasi lokasi titik kumpul |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1 - 1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Koridor pendukung jalur pejalan kaki<br>3) Tempat bermain/rekreasi<br>4) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan<br>2) Tempat perhentian kendaraan<br>3) Pos keamanan<br>4) Pos kesehatan<br>5) Pos pemadam kebakaran<br>6) Lapangan parkir sesuai standar teknis |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 7) Informasi lokasi titik kumpul |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) Koridor pendukung jalur pejalan kaki<br>3) Tempat bermain/rekreasi<br>4) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan<br>2) Tempat perhentian kendaraan<br>3) Pos keamanan<br>4) Pos kesehatan<br>5) Pos pemadam kebakaran |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 6) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>7) Informasi lokasi titik kumpul |
| Perkantoran | KT | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas<br>2) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan<br>2) Tempat perhentian kendaraan<br>3) Pos keamanan<br>4) Pos kesehatan<br>5) Pos pemadam kebakaran<br>6) Lapangan parkir sesuai standar teknis |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | 7) Informasi lokasi titik kumpul |
| Pengelolaan Persampahan | PP | A. Prasarana minimal, meliputi:<br>1) Menyediakan jalur pedestrian<br>2) Menyediakan prasarana perhubungan<br>3) Menyediakan penerangan umum<br>4) Menyediakan infrastruktur kelistrikan, air bersih dan telekomunikasi<br>5) Menyediakan jalur evakuasi bencana<br>6) Menyediakan sistem peringatan dini<br>7) Menyediakan elemen tata informasi<br>8) Menyediakan penanda/rambu peringatan<br>9) Menyediakan instalasi pengolahan<br>10) Menyediakan sumur uji atau pantau<br>11) Menyediakan penanganan gas<br>B. Sarana minimal, meliputi:<br>1) Menyediakan pelataran parkir kendaraan;<br>2) Menyediakan ruang terbuka hijau<br>3) Menyediakan hidran<br>4) Menyediakan tempat pembuangan sampah<br>5) Menyediakan instalasi pengolahan<br>6) Menyediakan sumur uji atau pantau<br>7) Menyediakan sumur resapan<br>8) Menyediakan pengolahan limbah domestik<br>9) Menyediakan pos jaga<br>C. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:<br>1) Buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu |
| Transportasi | TR | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*)<br>b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | c. Ruang Terbuka Non Hijau, Dapat berupa:<br>1) Koridor pendukung jalur pejalan kaki<br>2) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Hidran umum mempunyai jarak minimal 3 m dari tepi jalan<br>2) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>3) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran<br>2) Dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling<br>3) Dibangun sumur resapan skala lingkungan<br>4) Saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan/di bawah jalur pejalan kaki<br>5) Penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis<br>6) Terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat/memiliki sistem pengolahan air limbah setempat<br>7) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas keselamatan pelayaran<br>2) Kantor pengelola<br>3) Pos keamanan<br>4) Pos kesehatan<br>5) Pos pemadam kebakaran<br>6) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>7) Informasi lokasi titik kumpul |
| Pertahanan dan Keamanan | HK | - |
| Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | PL-3 | a. Jalur Pejalan Kaki, pada bagian tepi jalan dibangun jalur pejalan kaki tipe *sidewalk* selebar 1-1,5 m dilengkapi lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, marka, perambuan, dan papan informasi (*Signage*) |

| ZONA | KODE | PRASARANA DAN SARANA MINIMAL |
|---|---|---|
| | | b. Ruang Terbuka Hijau, jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar<br>c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:<br>1) Koridor pendukung jalur pejalan kaki<br>2) *Buffer*/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu<br>d. Utilitas Perkotaan<br>1) Jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel<br>2) Dilayani oleh jaringan distribusi listrik<br>e. Prasarana Lingkungan<br>1) Saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan<br>2) Disediakan tempat sampah komunal terpilih<br>f. Fasilitas Pendukung<br>1) Fasilitas keselamatan pelayaran<br>2) Kantor pengelola<br>3) Pos keamanan<br>4) Pos kesehatan<br>5) Pos pemadam kebakaran<br>6) Lapangan parkir sesuai standar teknis<br>7) Informasi lokasi titik kumpul |

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

ANDI HARUN

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN I**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN KKOP

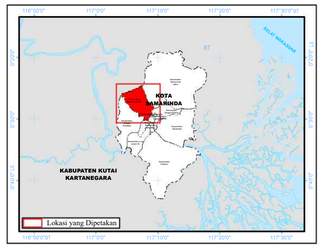
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**ONA LINDUNG**

**ona R an Te ka Hija**
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kelurahan
- RTH-5 Taman RT
- RTH-7 Pemakaman
- RTH Jalur Hijau

**ONA BUDI DAYA**

**ona Pe anian**
- P-2 Hortikultura

**ona Pen elolaan Pe sa a an**
- PP Pengelolaan Persampahan

**ona Pe da an an dan asa**
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

**ona Pe kan o an**
- KT Perkantoran

**ona Pe a an**
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

**ona Sa ana Pela anan U**
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 SPU Skala RW

**KETENTUAN KHUSUS**

**Ka asan Kesela a an O e asi Pene an an**
- Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

**Penjelasan Kode Lokasi**




SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022
6. Keputusan MenLHK Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan ungsi Kawasan Hutan, Dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

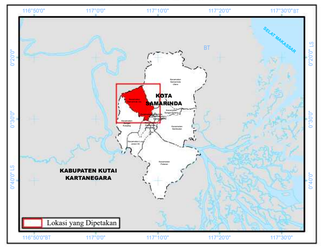
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**ONA BUDI DAYA**

**ona Pe da an an dan asa**
- K1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

**ona Pe kan o an**
- K7 Perkantoran

**ona Pe a an**
- R2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R4 Perumahan Kepadatan Rendah

**ona Sa ana Pela anan U**
- SPU1 SPU Skala Kota
- SPU2 SPU Skala Kecamatan
- SPU3 SPU Skala Kelurahan
- SPU4 SPU Skala RW

**ona Pe a anan dan Kea anan**
- HK Pertahanan dan Keamanan

**ona Pa i isa a**
- W Pariwisata

**KETENTUAN KHUSUS**

**Ka asan Ra an Ben ana**
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Longsor Tingkat Sedang

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022
6. Keputusan MenLHK Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan ungsi Kawasan Hutan, Dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.1

III.A.2

III.A.3

III.A.4

Kelurahan
Air Hitam

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.B.1

III.B.2

III.B.3

Kelurahan
Air Putih

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.1

III.C.2

III.C.3

III.C.4

III.C.5

III.C.6

III.C.7

Kelurahan
Sidodadi

Kelurahan
Dadi Mulya

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.D.1

III.D.2

III.D.3

III.D.4

Kelurahan
Teluk Lerong
Ilir

Kelurahan
Jawa

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KT

SPU-1

SPU-4

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN I**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

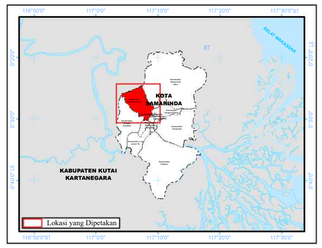
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**ONA BUDI DAYA**

**ona Pe kan o an**
- KT Perkantoran

**ona Sa ana Pela anan U**
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-1 SPU Skala RW

**KETENTUAN KHUSUS**

**Te a E ak asi Ben ana**
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

**Penjelasan Kode Lokasi**

III. A.1 = WP / SWP / Blok

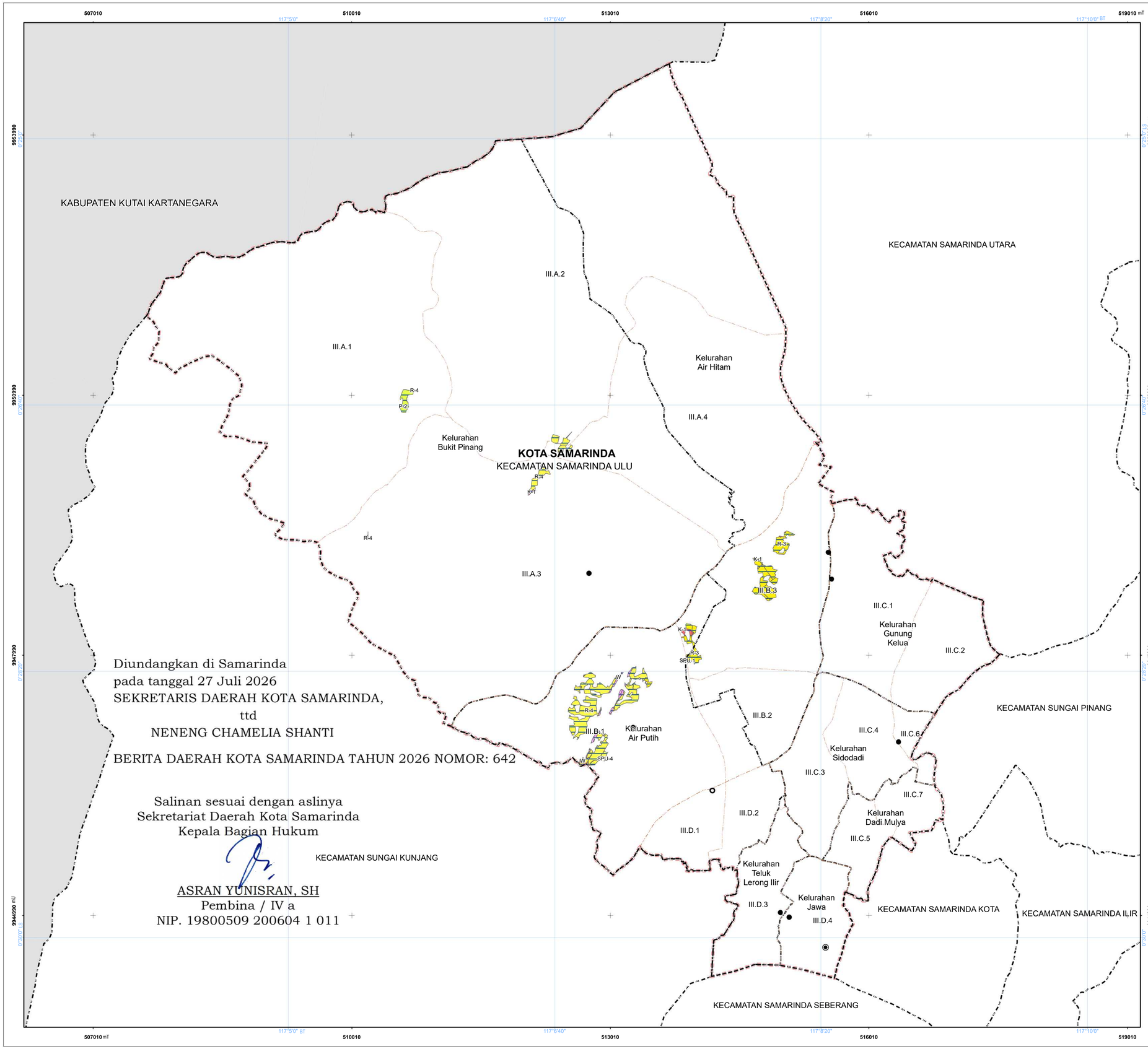
SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022
6. Keputusan MenLHK Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan ungsi Kawasan Hutan, Dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun




Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN II**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR

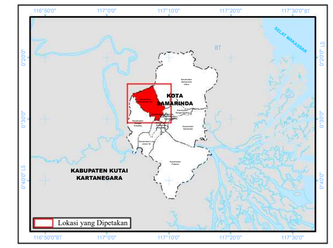
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**ONA BUDI DAYA**
ona Pa i isa a
Le end Pariwisata
ona Pe da an an dan asa
K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
ona Pe anian
P-2 Hortikultura
ona Pe a an
R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 Perumahan Kepadatan Rendah
ona Sa ana Pela anan U
SPU-1 SPU Skala Kota
SPU-4 SPU Skala RW

**KETENTUAN KHUSUS**
Ka asan Resa an Ai
Kawasan Resapan Air

**Penjelasan Kode Lokasi**
WP
SWP
Blok
III. A.1

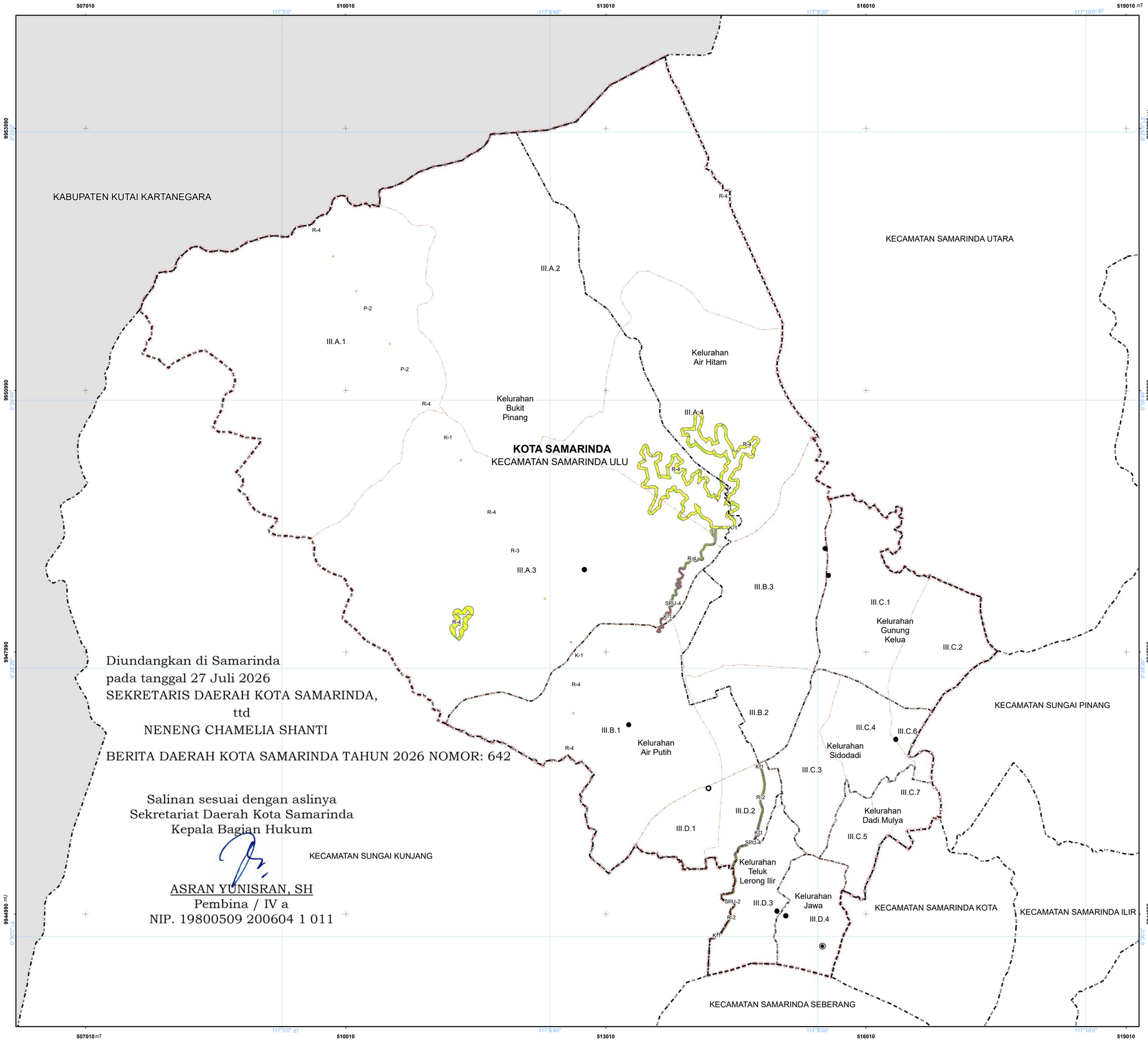
SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022
6. Keputusan MenLHK Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan ungsi Kawasan Hutan, Dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun




Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN III**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

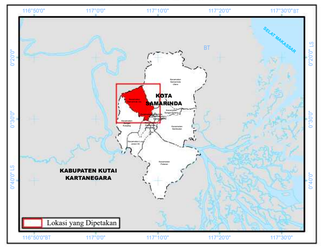
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**ONA BUDI DAYA**

**ona Pe anian**
- P-2 Hortikultura

**ona Pe a an**
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

**ona Po da an an dan asa**
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

**ona Sa ana Pela anan U**
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-4 SPU Skala RW

**KETENTUAN KHUSUS**

**Ka asan Se adan**
- Sempadan Sungai
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Ketenagalistrikan

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP
SWP
Blok
III. A.1

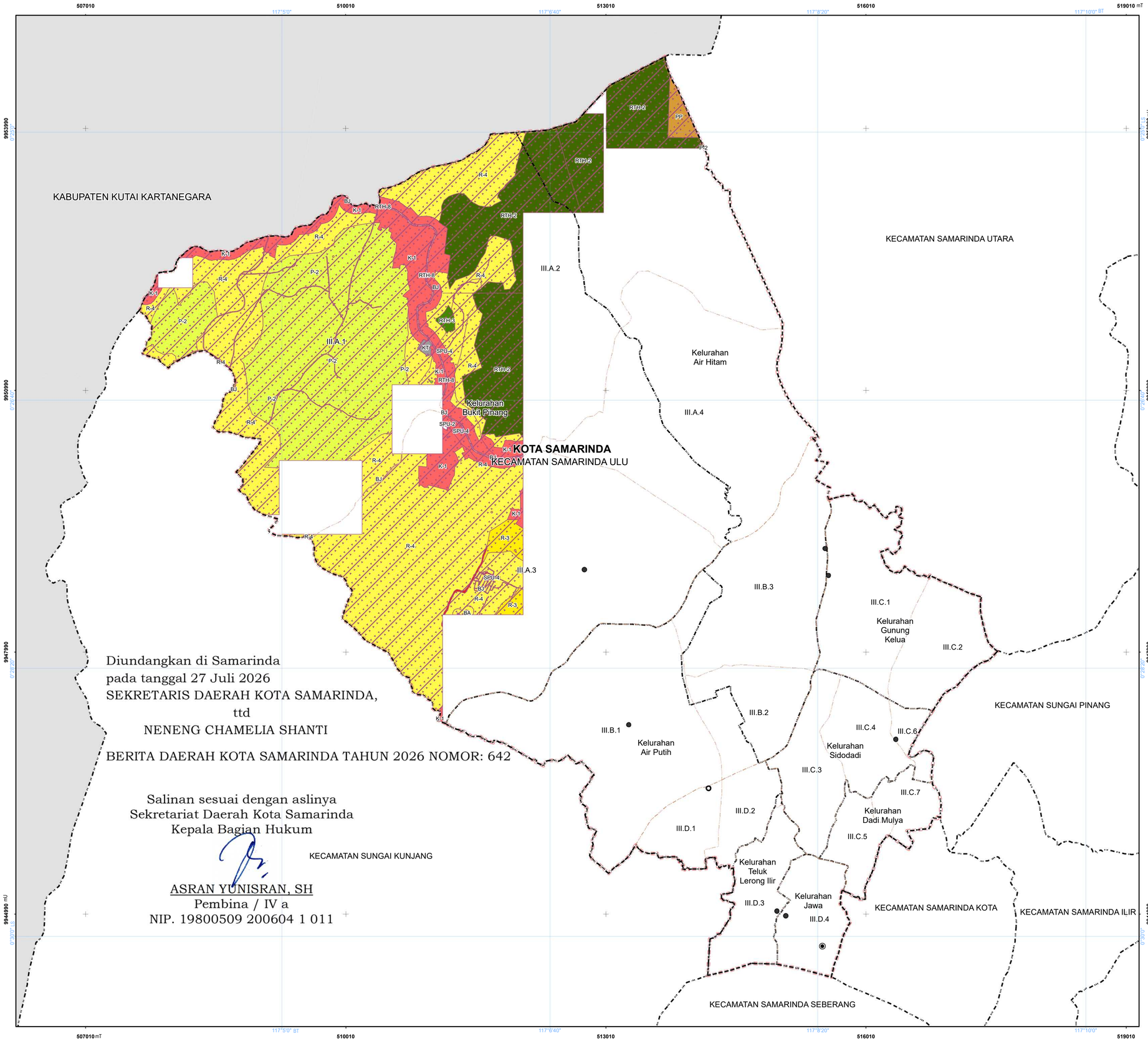
SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022
6. Keputusan MenLHK Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan ungsi Kawasan Hutan, Dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun




Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN IV**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

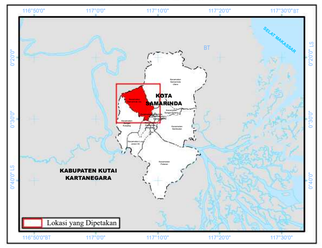
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**ONA LINDUNG**

**ona Badan Ai**
- BA Badan Air

**ona R an Te ka Hija**
- RTH-1 Taman Kota
- RTH-2 Taman Kecamatan
- RTH-3 Taman RT
- RTH-7 Pemakaman
- RTH Jalur Hijau

**ONA BUDI DAYA**

**ona Badan alan**
- BJ Badan Jalan

**ona Pen elolaan Pe sa a an**
- PP Pengelolaan Persampahan

**ona Pe da an an dan asa**
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

**ona Pe kan o an**
- K-7 Perkantoran

**ona Pe anian**
- P-2 Hortikultura

**ona Pe a an**
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

**ona Sa ana Pela anan U**
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-4 SPU Skala RW

**KETENTUAN KHUSUS**

**Ka asan Pe a an an Mine al dan Ba a a**
- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III. A.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022
6. Keputusan MenLHK Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan ungsi Kawasan Hutan, Dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

III.A.2

III.A.1

Kelurahan
Air Hitam

III.A.4

Kelurahan
Bukit Pinang

**KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA ULU

III.A.3

III.B.3

III.C.1

Kelurahan
Gunung
Kelua

III.C.2

BA.h

KECAMATAN SUNGAI PINANG

III.B.2

III.B.1

Kelurahan
Air Putih

III.C.4

III.C.6

Kelurahan
Sidodadi

III.C.3

III.C.7

III.D.2

Kelurahan
Dadi Mulya

III.D.1

III.C.5

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Kelurahan
Teluk
Lerong Ilir

III.D.3

Kelurahan
Jawa

III.D.4

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 642

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

507010 mT 510010 513010 516010 519010 mT
117°5'0" BT 117°6'40" 117°8'20" 117°10'0" BT
9953990 mU 9950990 9947990 9944990 mU
0°29'20" 0°30'0"

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN V**
**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA**
**NOMOR 20 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**
**WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA ULU**

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEKNIK PENGATURAN ONASI

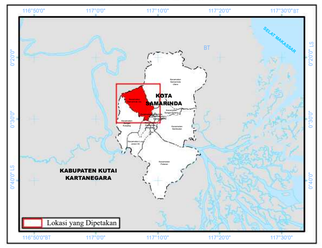
U

SKALA : 1:22.000

0 1 2 4 Km

| | |
|---|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI




## KETERANGAN :

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Kelurahan / Desa

**BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa

**BATAS PERENCANAAN**
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**ONA LINDUNG**

**ona Badan Ai**

BA Badan Air

**Le end**

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP
SWP
Blok
III. A.1

**Penjelasan Teknik Pen a an onasi**

Kode Sub Zona
Teknik Pengaturan Zonasi
h: TPZ Zona Ambang
BA. h

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Batas Administrasi Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, Pemendagri No. 85 Tahun 2019
2. Peta Batas Kelurahan Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 55-56 Tahun 2022 dan No. 106-112 Tahun 2020
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
4. SK Walikota Samarinda Tahun 2021 Tentang Revisi Penetapan Delineasi WP Kec. Samarinda Ulu
5. Hasil Analisis Tim PenyusunTahun 2022
6. Keputusan MenLHK Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan ungsi Kawasan Hutan, Dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
**WALI KOTA SAMARINDA**

ttd

Andi Harun